

AHMAD MUZANI: TUGAS MPR MEMBANGUN SUASANA KENEGARAAN LEBIH KONDUSIF

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



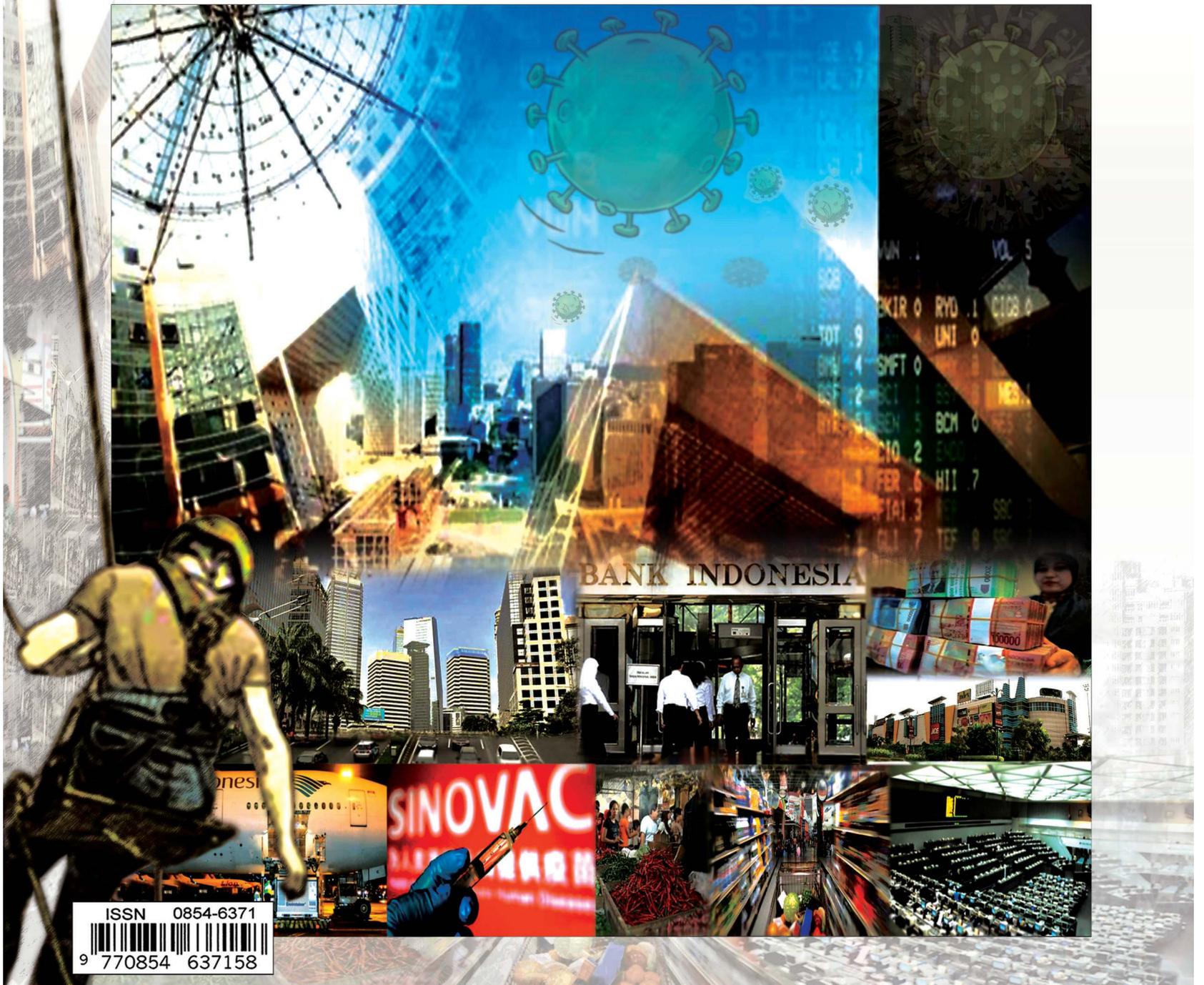
MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN



EDISI NO.12/TH.XIV/DESEMBER 2020

PEMULIHAN DAN PROYEKSI EKONOMI INDONESIA 2021



ISSN 0854-6371



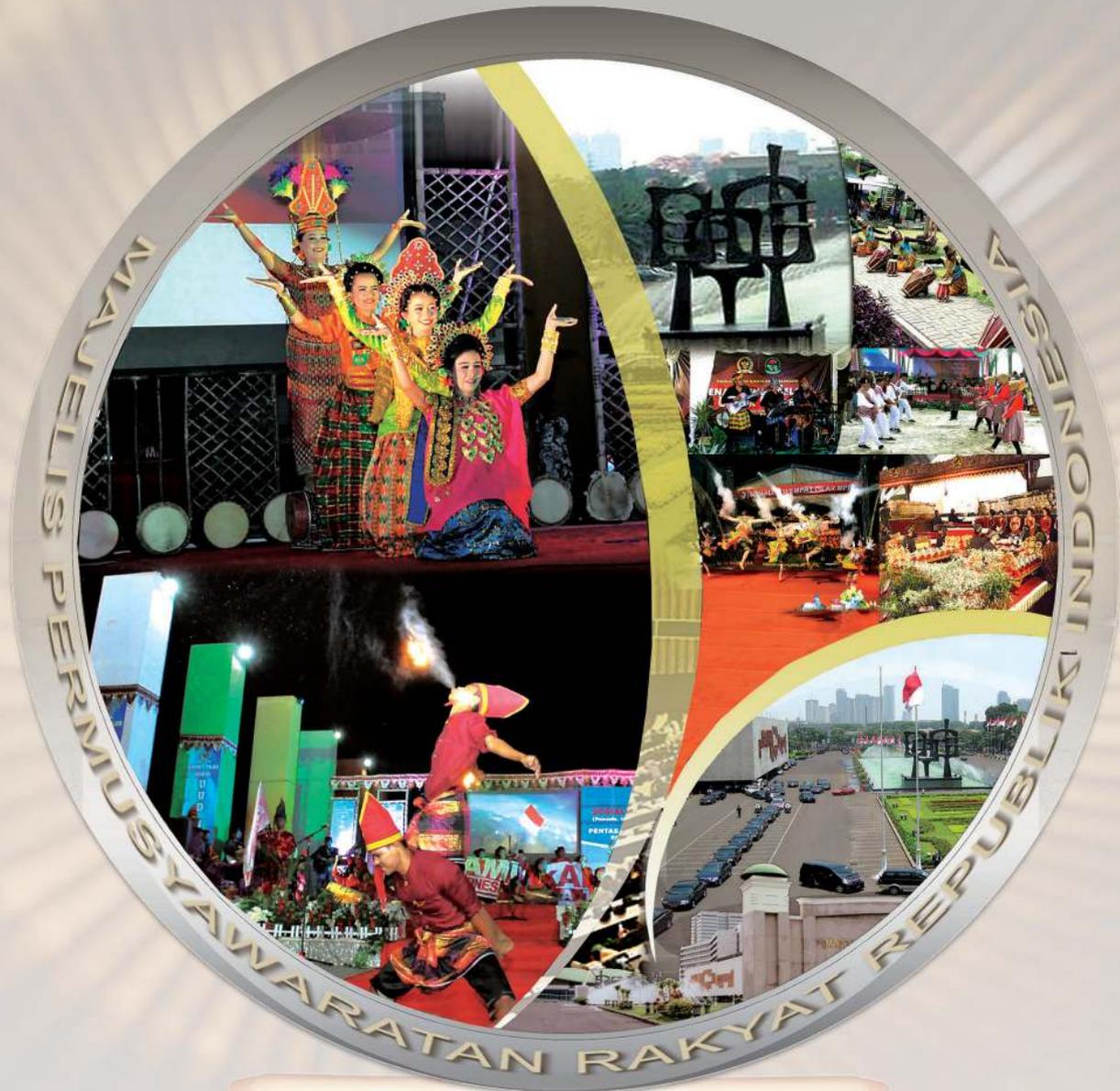
9 770854 637158

06 **Perspektif**
Kerja Berat Dongkrak
Konsumsi di Tengah Pandemi

26 **Nasional**
Dengan Pemahaman Empat Pilar
Munculkan Generasi Muda Unggul

39 **Selingan**
Pamor Sang Pangeran
di Saat Pandemi Covid-19

50 **Sosialisasi**
Empat Pilar Hasil Ijtihad
Kiai dan Alim Ulama



EMPAT PILAR MPR
 PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
 MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NKRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi

EDISI NO.12/TH.XIV/DESEMBER 2020



08 BERITA UTAMA

Proyeksi Ekonomi Indonesia Tahun 2021

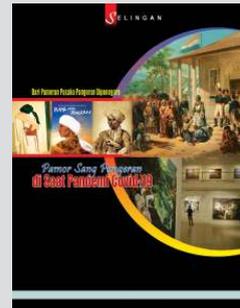
Vaksin untuk Covid-19 memberi secercah harapan bagi pemulihan ekonomi. Dengan vaksinasi massal perekonomian Indonesia akan pulih karena semua sektor ekonomi sudah bergerak. Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi kembali normal, yakni pada kisaran 5%.



16 Nasional
Press Gathering Pimpinan MPR dengan Wartawan Parlemen di Bandung



50 Sosialisasi
Sosialisasi di Pandeglang: Empat Pilar Hasil Ijtihad Kiai dan Alim Ulama



39 SELINGAN
Pameran Pusaka Diponegoro



76 Profil
Lestari Moerdijat

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Gema Pancasila	36
Aspirasi Masyarakat	47
Varia MPR	68
Wawancara	70
Figur	72
Ragam	74
Dari Rumah Kebangsaan	80
Rehal	82



COVER

Edisi No.12/TH.XIV/Desember 2020
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,

Heri Herawan, Mafrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

KOORDINATOR REPORTASE

Ario Setiawan

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,

Sucipto, Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Ana Suzana, Bayu Nugroho,

Tengku Novan Muda Mulya,

Yenita Revi, Ikhwan Bimo F,

Amelia Rubinta

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,

A. Ariyana, Agus Darto

PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayatni

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana, Armansyah,

Dhita Fitasari Junaid

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Layanan

Informasi, Biro Humas,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238

Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021

SEJAK Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi pandemi telah terjadi perubahan drastis dalam setiap aspek kehidupan. Pandemi Covid-19 membawa dampak pada kehidupan manusia, tak terkecuali ekonomi. Perekonomian dunia langsung anjlok akibat pandemi ini.

Pandemi ini telah melumpuhkan kegiatan perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk membatasi banyak kegiatan, mulai dari pendidikan, industri, transportasi, hingga pariwisata. Pembatasan ini berdampak signifikan terhadap perekonomian. Apalagi pandemi ini berdampak besar terhadap permintaan dan penawaran barang serta jasa di seluruh dunia.

Di Indonesia, kasus positif pertama Covid-19 diumumkan pada awal Maret 2020. Hingga kini, kasus positif Covid-19 terus bertambah. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum memperlihatkan puncaknya. Seperti di negara-negara lain, pandemi Covid-19 langsung memukul perekonomian Indonesia. Pasalnya, sektor produksi, distribusi, dan konsumsi terganggu akibat pandemi Covid-19.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal II – 2020 minus 5,32%. Ekonomi Indonesia pada kuartal III masih terkena dampak pandemi Covid-19. BPS mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III – 2020 minus 3,49%. Secara teori jika kuartal II dan kuartal III pertumbuhan ekonomi mengalami minus, maka disebut dengan resesi.

Indonesia memasuki resesi karena pertumbuhan ekonominya minus dua kali berturut-turut. Secara keseluruhan, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,6%, bahkan minus 1,7% pada 2020. Angka ini turun drastis dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar

5,02%. Penyebab penurunan itu tidak lain adalah pandemi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19).

Di penghujung 2020 ini ada secercah harapan karena sejumlah perusahaan farmasi dan bioteknologi tengah merampungkan uji klinis vaksin untuk Covid-19. Bahkan ada sejumlah negara mulai melakukan vaksinasi untuk Covid-19 pada Desember 2020. Vaksinasi memberi kekebalan pada tubuh seseorang terhadap Covid-19. Maka, seseorang bisa kembali melakukan aktivitas secara normal. Vaksinasi memberi harapan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi Indonesia pada 2021 diperkirakan akan menjadi titik balik menuju pemulihan.

Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh dalam rentang 4,5% hingga 5,5% pada 2021. Angka ini tak jauh berbeda dengan proyeksi Bank Indonesia (BI) yang memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,8%-5,8% pada 2021. Proyeksi itu sejalan dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3% pada 2021. Bank Dunia pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,8% pada 2021.

Dari kondisi ini, kita dapat menarik benang merah bahwa penyebab anjloknya ekonomi adalah pandemi Covid-19. Sehingga, pendekatan utama dalam pemulihan ekonomi nasional harus sejalan dan bahkan mengutamakan penanganan Covid-19.

Tentu, pemberian vaksin Covid-19 bisa menjadi salah satu jalan keluar, meski bukan satu-satunya. Kita berharap, lewat vaksinasi yang didukung dengan disiplin protokol kesehatan dapat menguatkan kembali individu maupun kelompok dalam menjalankan usaha-usaha yang berimplikasi kepada pemulihan ekonomi nasional. □

INDONESIA INI BARU



Kerja Berat Dongkrak Konsumsi di Tengah Pandemi dan Resesi

PRASYARAT belanja dan investasi itu sentimen positif. Ketika pandemi dan resesi ekonomi terjadi dalam periode waktu yang sama seperti sekarang, keduanya menjadi sentimen negatif yang mendorong setiap orang atau konsumen dan investor semakin berhati-hati dan menahan diri, termasuk belanja atau konsumsi.

Dengan begitu, mudah untuk dipahami bahwa mendorong masyarakat belanja atau investasi di tengah pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi saat ini adalah pekerjaan cukup berat. Pandemi menyebabkan banyak orang takut keluar rumah. Konsekuensinya, alat transportasi seperti mobil dan motor lebih sering diam dan tidak perlu isi atau beli bensin minimal selama beberapa hari. Dampak isolasi mandiri oleh jutaan keluarga itu bahkan juga dirasakan pelaku jasa transportasi umum hingga pengemudi bajaj akibat langkanya calon penumpang.

Di Jakarta, pusat belanja atau mal serta restoran sudah dibuka selama PSBB (pembatasan sosial skala besar) transisi dan siap melayani konsumen. Nyatanya, baik mal maupun restoran tetap sepi pengunjung. Sektor pariwisata menghadirkan pemandangan lebih memprihatinkan. Pada banyak destinasi di dalam negeri, jumlah wisatawan asing maupun lokal yang berkunjung anjlok sampai rata-rata di atas 80%.

Maskapai penerbangan jelas terdampak. Dengan langkanya wisatawan, tingkat hunian hotel tidak sampai 5%. Banyak hotel untuk sementara tutup. Ragam jasa pendukung bisnis hotel, seperti kafe hingga laundry dan pemasok kebutuhan lainnya pasti terkena dampaknya. Semua ini terjadi karena fakta bahwa sebagian besar masyarakat masih waspada pandemi dan was was akibat resesi ekonomi saat ini.

Gambaran tentang anjloknya minat masyarakat untuk belanja dan investasi terlihat pada gelembung akumulasi dana pihak ketiga (DPK) di perbankan. Per Agustus 2020, simpanan dana kelompok penabung di atas Rp 5 miliar memperlihatkan lonjakan sangat signifikan, menjadi Rp 373 triliun dibanding Agustus 2019 yang masih berjumlah Rp 115

triliun. Kelompok penabung ini diidentifikasi sebagai masyarakat menengah atas dan institusi. Karena alasan masih pandemi dan mulai resesi, gelembung volume DPK di perbankan dipastikan berlanjut dengan pertumbuhan diperkirakan di atas 8%, sementara pertumbuhan kredit diperkirakan tak lebih dari 1,5%.

Jadi, memang cukup berat pekerjaan bersama dalam merangsang minat masyarakat untuk berbelanja. Semua orang butuh kepastian dan suasana kondusif untuk belanja maupun investasi. Pandemi



FFY

dan resesi sudah menghadirkan tekanan psikologis bagi banyak orang. Jangan lagi tekanan psikologis itu dieskalasi dengan aksi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Kalau konsumsi masyarakat melemah dalam periode waktu yang panjang, kegiatan produksi juga akan menurun dalam skala yang signifikan. Skala produksi beragam produk di banyak pabrik akan diturunkan ke level terendah. Kalau sudah begitu, pengurangan peran pekerja akan dilakukan banyak manajemen pabrik. Minimal, opsi merumahkan karyawan menjadi pilihan.

Agar minat belanja dan investasi tidak semakin lemah harus

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI



dimunculkan faktor pendorong yang mampu merangsang minat setiap orang membelanjakan uangnya, termasuk berinvestasi. Untuk tujuan ini, pemerintah diharapkan menggunakan semua instrumen yang dimilikinya. Salah satu kepastian yang telah ditetapkan pemerintah adalah memperpanjang Bantuan Sosial Tunai (BST) hingga Juni 2021.

Demi meningkatkan produktivitas semua mesin perekonomian, tidak ada salahnya jika volume BST diperbesar. BST gelombang pertama sebesar Rp 600.000 per KPM (keluarga penerima manfaat) telah dibagikan dalam tiga tahap sepanjang April - Juni 2020, sedangkan BST gelombang kedua sebesar Rp 300.000 per KPM dibagikan dalam enam tahap sepanjang periode Juli - Desember 2020.

Program PEN

Untuk tahun ini, Komite Penanganan Covid-19 dan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi (PEN) mengelola anggaran Rp 695,2 triliun. Untuk mengakselerasi pemulihan, Satgas ini pun diminta bekerja ekstra cepat. Hingga November, realisasi atau penyerapannya sudah mencapai Rp 366,86 triliun atau 52,8%, terhitung sejak Satgas PEN dibentuk pada awal Juli 2020. Penyaluran semua anggaran itu diharapkan efektif sesuai tujuannya. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat diharapkan peduli dan mengawal kerja Satgas PEN.

Bagaimana pun, kerja cepat Satgas PEN menyalurkan anggaran stimulus patut diapresiasi. Semua pihak berharap dan mendorong Satgas PEN menyalurkan anggaran tepat sasaran dan tepat

guna, sehingga pemulihan ekonomi bisa cepat terwujud. Selain itu, Satgas PEN pun diharapkan aktif memublikasikan progres kerjanya. Publikasi progres itu sangat penting untuk membangkitkan keyakinan semua elemen masyarakat tentang prospek perekonomian nasional. Masyarakat harus diyakinkan bahwa Indonesia mampu keluar dengan selamat dari perangkap pandemi dan resesi sekarang ini.

Penyaluran anggaran PEN dari klaster kesehatan dengan pagu Rp 87,55 triliun dan klaster perlindungan sosial dengan pagu Rp 203,9 triliun sejauh ini cukup efektif, sehingga eksese atau dampak Pandemi Covid-19 tidak melebar ke aspek kehidupan lainnya. Kebutuhan pokok masyarakat cukup tersedia dan juga tidak terjadi gejolak harga. Khusus untuk penyaluran atau penyerapan pada klaster insentif usaha, klaster dukungan UMKM dan klaster pembiayaan korporasi, Satgas PEN diharapkan lebih bijak dan berhati-hati. Kalau diakumulasi, realisasi anggaran dari klaster insentif usaha dan klaster dukungan UMKM sudah lebih dari Rp 120 triliun.

Target penyaluran pada tiga klaster ini hendaknya dikaitkan atau mempertimbangkan fakta tentang masih lemahnya konsumsi. Realisasi anggaran dari tiga klaster ini tak lain adalah stimulus untuk menjaga ketahanan sekaligus mencegah kebangkrutan perusahaan dan unit-unit UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan stimulus ini, baik korporasi maupun bisnis berskala UMKM, diharapkan mulai memproduksi. Namun, realisasi anggaran PEN pada tiga klaster ini jangan sampai sia-sia karena konsumsi masyarakat yang masih sangat lemah seperti sekarang ini. □

Pemulihan dan Proyeksi **Ekonomi** Indonesia 2021

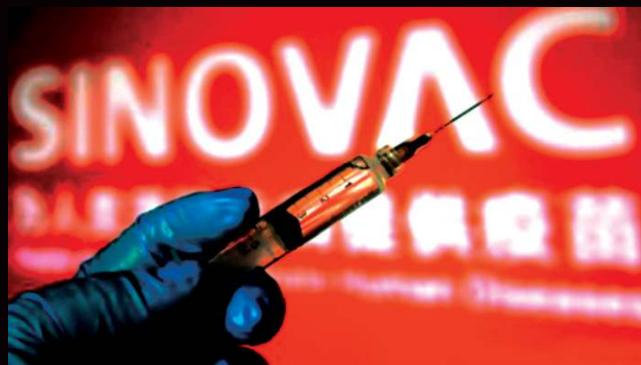


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Vaksin untuk Covid-19 memberi secercah harapan bagi pemulihan ekonomi. Dengan vaksinasi massal perekonomian Indonesia akan pulih karena semua sektor ekonomi sudah bergerak. Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi kembali normal, yakni pada kisaran 5%.

SEKITAR pukul 21.30 WIB, pesawat Garuda Boeing 777-300 mendarat di Bandara Soekarno – Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan pesawat yang menempuh perjalanan dari Cina pada Ahad malam, 6 Desember 2020, ini sangat istimewa. Presiden RI Joko Widodo menyempatkan diri memantau kedatangan pesawat yang tak lain dan tak bukan mengangkut 1,2 juta vaksin Sinovac asal Cina.

“Saya ingin menyampaikan suatu kabar baik bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020,” kata Jokowi dalam video yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Ahad (6/12/2020).

Kedatangan vaksin buatan Sinovac memang menjadi harapan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Vaksin Sinovac adalah vaksin berjenis inactivated vaccine. Secara singkat inactivated vaccine adalah vaksin yang menggunakan versi lemah atau inaktivasi dari virus untuk memancing respons imun. Vaksin inactivated memerlukan beberapa dosis dari waktu ke waktu untuk mendapatkan imunitas

berkelanjutan terhadap penyakit.

Namun, vaksin buatan Cina ini tak bisa langsung disuntikkan kepada masyarakat. Sebab, vaksin ini harus terlebih dahulu melalui tahap pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Kita amat bersyukur, Alhamdulillah, vaksin sudah tersedia. Artinya, kita bisa segera mencegah meluasnya wabah Covid-19. Tetapi, untuk memulai vaksinasi masih perlu tahapan-tahapan dari BPOM,” ucap Presiden.

Selain 1,2 juta dosis vaksin ini, Indonesia juga berupaya mendatangkan lagi vaksin Covid-19. Rencananya 1,8 juta dosis vaksin pada awal Januari 2021. Selain itu, Indonesia juga akan mendatangkan bahan baku curah vaksin Sinovac sebanyak 15 juta dosis pada Desember ini, dan 30 juta dosis pada Januari 2021 ini.

Sejak awal Maret 2020, ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia, kasus positif Covid-19 terus bertambah setiap harinya. Data terkini, sampai akhir November 2020, kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah melampaui 570 ribu orang dengan kematian melebihi 17.500 orang, dan pasien sembuh sebanyak 470.000 lebih. Hingga kini jumlah



kasus positif Covid-19 terus bertambah ribuan kasus setiap hari. Artinya, pandemi Covid-19 di Indonesia sesungguhnya belum mencapai puncaknya.

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak pada setiap aspek kegiatan manusia, termasuk sektor yang paling utama, yaitu ekonomi. Pandemi ini telah melumpuhkan kegiatan perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, banyak kegiatan ekonomi dibatasi, mulai dari aktivitas pendidikan hingga pariwisata. Pandemi berdampak besar terhadap permintaan dan penawaran barang serta jasa di seluruh dunia karena masyarakat mengurangi konsumsinya.

Sektor industri harus mengurangi jumlah karyawan yang bekerja setiap hari dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, sehingga berimbas pada berkurangnya pendapatan dan tertekannya produktivitas. Sektor lain seperti UMKM, pariwisata,

transportasi, hingga perdagangan lebih tertekan seiring dengan semakin sedikit masyarakat yang berani beraktivitas normal, seperti berpergian atau berbelanja.

Seiring dengan penurunan pendapatan maka perusahaan terpaksa mengurangi jumlah karyawan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk menekan biaya operasional. Akibatnya jumlah pengangguran meningkat. Di tengah pandemi terdapat sekitar 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak Covid-19, serta 2,9 juta penduduk usia kerja baru setiap tahun. Peningkatan jumlah pengangguran sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin yang diprediksikan Bappenas bertambah 2 juta orang pada akhir 2020.

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,6% atau bahkan minus 1,7% pada 2020. Pada kuartal II – 2020, kontraksi ekonomi Indonesia mencapai minus 5,32%. Untuk kuartal III –

2020, kontraksi masih minus 3,49%. Secara teoritis, bila pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus selama dua kali berturut-turut, maka bisa dikatakan Indonesia telah mengalami resesi.

Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan mengaku, prihatin melihat ekonomi Indonesia mengalami resesi. "Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak hebat di semua sektor kehidupan, baik kesehatan dan termasuk perekonomian. Kelompok masyarakat yang paling terkena dampak pandemi Covid-19 ini adalah masyarakat lapisan bawah. Banyak di antara mereka terkena PHK atau usahanya gulung tikar. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Sebab, dampak jangka panjangnya tentu akan lebih besar lagi jika pandemi Covid-19 ini masih terus ada," katanya kepada *Majelis*.

Hal serupa juga dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Idris Laena. Dia

mengakui Indonesia masuk dalam resesi ekonomi. Namun, dalam kuartal III – 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mulai terlihat. “Jika pada kuartal II – 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus, tapi pada kuartal III – 2020 penurunan pertumbuhan ekonomi sebenarnya tidak terlalu signifikan. Meski secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita tetap minus, tapi sudah mulai jauh lebih baik dari sebelumnya,” katanya kepada *Majelis*.

Sebaliknya anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno melihat ekonomi Indonesia sebenarnya sudah mengalami pelambatan sejak dua tahun terakhir. Pelambatan ini terjadi saat Presiden

menghadapi angin haluan (head wind) yang besar, kalau tidak mau disebut badai yang sempurna (perfect storm),” ujar anggota Badan Pengkajian MPR ini.

Bagi Hendrawan, langkah pemerintah yang menetapkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional di tengah penanganan pandemi Covid-19 sudah tepat. “Sebagai sebuah strategi, kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah tepat,” tuturnya.

Hendrawan mencontohkan Perpres 72/2020. Perpres ini disusun dengan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi secara cepat. “Tinggal implementasinya yang terus kita monitor. Rapat terakhir monitoring

pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi nasional.

Pertama, pemerintah telah melakukan langkah memperkuat jaring pengaman sosial. Ini dapat dilihat dari bantuan sosial dari pemerintah, khususnya kepada masyarakat yang paling terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako, dan lainnya kepada masyarakat lapisan bawah. Selain itu, juga dicanangkan bantuan-bantuan lainnya seperti bantuan kepada para pekerja yang terkena PHK.

Kedua, pemerintah juga tidak henti-hentinya mengampanyekan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kampanye 3M efektif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kampanye ini untuk mengajak masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19. Pada saat yang sama, petugas medis juga melakukan tracing dan testing sebagai upaya mengidentifikasi penyebaran Covid-19.

Ada Secercah Harapan

Kedatangan vaksin Sinovac membawa harapan baru. Ketersediaan vaksin bisa mendorong euforia masyarakat untuk meningkatkan aktivitas, mengakselerasi konsumsi, kemudian perbaikan dunia usaha dan investasi. Vaksin mampu memberikan harapan dalam proses pemulihan ekonomi, karena masyarakat dapat leluasa melakukan aktivitas ekonomi. Kehadiran vaksin akan meningkatkan keyakinan bahwa pandemi akan berakhir tahun depan sehingga pemulihan ekonomi bisa dimulai. Kehadiran vaksin bisa menjadi stimulus positif dalam mendorong perekonomian agar kembali normal. Sebab, perekonomian terhambat berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Idris Laena juga memuji langkah pemerintah mengupayakan vaksin, baik dari luar maupun buatan dalam negeri. Vaksin ini menjadi salah satu jalan keluar mencegah penyebaran Covid-19, sekaligus memberi kekebalan pada masyarakat. Pada gilirannya masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sebelum terjadi pandemi dan ke-



Sjarifuddin Hasan

Amerika Serikat Donald Trump secara agresif menerapkan politik neo-proteksionisme dalam perdagangan global. Trump juga mengabaikan kesepakatan atau perjanjian multilateral yang sudah dibuat.

“Harga-harga komoditas melandai ikut memperberat situasi. Impor yang semakin besar memperbesar defisit transaksi berjalan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi selalu berada di bawah target,” kata anggota Komisi XI DPR ini kepada *Majelis*.

Pelambatan ekonomi Indonesia, sebut Hendrawan, kini ditambah dengan adanya pandemi Covid-19. Semua sektor kehidupan, termasuk ekonomi, terkena dampak pandemi Covid-19. “Pandemi Covid-19 memukul lebih keras perekonomian Indonesia. Defisit APBN kita langsung membengkak. Pokoknya, kita

dilakukan Komisi XI dengan KSSK (Menkeu, Gubernur BI, Kepala OJK, Kepala LPS) pada 12 November 2020,” ungkapnya.

Pada kuartal IV -2020, Hendrawan sudah merasakan adanya geliat ekonomi di masyarakat. Geliat terlihat di sektor transportasi, ritel, perhotelan, kuliner. “Saya lihat sudah bergerak. Di sejumlah titik, saya melihat antrean sudah mengular,” katanya.

Idris Laena juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, mulai untuk menggerakkan roda perekonomian seperti pemberian stimulus kepada pelaku usaha. Namun, secara garis besar, Idris Laena mengungkapkan, beberapa poin penting dari kebijakan



Hendrawan Supratikno

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

giatan perekonomian pun bisa bergerak. “Insya Allah, jika vaksin sudah diberikan pada Januari 2021 atau selambat-lambatnya April 2021 maka ekonomi akan berjalan dan pertumbuhan ekonomi akan terlihat,” kata Idris Laena yang juga Ketua Badan Penganggaran MPR.

Untuk itu, Idris Laena melihat sudah ada geliat ekonomi di masyarakat di penghujung 2020. Jika vaksinasi massal dilakukan pada Januari 2021, Idris Laena optimistis perekonomian Indonesia akan pulih, karena semua sektor ekonomi sudah bergerak. “Tahun 2021, perkiraan saya pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali normal, yakni sekitar 5%,” katanya.

Agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi kembali, Idris Laena menyarankan pemerintah untuk segera mempercepat pemulihan ekonomi, terutama dengan cara

menarik investasi asing ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja. “Untuk kembali menggerakkan ekonomi nasional maka pemerintah harus melakukan upaya secara simultan, yaitu menarik investasi sebanyak mungkin, sehingga tercipta lapangan kerja. Pada saat yang sama pemerintah juga mendorong UMKM,” ujarnya.

Hendrawan juga berpendapat bahwa penemuan vaksin untuk Covid-19 memberi secercah harapan bagi pemulihan ekonomi. Hendrawan memperkirakan vaksinasi baru bisa dimulai akhir tahun ini atau awal tahun depan. Namun, proses vaksinasi akan memakan waktu cukup lama. “Distribusinya juga harus dijamin bisa merata dan tidak membebani masyarakat. Kejadian ‘ambil untung’ atau mumpungisme yang terjadi pada rapid test dan swab test dengan harga yang

gila-gilaan harus bisa dihindari,” tandas Hendrawan.

Secercah harapan itu menimbulkan optimisme perekonomian Indonesia akan pulih. Hendrawan memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 5%. “Perkiraan kita, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 ada di kisaran minus 1 sampai minus 2%. Pada 2021, perkiraan kita ekonomi Indonesia akan tumbuh sekitar 5%. Mudah-mudahan momentum pemulihan ekonomi dapat kita manfaatkan bersama secara efektif,” harapnya.

Fokus dalam pemulihan ekonomi, Hendrawan menyarankan pemerintah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya kepada rakyat. “UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) diharapkan dapat efektif mendorong kemudahan perizinan secara signifikan dan kenaikan investasi. Kesempatan kerja harus dibuka seluas-luasnya agar kita bisa menekan angka kemiskinan ekstrim. Kita wajib setia kepada konstitusi yang menegaskan kiblat sosial kita dalam bidang ekonomi, seperti pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, yaitu ‘survival of the weakest’ (keberpihakan kepada yang lemah),” terangnya.

Meski ada secercah harapan, Syarif Hasan masih memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2021 masih akan terasa berat. Sebab, seluruh aspek perekonomian kita nyaris hancur akibat pandemi Covid-19. “Untuk menatanya kembali pasti butuh waktu, pikiran, tenaga, dan juga biaya. Saya kira dengan sinergitas antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, kita akan bisa membangkitkan kembali perekonomian Indonesia dengan lebih baik pasca pandemi ini,” ujarnya.

“Pertama, kita harus fokus dulu dalam penanganan Covid-19. Sebab, jika pandemi usai maka rencana selanjutnya akan lebih lancar. Jika pandemi sudah usai maka perhatian untuk ekonomi 2021 akan dimulai dengan mencakup semua, baik perbaikan investasi, menciptakan lapangan kerja sekaligus menggiatkan kembali UMKM,” imbuhnya. □



Idris Laena

DER/EFP/BSC

Ekonomi Global 2021

Proyeksi Tiga Lembaga Keuangan Dunia

Lembaga International Monetary Fund (IMF), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dan World Bank (WB) membeberkan Outlook Pertumbuhan Ekonomi Global 2021. Perekonomian global diperkirakan akan positif pada 2021.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

HINGGA kini, perkembangan kasus positif Covid-19 masih sukar ditebak. Negara-negara besar seperti Spanyol, Inggris, Italia, dan Jerman, yang sebelumnya mampu menekan penyebaran pandemi tersebut, kini harus menghadapi gelombang kedua dengan jumlah kasus harian yang jauh lebih besar. Bahkan, Amerika Serikat sampai detik ini masih mengalami kenaikan jumlah kasus harian Covid-19 yang cukup signifikan.

Secara global, masih terjadi penambahan kasus baru Covid-19. Meski beberapa negara sudah mengumumkan terjadinya penurunan atau pengendalian pandemi ini, namun secara global kasus positif Covid-19 terus memperlihatkan kenaikan. Data pada akhir November 2020, misalnya, jumlah kasus positif Covid-19 secara global sudah melampaui angka 58,7 juta dengan jumlah kematian lebih dari 1,3 juta orang, dan pasien sembuh mencapai 37,5 juta orang. Membaca angka-angka ini tentu bisa disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 masih jauh dari kata berakhir.

Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) telah berdampak luar biasa pada perekonomian global. Bahkan, bisa dibilang dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dunia saat ini lebih parah dibanding keadaan ekonomi dunia pasca Perang Dunia II. Pemerintah di banyak negara melakukan pembatasan sosial, termasuk menutup pusat-pusat perbelanjaan dan menghentikan operasional beberapa moda transportasi. Masyarakat pun mengurangi kegiatan di luar rumah. Akibatnya, konsumsi masyarakat turun tajam.

Akibat pandemi Covid-19 kegiatan bisnis mati suri. Pendapatan masyarakat pun berkurang. Pada gilirannya jumlah pengangguran dan kemiskinan naik. Pandemi juga telah mengganggu investasi. Kegiatan produksi melambat, bahkan terhenti akibat anjloknya permintaan. Tenaga kerja pun dikurangi dan terjadi banyak pemutusan hubungan kerja.

Tak heran, Covid-19 memberi dampak ekonomi yang sangat berat di seluruh dunia. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Co-operation and Development/

OECD) memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi global minus 4,25% pada tahun 2020. Kondisi ini tentu tidak lepas dari pandemi Covid-19 yang menghantam perekonomian tahun ini. Angka yang hampir tak berbeda juga disebutkan International Monetary Fund (IMF). Pada 2020, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global minus 4,4%. Sebaliknya angka proyeksi Bank Dunia (World Bank) jauh lebih besar, yaitu minus 5,2%.

Lalu bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2021? Tampaknya OECD, IMF, dan World Bank memberikan gambaran positif untuk pertumbuhan ekonomi global 2021. Untuk OECD proyeksi ekonomi pada 2021 membaik menjadi 4,2%. Sedangkan IMF memperkirakan ekonomi dunia membaik menjadi 5,3%. Sedangkan World Bank dalam proyeksinya menyebutkan ekonomi membaik menjadi 4,2%.

Kepala Ekonom OECD, Laurence Boone, dalam laporan outlook ekonomi global teranyar, seperti dikutip AFP, Selasa (1/12/2020), mengungkapkan ekonomi global dapat pulih ke kondisi sebelum pandemi pada akhir 2021 nanti. Tahun depan ekonomi global diprediksi tumbuh 4,2% pada 2021. Membaiknya ekonomi dunia salah satunya disebabkan oleh penemuan vaksin Covid-19 yang diperkirakan didistribusikan awal Januari 2021. "Untuk pertama kalinya sejak terjadinya pandemi, sekarang ada harapan untuk masa depan yang cerah," kata Boone.

Kendati demikian, OECD memperkirakan pemulihan ekonomi akan menghadapi banyak tantangan. Pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan tidak merata. Cina kemungkinan menjadi satu-satunya negara yang mampu keluar dari kontraksi ekonomi tahun ini dengan pertumbuhan 1,8%. Tahun depan, ekonomi Cina diramalkan melesat 8%.

Sementara, laju ekonomi Amerika Serikat diprediksi minus 3,7% pada 2020. Namun, tumbuh 3,2% pada 2021. Kemudian, pertumbuhan ekonomi di Eropa diperkirakan minus 5,3% tahun ini, sedangkan tahun depan laju ekonominya hanya 2,3%.

Di kelompok negara berkembang, laju ekonomi Brasil ditaksir minus 6% tahun ini dan hanya tumbuh 2,6% tahun depan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan turun 9,9% tahun ini dan bangkit menjadi 7,9% pada 2021.

Menurut Boone, jika ancaman Covid-19 bisa memudar lebih cepat dan kepercayaan bisnis dan konsumen meningkat maka aktivitas ekonomi global akan naik secara

ekonomi utama yang diperkirakan tumbuh tahun ini dengan PDB bertambah 1,9%. Sedangkan Amerika Serikat akan mengalami penurunan 4,3% tahun ini dan pemulihan ekonomi menjadi 3,1% pada 2021.

IMF mengelompokkan negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah yang diperkirakan mengalami kontraksi 5,7% tahun ini dan bangkit kembali menjadi 3,2% tahun depan. IMF memperingatkan bahwa pemulihan akan menjadi "jalan terjal dan sulit," terutama di negara-negara yang lebih miskin. "Sementara ekonomi global mulai pulih, tetapi pertumbuhannya tidak merata dan masih tidak ada kepastian. Sebaliknya prospek di beberapa negara berkembang tidak terlalu

negara.

Bank Dunia sebelumnya memproyeksikan ekonomi global 2020 tumbuh 2,5%, namun akibat pandemi Covid-19, proyeksi pertumbuhan menjadi minus 5,2%. Penurunan ekonomi tahun ini diperkirakan tak hanya terjadi di negara maju, namun juga sebagian besar terjadi pada negara berkembang.

Indonesia, sebagai negara eksportir komoditas di kawasan Asia Timur dan Pasifik pun mengalami dampak sangat parah di awal 2020, karena lockdown yang diterapkan di banyak negara. Pada akhirnya membuat harga komoditas merosot cukup dalam. "Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan flat



Laurence Boone



Gita Gopinath

tajam pada 2021. Namun, sebaliknya, jika Covid-19 muncul lebih kuat yang mengakibatkan adanya pembatasan yang lebih ketat maka kondisi ini akan memangkas 2 – 3 poin persentase dari pertumbuhan ekonomi global pada 2021.

IMF juga menyebutkan, ekonomi dunia pulih lebih cepat. IMF memprediksi ekonomi global akan pulih 5,3% pada tahun 2021. "Kami memproyeksikan resesi ekonomi sedikit berkurang. Revisi ini disebabkan adanya perubahan PDB kuartal kedua di negara-negara maju. Kondisi ini tidak seburuk yang kami bayangkan," kata Gita Gopinath, penasihat ekonomi IMF dan direktur penelitian.

IMF menyebutkan, prospek yang lebih baik disebabkan oleh ekonomi Cina yang kembali tumbuh lebih kuat. Cina adalah satu-satunya

menggembirakan karena infeksi Covid-19 masih meningkat dengan cepat," kata Gopinath.

Bank Dunia menyebutkan, resesi ekonomi global merupakan yang terdalam sejak Perang Dunia II. Resesi ini merupakan yang pertama sejak 1870 yang dipicu pandemi. Presiden Bank Dunia, David Malpass, mengatakan, pandemi Covid-19 telah menekan konsumsi dan investasi di hampir seluruh negara. Bahkan, pandemi telah menekan sektor keuangan, komoditas, perdagangan global, rantai pasokan, perjalanan, dan pariwisata.

"Pasar keuangan sangat fluktuatif, mencerminkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan prospek yang memburuk," katanya. Tingkat utang yang tinggi juga akan menyebabkan krisis keuangan di banyak

atau datar pada 2020 atau 0%. Sementara Vietnam pertumbuhan ekonominya akan melambat menjadi 2,8%," sebut Bank Dunia.

Tetapi, Bank Dunia juga menyebutkan perekonomian global diprediksi bakal mulai positif pada 2021. Ekonomi negara maju diperkirakan tumbuh 3,9%. Perekonomian Jepang diperkirakan pulih dan tumbuh 2,5%. Amerika Serikat tumbuh 4%, dan Uni Eropa tumbuh 4,5%.

Untuk ekonomi di negara berkembang, Bank Dunia memproyeksi pulih pada 2021, tumbuh 4,6%. Ekonomi Cina diproyeksi tumbuh 6,6%, India 3,1%, dan Brasil tumbuh 2,2%. Adapun Bank Dunia memproyeksikan Indonesia di tahun 2021 akan tumbuh 4,8%, sementara Vietnam tahun depan akan tumbuh 6,8%. □

BSC



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA. Wakil Ketua MPR RI

Ekonomi Indonesia Tahun 2021 Masih Akan Terasa Berat

PANDEMI Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah membawa dampak dalam setiap aspek kehidupan, tak terkecuali ekonomi. Sejak kasus positif pertama di Indonesia diumumkan pada awal Maret 2020, pandemi Covid-19 langsung memukul perekonomian Indonesia. Pasalnya, sektor produksi, distribusi, dan konsumsi terganggu akibat pandemi Covid-19. Akibatnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal II ekonomi Indonesia minus 5,32%.

Pandemi Covid-19 di Indonesia belum memperlihatkan puncaknya. Kasus positif Covid-19 terus bertambah. Sekali lagi, ekonomi Indonesia pada kuartal III masih terkena dampak pandemi Covid-19. BPS mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III – 2020 minus 3,49%. Secara teori jika kuartal II dan kuartal III mengalami minus maka ekonomi Indonesia mengalami resesi.

Kini di penghujung 2020, ekonomi Indonesia sedikit menggeliat. Bagaimana ekonomi Indonesia pada 2021? Bagaimana jika vaksin Covid-19 sudah diproduksi dan dilakukan vaksinasi massal? Apakah

ekonomi Indonesia kembali positif? Untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MBA. Berikut perbincangan dengan Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat ini.

Indonesia telah memasuki resesi setelah dua kuartal ekonomi Indonesia minus (kuartal II ekonomi Indonesia minus 5,3% dan kuartal III – 2020 ekonomi Indonesia juga minus 3,9%). Bagaimana tanggapan Bapak?

Ya, tentu kita prihatin ekonomi Indonesia mengalami resesi. Sampai detik ini, kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak hebat di semua sektor kehidupan, baik kesehatan maupun perekonomian. Kelompok masyarakat yang paling terkena dampak pandemi Covid-19 ini adalah masyarakat lapisan bawah. Banyak di antara mereka terkena PHK atau usahanya gulung tikar. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Sebab, dampak jangka panjangnya tentu akan lebih besar lagi jika pandemi

Covid-19 ini masih terus ada.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya. Bahkan pemerintah telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Bagaimana Bapak melihat upaya pemerintah ini?

Saya melihat pemerintah memang terus berupaya keras. Salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tapi, memang pemerintah harus berupaya lebih keras lagi untuk menghentikan penyebaran Covid-19 dan memulihkan ekonomi. Sebab, sampai saat ini upaya itu belum sesuai harapan. Kasus positif Covid-19 terus bertambah. Seharusnya ketika pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi undang-undang, sudah banyak kemajuan dan hasil positifnya. Tapi, sampai saat ini belum tampak kemajuan.

Saya melihat masih ada masalah dalam penyaluran anggaran di kuartal ketiga yang belum maksimal. Saya mendengar laporan bahwa masalah penyaluran anggaran ini membuat presiden kecewa. Menurut saya,

jika memang ada masalah seperti itu maka bisa dipastikan upaya mendongkrak ekonomi itu belum berhasil.

Banyak kalangan yang mengatakan, pemulihan ekonomi berbanding lurus dengan penanganan Covid-19. Jika Covid-19 bisa dikendalikan maka roda ekonomi dengan sendirinya akan berjalan. Maka penemuan dan pemberian vaksin Covid-19 menjadi jalan keluarnya. Apa tanggapan Bapak?

Ya, memang. Kuncinya ada pada pandemi Covid-19. Jika pandemi hilang maka lambat laun ekonomi akan berjalan. Sebab, masyarakat akan kembali melakukan berbagai kegiatan secara normal. Daya beli masyarakat berangsur kembali naik sehingga roda ekonomi kembali

rakat terus-menerus mendapat kabar yang tidak benar maka kepercayaan kepada pemerintah dalam penanganan pandemi ini akan hilang.

Perkiraan vaksin akan mulai diberikan paling cepat pada Desember 2020 atau paling lambat April 2021. Apakah dengan demikian ekonomi Indonesia bisa pulih. Bagaimana Bapak melihat prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2021?

Untuk saat ini pemerintah harus mengutamakan percepatan penyediaan vaksin karena vaksin ini menjadi penting dalam upaya menghentikan penyebaran Covid-19. Saya dengar vaksin untuk Covid-19 ini sudah tersedia pada bulan Desember 2020. Namun, ada juga pernyataan bahwa vaksin baru

Apakah sekarang ini sudah terlihat geliat ekonomi di masyarakat?

Sejak kebijakan PSBB dilonggarkan memang sudah terlihat masyarakat sedikit aktif walaupun dengan pembatasan-pembatasan. Saya kagum dengan masyarakat yang bisa survive dengan caranya sendiri dari keadaan sulit ini. Banyak sekali usaha-usaha baru yang muncul, seperti kuliner, dan itu cukup berhasil. Pemerintah harus jeli melihat perkembangan ini. Pemerintah mesti mendukung mereka. Salah satunya dengan pemberian kredit lunak dengan bunga 0% atau melalui partnership dan pelatihan-pelatihan.

Apa yang harus menjadi perhatian atau fokus untuk ekonomi Indonesia tahun 2021? (Apakah investasi, pen-



berputar. Tapi, itu terjadi bila pandemi cepat selesai.

Bagaimana kalau belum selesai bahkan kita tidak tahu kapan pandemi akan hilang? Karena itu saya berharap dan menekankan kepada pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi. Satu-satunya solusi untuk menghentikan penyebaran Covid-19 adalah dengan vaksin. Pengadaan vaksin harus dilakukan secepatnya. Tapi, jangan lupa juga sikap masyarakat terhadap vaksin ini terbelah. Ada anggota masyarakat yang ragu bahkan tidak percaya dengan vaksin. Ini menjadi masalah juga karena jika vaksin sudah tersedia tapi masyarakat menolak bagaimana?

Maka, selain upaya pengadaan vaksin, pemerintah juga harus melakukan pendekatan kepada masyarakat. Jika dibiarkan maka masyarakat mendapatkan info dari luar yang kebanyakan tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoax. Jika masya-

tersedia pada Januari 2021. Saya rasa rakyat ingin vaksin itu segera tersedia dan dilakukan vaksinasi massal agar mereka bisa menjalani kehidupan seperti sedia kala. Saya pribadi berharap sama, apalagi vaksin yang diproduksi adalah buatan bangsa sendiri. Sementara menunggu vaksin tersedia, saya merasakan rakyat Indonesia cukup bersabar dan tetap optimistis sampai kuartal keempat ini selesai semuanya akan kembali normal.

Untuk ekonomi ke depan, 2021, akan terasa berat buat kita. Sebab, seluruh aspek perekonomian kita nyaris hancur akibat pandemi Covid-19. Untuk menatanya kembali pasti butuh waktu, pikiran, tenaga, dan juga biaya. Saya kira dengan sinergitas antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat kita akan bisa membangkitkan kembali perekonomian Indonesia dengan lebih baik pasca pandemi ini.

ciptaan lapangan kerja, menggerakkan UMKM)?

Yang pertama, kita harus fokus dulu dalam penanganan Covid-19. Sebab, jika pandemi usai maka rencana selanjutnya akan lebih lancar. Jika pandemi sudah usai maka perhatian untuk ekonomi 2021 akan dimulai dengan mencakup semua, baik perbaikan investasi, menciptakan lapangan kerja sekaligus menggiatkan kembali UMKM.

Sekarang pemerintah masih punya waktu untuk memperbaiki yang kurang. Sebab, semua tergantung kinerja pemerintah. Kalau kinerjanya biasa-biasa saja maka sangat sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah. Tapi, kalau pemerintah benar-benar all out, kerja keras tanpa kenal lelah, mudah-mudahan setelah kuartal keempat, penyebaran Covid-19 bisa menurun drastis sehingga akan memuluskan pemulihan ekonomi di awal 2021. □

Press Gathering Bandung

Ahmad Muzani

**Tugas MPR Membangun Suasana
Kenegaraan Lebih Kondusif**



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PIMPINAN MPR bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen kembali menyelenggarakan press gathering. Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, press gathering kedua tahun ini berlangsung di Bandung, 6 – 8 November 2020. Sekitar 90 wartawan parlemen dari media cetak, online, dan elektronik mengikuti press gathering ini.

Press Gathering ini dihadiri oleh pimpinan MPR, pimpinan badan, pimpinan fraksi dan kelompok DPD. Mereka adalah Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid (virtual) dan Lestari Moerdijat (virtual) dari unsur pimpinan MPR. Sedangkan Idris Laena (Golkar), Anton Sukartono (Demokrat), Taufik Basari (Nasdem), H.M. Ali Taher Parasong (PAN), H. Johan Rosihan (PKS), dan Hj. Illiza Sa'auddin Djamal (PPP), hadir sebagai pimpinan badan, fraksi, dan kelompok DPD. Selain itu, hadir sebagai undangan pimpinan Sekretariat Jenderal DPD, dalam hal ini Deputi Administrasi DPD RI, Adam Bachtiar.

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyambut baik diselenggarakannya kegiatan Press Gathering ini. Muzani juga menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Biro Humas MPR, Siti Fauziah, yang telah menyelenggarakan acara press gathering ini bersama koordinotoriat wartawan Parlemen. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Ketua Koordinator Wartawan Parlemen yang baru terpilih, Marlen Sitompul, serta ketua koordinotoriat terdahulu,



Rhomdoni Setiawan.

Press gathering, menurut Muzani, adalah forum bagi pimpinan MPR dengan para wartawan buat ngobrol apa saja. Tetapi intinya, menurut Muzani, sudah pasti adalah untuk kebaikan. “Apalagi tugas MPR adalah membangun suasana kenegaraan yang lebih kondusif,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Menyinggung soal tema diskusi, ‘Visi Misi NKRI Bagi Calon Kepala Daerah,’ Ahmad Muzani menyatakan, tema ini agak terlambat sebenarnya, karena semua calon sekarang pada persiapan akhir



menuju kemenangan. Hari efektifnya tinggal 20 atau 25 hari lagi sebelum tanggal 9 Desember. "Tapi, sebagai pengingat kepada calon gubernur, calon bupati, calon walikota, maka tema ini menjadi penting bahwa sehebat apapun misinya maka sebagai calon gubernur, bupati, walikota harus dalam

koridor NKRI," tukas Muzani.

Muzani tak menolak upaya menonjolkan kabupatennya, walikota atau gubernurnya, tetapi upaya itu harus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. "Jadi tidak boleh berpikir lebih daripada itu," ujar Muzani.

"Atau upaya membuat ciri kedaerahan diperbolehkan, tetapi ciri itu tidak boleh melebihi dari bingkai NKRI. Tapi, di antara para calon yang ada di 270 titik Pilkada sekarang ini seringkali kebablasan, maka sebagai sebuah forum perlu mengingatkan kembali tentang posisinya," imbuhnya.

Muzani mengakui, persoalan Pilkada ini menjadi pelik dengan adanya pandemi. Pemerintah sedang mengupayakan apa yang namanya vaksin. Ketika satu bulan lalu pimpinan MPR berkunjung ke Biofarma, di sana ada 20 juta vaksin yang akan diproduksi oleh Biofarma bekerjasama dengan Sinovac dari Cina. Lalu ada 10.000 vaksin dalam bentuk jadi didatangkan dari Uni Emirat Arab.

Mengenai vaksin ini, lanjut Muzani, semua sepakat, prioritas yang akan mendapatkan vaksin adalah tenaga medis, dokter, perawat, dan seterusnya. "Selain mereka yang berada di garda terdepan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19, juga polisi dan tentara," kata Muzani.



Tapi, dia ingin mengusulkan agar para guru, para dosen, dan kalau memungkinkan para wartawan juga ikut mendapatkan vaksin ini. "Karena para wartawan berada di garda terdepan dalam mengejar sumber berita, tanpa kenal waktu. Itu pekerjaan penuh risiko maka harus ada jaminan keselamatan," kata Muzani, disambut tepuk tangan para peserta press gathering.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas, Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM., selaku panitia penyelenggara Press Gathering, melaporkan bahwa press gathering kali ini bukanlah yang pertama, melainkan yang kedua kalinya di tahun 2020, setelah sebelumnya kegiatan yang sama diselenggarakan di Anyer, Banten. "Walaupun masih dalam suasana pandemi, kegiatan press gathering ini tetap

kita selenggarakan, karena ini merupakan ajang silaturahmi antara pimpinan MPR dan wartawan," ujar Bu Titi, sapaan akrab Siti Fauziah.

Seperti biasa, menurut Siti Fauziah, press gathering kali ini juga diisi kegiatan diskusi, membahas isu-isu menarik. Dan, karena sedang menghadapi Pilkada serentak pada 9 Desember maka tema yang dipilih adalah 'Visi Misi NKRI Bagi Calon Kepala Daerah.' "Ini merupakan gagasan baru menarik untuk didiskusikan. Karena bagaimana pun juga kita berharap setiap calon kepala daerah memiliki visi misi yang mengacu pada Empat Pilar," ujar Siti Fauziah.

Dalam kesempatan itu, Siti Fauziah juga menginformasikan bahwa Rabu, 11 November 2020, MPR menyelenggarakan Kon-

ferensi Etika Kehidupan Berbangsa. "Ini adalah gagasan mulia tentang kebutuhan adanya Peradilan Etika di Indonesia," ungkap Siti Fauziah. Dia berharap, rekan-rekan wartawan peserta press gathering ini bisa meliput kegiatan tersebut.

Press gathering yang berlangsung di Ballroom Crowne Plaza Bandung ini dibuka secara resmi, ditandai dengan pemukulan gong, oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, didampingi oleh anggota MPR yang hadir. Setelah dibuka, dilanjutkan diskusi bertema: "Visi Misi NKRI Bagi Calon Kepala Daerah." Sebagai narasumber: Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid (Virtual), H.M. Ali Taher Parasong, dan Johan Rosihan. □

SCH

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid

Pilkada di Tengah Pandemi, Gus Jazil Ajak Semua Calon Jaga Situasi Kondusif



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PELAKSANAAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang di 270 kabupaten/kota dan provinsi berlangsung dalam situasi yang tidak normal, seiring terjadinya pandemi Covid-19 dan krisis multidimensi yang sekarang melanda Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, dalam kondisi anomali seperti

sekarang, pihaknya mengajak semua calon kepala daerah, partai politik, dan juga aparat untuk selalu waspada. "Kontestasi pilkada ini bukan hanya menang-menangan, tapi pencalonan ini untuk mendarmabaktikan, untuk iling (ingat) dan waspada kepada sesama," ujarnya saat Press Gathering Pimpinan MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan tema 'Visi Misi NKRI

bagi Calon Kepala Daerah' di Kota Bandung, Sabtu (7/11/2020).

Dikatakan Gus Jazil-sapaan akrab Jazilul Fawaid- biasanya dalam kontestasi pilkada, kerap kali ada banyak masalah, baik sebelum digelar, saat berlangsung maupun ketika selesai pemungutan suara. Karena itu, pihaknya berharap Pilkada Serentak 2020 berlangsung lancar.

“Saya khawatir atas dasar pesta demokrasi yang setengah-setengah karena pandemi, kemudian terjadi keributan setelah itu, tidak menutup kemungkinan. Makanya saya mengajak seluruh aparaturnya kita semua untuk selalu waspada, untuk selalu menjaga keadaan yang kondusif, dan kita bisa membangun karena memang Indonesia saat ini dalam keadaan krisis,” tuturnya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan, pilkada adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat yang diatur dalam

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sekaligus pengejawantahan Sila ke-4 Pancasila yaitu ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’.

Terkait maraknya berita bohong (hoaks) yang kerap mewarnai pelaksanaan pilkada, Gus Jazil mengatakan bahwa jawaban dari persoalan itu adalah pendidikan politik bagi masyarakat. “Untuk melawan cara-cara yang tidak berbudaya dalam pertarungan, jawabnya adalah

pendidikan politik. Tanggungjawab itu tidak bisa hanya dibebankan kepada parpol, kami mengajak mengedepankan pendidikan politik,” tuturnya.

Pendekatan represif melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam menangani hoaks, menurut Gus Jazil memang agak keras dan cenderung mengancam kebebasan masyarakat. Karena itu, dirinya lebih mengedepankan pendidikan politik sehingga masyarakat lebih dewasa dalam mengikuti kontestasi politik. □

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

Agenda Pilkada Adalah dalam Rangka Memperkuat NKRI

WAKIL Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 adalah Pilkada yang melahirkan kedaulatan rakyat. Untuk melahirkan kedaulatan rakyat, kita tidak

reformasi,” tegas Hidayat Nur Wahid, yang biasa disapa HNW, selaku narasumber acara diskusi dalam rangka Press Gathering Pimpinan MPR bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Ballroom Crowne Plaza, Bandung, Sabtu sore

atau dijalankan oleh kepala daerah tidak keluar dari Empat Pilar MPR. “Kalau Empat Pilar sudah dijalankan berarti tidak keluar dari NKRI,” kata HNW dalam diskusi yang bertema: ‘Visi Misi NKRI Bagi Calon Kepala Daerah’ tersebut.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

boleh berubah dari kesepakatan bahwa seluruh agenda Pilkada adalah dalam rangka memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pilkada bukan untuk membelah NKRI, memperkuat liberalisme, memperkuat kedaerahan, atau menjalankan ketentuan yang bertentangan dengan prinsip dasar bahwa Pilkada itu rezim Pemilu, Pemilu rezim

(7/11/2020). Dalam diskusi itu HNW hadir secara virtual.

Lebih lanjut HNW menerangkan, untuk melaksanakan Pilkada yang tidak bertentangan prinsip dasar itu, Pimpinan MPR mengusulkan kepada KPU agar membuat ketentuan yang mencantumkan NKRI di dalam visi dan misi calon kepala daerah. Tujuannya agar apa yang dilaksanakan

Hanya saja Pilkada Serentak 2020 tinggal menghitung hari, atau hari efektif menuju pelaksanaan Pilkada 9 Desember kurang dari satu bulan. Mungkin visi misi NKRI belum tercermin dalam visi misi calon kepala daerah untuk sekarang ini. Maka, Hidayat Nur Wahid berharap, pada Pemilu yang akan datang masalah ini betul-betul diakomodasi, sehingga menjadi rujukan dalam menyusun visi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

misi calon kepala daerah. Dengan demikian, tidak ada kepala daerah yang mengampunahkan trisila atau ekasila, karena yang kita sepakati adalah Pancasila.

Dr. H.M. Ali Taher Parasong yang juga narasumber dalam diskusi itu berpendapat, visi besar Pilkada tidak boleh bergeser dari alinea kedua dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Visi besar Indonesia itu ada di alinea kedua. Bunyinya: "Dan, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur."

"Jangan lupa itu visi Indonesia," ujar anggota MPR dari Fraksi PAN ini. Jadi, Pilkada di Papua, di Aceh atau di mana pun dari Miangas sampai Rote itu hanya soal konfigurasi politik kedaerahan. "Tetapi visi besar NKRI-nya sesuai visi konstitusi," katanya.

Sedangkan misinya ada pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,

bunyinya: 'Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.'

Jadi, menurut Ali Taher, tujuan visi misi ini adalah untuk membangunkan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama, happiness for all.

Kebahagiaan untuk semua, tidak boleh orang per orang, tidak boleh kelompok per kelompok, tapi kebersamaan. "Di situlah sebenarnya tugas pemimpin. Siapapun yang terpilih bertugas untuk menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan," ujarnya.

Sementara H. Johan Rosihan, anggota MPR fraksi PKS, menyatakan bahwa Pilkada adalah penerjemahan dari sila keempat dari Pancasila, yaitu: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, menurut Johan, rakyat dalam memilih pemimpin harus dengan cara-cara yang hikmat dan bijak. Oleh karenanya, Johan mengaku, setiap kali melaksanakan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR atau dengar pendapat dengan masyarakat selalu mengimbau, dalam pelaksanaan Pilkada agar menghadirkan nilai-nilai Pancasila. "Karena di dalam Pilkada ada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat," katanya.

Tapi, sebagai satu kesatuan nilai maka sila keempat dari Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan sila-sila lainnya. Karenanya, dalam pelaksanaan Pilkada yang hikmat dan bijaksana, harus tetap melahirkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, yang ujungnya nanti melahirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Karenanya, saya selalu sampaikan kepada teman-teman, calon kepala daerah, mari lahirkan atau hadirkan Pancasila dalam Pilkada," ujar Johan.

Ini penting, kata Johan, karena dengan memasukan nilai ketuhanan dalam Pilkada maka tidak ada lagi orang yang menghalalkan segala cara, karena merasa ada Tuhan yang memantau. Ketika memasukkan nilai kemanusiaan maka tidak ada lagi calon yang menistakan kemanusiaan seseorang dengan uang Rp 100 ribu. Begitu pula dengan memasukkan nilai persatuan maka tidak ada lagi calo, apalagi tim sukses, yang saling bully, saling olok, atau saling menjatuhkan (*black campaign*) hanya untuk meraih kemenangan.

"Ketika pelaksanaan Pilkada melahirkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dengan cara hikmat dan bijak, kita berharap pemimpin yang lahir itu bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya. □

SCH

Kunjungan Dubes Maroko

Bersama Bamsoet Bahas Upaya Perdamaian Dunia

Ketua MPR Bambang Soesatyo dan tamunya, Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Ouadia Benabdellah, membahas peningkatan kerjasama kedua negara yang sudah terjalin selama 60 tahun. Juga disinggung kondisi terkini terkait hubungannya dengan Kelompok Polisario.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, H.E. Mr. Ouadia Benabdellah. Bamsoet dan tamunya ini membahas peningkatan kerjasama kedua negara yang sudah terjalin selama 60 tahun. Tak hanya dalam hubungan bilateral, Indonesia dan Maroko juga telah bekerjasama di

berbagai organisasi, seperti Gerakan Non-Blok, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Kerjasama Islam. Indonesia dan Maroko juga selalu memberikan dukungan agar perdamaian dan kedaulatan di masing-masing negara tetap terjaga.

Dalam kesempatan itu Ouadia Benabdellah juga menyampaikan kondisi terkini di Maroko.

Khususnya, terkait hubungan mereka dengan Kelompok Polisario di wilayah penyangga dan penyeberangan El Guergarat yang sedang tegang. Menyikapinya, Maroko telah melakukan operasi non ofensif tanpa melanggar perjanjian penghentian penggunaan senjata di bawah kontrol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Sebagai sahabat, Indonesia berharap, ketegangan tersebut tak terus berlanjut, sehingga kawasan Sahara Barat tetap damai,” ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Maroko untuk Indonesia itu di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/20).

Ketua DPR RI ke-20 ini meyakini, Maroko akan tetap berkomitmen menjadi partner anggota PBB yang menjamin keamanan, pembangunan, dan perdamaian bagi seluruh rakyatnya. Sehingga di kawasan Sahara Barat tidak terjadi kekacauan dan kekerasan, dengan demikian pergerakan orang dan barang tak terganggu.

“Sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, posisi Indonesia tetap netral. Kita terus mendorong semua pihak yang terlibat di Sahara Barat tetap mendukung proses damai yang diprakarsai PBB melalui MINURSO,” papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menekankan, salah satu tujuan Indonesia merdeka, sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saat ini Indonesia juga masih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

“Atas dasar itulah, Indonesia selalu mengajak negara-negara sahabat untuk tidak mengedepankan pendekatan militer ataupun kekerasan. Tetapi, mengedepankan pendekatan dialog dan penyelesaian konflik secara damai,” pungkas Bamsoet. □



Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa

Bamsoet Dorong Pemerintah dan DPR RI Selesaikan RUU Etika Penyelenggara Negara



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah bersama DPR RI kembali membahas dan menyelesaikan RUU Etika Penyelenggara Negara, yang sebelumnya pernah masuk dalam Prolegnas 2014-2019 namun karena keterbatasan waktu, tak sempat diselesaikan. Penyelesaian RUU tersebut merupakan amanah sekaligus turunan dari Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

“Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/

MPR/2001 tersebut, etika politik dan pemerintahan yang akan menjadi tema bahasan dalam konferensi ini mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, dan rendah hati. Serta siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat,” ujar Bamsoet usai membuka Konferensi

Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa, di MPR RI, Rabu (11/11/20).

Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Turut hadir antara lain Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Ketua DKPP Prof. Muhammad, anggota DPD RI Prof. Jimly Asshiddiqie, dan anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan Andi Mattalatta.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan,





melalui Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa, diharapkan dapat memberikan rumusan dalam upaya penegakan etika kehidupan berbangsa. Khususnya mengenai etika politik dan pemerintahan, serta etika penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satunya dengan menyiapkan naskah akademik RUU Etika Penyelenggara Negara.

“Etika merupakan pondasi bagi kelangsungan hidup bangsa. Runtuhnya etika berbangsa, akan mengakibatkan runtuhnya bangsa tersebut. Dalam hubungan inilah, MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001, yang meletakkan basis etika dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, demi terwujudnya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945),” jelas Bamssoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, sejarah terbitnya Ketetapan MPR RI tersebut berawal dari keprihatinan krisis multidimensional, yang memunculkan ancaman serius terhadap persatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal itu tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi pekerti luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam pergaulan



hidup sehari-hari, serta pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Sesuai Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang,” terang Bamssoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, keberlakuan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 dipertegas melalui

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada intinya menempatkan Ketetapan MPR RI di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945, dan di atas undang-undang.

“Sayangnya tak banyak yang menyadari keberadaan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 ini. Padahal, Ketetapan MPR tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh penyelenggara negara dan juga masyarakat. Tak mengherankan jika banyak pejabat publik melakukan pengingkaran terhadap etika kehidupan berbangsa,” pungkas Bamssoet. □

Milad ke-108 Muhammadiyah

Bamsoet: Indonesia dan Muhammadiyah Satu Kesatuan Tak Terpisahkan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah dakwah Muhammadiyah yang selalu mengedepankan tanwir (mencerahkan) dan tabsyir (menggembirakan). “Muhammadiyah tak pernah menggunakan cara kekerasan, apalagi menjadikan agama sebagai sumber konflik dan perpecahan,” katanya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menilai, perjalanan 108 tahun Persyarikatan Muhammadiyah menunjukkan bahwa pengabdianya terhadap bangsa Indonesia sudah dilakukan jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Kontribusi Muhammadiyah terhadap kemerdekaan Indonesia pun tak perlu diragukan. Paling besar terlihat dari peran Ketua Umum ke-5 PP Muhammadiyah, Ki Bagoes Hadikoesoemo, sebagai perwakilan kalangan agama di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang tak memaksakan Piagam Jakarta, dan menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

“Indonesia dengan Muhammadiyah adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, layaknya orang tua dan anak. Sejak awal perjuangan dan mengisi kemerdekaan, Muhammadiyah menyadari bahwa kemajemukan bangsa adalah fitrah sekaligus rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Nilai inilah yang harus terus disuburkan, mengingat Indonesia didirikan bukan atas satu agama tertentu, melainkan atas sumbangsih berbagai kalangan umat beragama,” ujar Bamsoet saat menghadiri Milad ke-108 Persyarikatan

Muhammadiyah, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (18/11/20).

Turut hadir baik secara fisik maupun virtual, antara lain Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, dan Zulkifli Hasan.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengapresiasi kiprah dakwah Muhammadiyah yang selalu mengedepankan tanwir (mencerahkan) dan tabsyir (menggembirakan). Tak pernah menggunakan cara kekerasan, apalagi menjadikan agama sebagai sumber konflik dan perpecahan.

“Tak mengherankan jika dalam membangun Indonesia melalui dakwah, Muhammadiyah menempuh tiga jalur utama yang dikenal dengan Amal Usaha Muhammadiyah. *Pertama*, pendidikan dengan mendirikan sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. *Kedua*, mendirikan balai pengobatan mulai dari klinik hingga rumah sakit. Dan, *ketiga*, mendirikan panti, baik untuk anak-anak hingga orang tua/jompo,” tandas Bamsoet.

Bamsoet yang merupakan warga kehormatan Muhammadiyah ini memaparkan, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah pernah merilis aset yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah. Amal usaha pendidikan tercatat 3.370 TK, 2.901 SD/MI, 1.761 SMP/MTs, 941 SMA/MA/SMK, 67 pondok pesantren, dan 167 perguruan tinggi.

“Amal usaha kesehatan tercatat sebanyak 47 rumah sakit, 217 poliklinik, dan 82 klinik bersalin. Sedangkan amal usaha pelayanan sosial memiliki lebih 318 panti asuhan, 54 panti jompo, dan 82 rehabilitasi cacat. Berbagai amal usaha tersebut jumlahnya pasti akan terus bertambah. Jika ditaksir, seluruh aset yang dimiliki Muhammadiyah bisa mencapai Rp 320 triliun. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan Muhammadiyah,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, sebagaimana juga sering disampaikan Presiden Joko Widodo, saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada maraknya penyalahgunaan ajaran agama. Di mana individu hingga kelompok memakai agama untuk menyebarkan kebencian dan memecah belah bangsa. Tak jarang, penyalahgunaan agama ini masuk ke berbagai instansi pemerintahan.

“Sebagai contoh, BUMN Watch pada 2019 mengindikasikan terdapat 15 sampai 20% pegawai BUMN terpapar radikalisme. Bahkan para tokoh radikal diberikan kesempatan menyampaikan orasi di masjid-masjid BUMN. Pemerintah tak boleh abai terhadap hal ini. Pemerintah perlu bekerjasama dengan Muhammadiyah agar pengisi ceramah di masjid BUMN maupun di berbagai masjid instansi pemerintahan, diisi oleh kader Muhammadiyah yang sudah terbukti jiwa nasionalisme dan patriotismenya,” pungkas Bamsoet. □

Lomba Academic Constitutional Drafting 2020

Universitas Indonesia Terpilih Menjadi Juara Pertama

Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, Lomba Academic Constitutional Drafting yang memang sudah menjadi agenda tahunan MPR tetap berlangsung. Bedanya untuk 2020 ini penyelenggaraannya dilakukan secara daring (zoom meeting).



Djarot Syaiful Hidayat

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

LOMBA Academic Constitutional Drafting adalah agenda tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Biasanya diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Konstitusi, 18 Agustus. Tapi untuk tahun 2020 ini terjadi hal berbeda, karena pelaksanaan lomba Academic Constitutional Drafting berlangsung di tengah masa pandemi Covid-19. Sehingga pelaksanaannya dilakukan dengan beberapa penyesuaian, terutama menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

Lomba Academic Constitutional Drafting bertujuan untuk mendapatkan masukan dari generasi muda, khususnya mahasiswa, terhadap konsep ketatanegaraan. Nah, untuk 2020, tema yang dipilih adalah: "Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Lomba diselenggarakan pada 7-9 November 2020 di Tangerang, Banten, melalui daring (zoom meeting).

Berdasar hasil seleksi terpilih 10 tim perwakilan perguruan tinggi yang berhak maju ke final. Kesepuluh perguruan tinggi itu adalah: Universitas Brawijaya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas

Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jember, Universitas Indonesia, Universitas Mulawarman, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Khusus untuk Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada berhasil menempatkan masing-masing dua wakilnya di putaran final.

Dalam lomba tersebut, semua tim mempresentasikan naskah akademiknya dan menjawab pertanyaan dari lima dewan juri, yaitu: Profesor Hendrawan Supratikno (Anggota Badan Pengkajian MPR), Dr. Andi Yuliani Paris (Anggota Badan Pengkajian MPR), Dr. Jimmy Z. Usfunan (Akademisi Universitas Udayana), Dr. Hesti Armiwulan (Akademisi Universitas Surabaya), dan Dr. Radian Salman (Akademisi Universitas Airlangga).

Berbagai usulan disampaikan peserta terkait dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945, antara lain mengenai penguatan Dewan Perwakilan Daerah, kembalinya Garis-Garis Besar Haluan Negara, penataan kekuasaan kehakiman, penguatan sistem presidensial, dan isu-isu aktual yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Setelah melalui proses penjurian selama tiga hari, dewan juri akhirnya memutuskan

dan menetapkan Universitas Indonesia (Tim B) sebagai Juara 1 dengan total nilai 175,47, disusul Universitas Brawijaya total nilai 175,11 sebagai Juara 2, dan Universitas Gadjah Mada (Tim A) total nilai 171,99 sebagai juara 3. Sedangkan naskah akademik terbaik diraihkan oleh tim dari Universitas Brawijaya.

Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Djarot Syaiful Hidayat, dalam sambutannya menyatakan, semua peserta mampu memberikan paparan naskah akademiknya dengan baik. Mereka juga memiliki kemampuan intelektual yang tidak perlu diragukan. Karena itu, Djarot sangat mengapresiasi dan sekaligus bangga kepada peserta lomba sebagai calon-calon negarawan berikutnya.

"Pemikiran kalian adalah benar-benar pemikiran yang murni dan baik, semata-mata untuk membangun Indonesia ke depan yang jauh lebih baik, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945," kata Djarot. Di akhir sambutannya, Djarot berharap, pandemi Covid-19 cepat berlalu, agar kegiatan tahun depan dapat berlangsung dengan tatap muka sehingga jalinan persahabatan, emosional dapat lebih erat terjalin. □

Seminar Nasional di Kota Bogor

Dengan Pemahaman Empat Pilar Munculkan Generasi Muda Unggul

Nilai-nilai luhur bangsa plus ilmu pengetahuan dan teknologi bila dikuasai generasi milenial Indonesia maka masa depan Indonesia akan lebih cerah.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Dr. H. Syarifuddin Hasan, MM., MBA., mengungkapkan bahwa sekitar tiga perempat penduduk Indonesia masuk dalam usia produktif, termasuk di dalamnya generasi muda, sehingga bonus demografi tercipta. Anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa ini harus disyukuri dalam berbagai bentuk. Salah satunya dengan merawat dan membentuk para pemuda itu sehingga mampu mengeluarkan potensi-potensi luar biasanya.

“Untuk itu generasi muda mesti diberikan kemudahan akses untuk memperoleh pendidikan yang bagus supaya kualitas intelektualitasnya meningkat,” kata Syarif Hasan dalam acara Seminar Nasional Kebangsaan MPR RI bertema ‘Implementasi Pancasila dan Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk Mewujudkan Generasi Indonesia Unggul Di Era 4.0’ di di Ballroom Bale Pakuan Hotel Padjadjaran Suite Resort & Convention, Kota

Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10/2020).

Hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan LSM Institute Development Economic and Social (INDEKS) itu antara lain, Perwakilan INDEKS Muhammad Fathur Rifqi, Pengawas SMA Kota Bogor Ujang Lukman, Tokoh Masyarakat/mantan Ketua DPRD Kota Bogor Mufti Taufik, Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Nursamsi, serta para pelajar dan mahasiswa beberapa perguruan tinggi se Kota Bogor sebagai peserta.

Menurut pimpinan MPR dari Partai Demokrat yang biasa disapa Syarif Hasan ini, energi dan semangat anak muda yang begitu besar jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan malapetaka. “Untuk itu, selain diberikan akses ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka juga wajib diberikan pemahaman yang baik seputar nilai-nilai luhur bangsanya, yaitu: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

Generasi muda, lanjut Syarif, juga harus menyadari bahwa dirinya adalah harapan bangsa. Maka itu, jangan menghabiskan masa mudanya dengan melakukan hal-hal yang akan merusak diri sendiri, seperti menggunakan narkoba, melakukan tindakan kriminal dan lainnya. “Pemuda mesti memanfaatkan keleluasaan akses ilmu pengetahuan dan juga nilai luhur bangsa dengan belajar, menempa diri, secara lebih keras dan serius,” tegasnya.

Jika itu terjadi, kata Syarif, maka munculnya generasi muda unggul di era 4.0 yang kualitasnya sama dengan para tokoh muda yang menyuarakan ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dan, seluruh rakyat Indonesia menjadi lebih percaya diri menatap gemilangnya Indonesia di masa datang.

Untuk itu, Syarif Hasan mengajak seluruh



pemuda Indonesia untuk segera berlari cepat, berkiprah dan berkontribusi demi bangsa. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat juga harus bangkit melakukan berbagai upaya menjaga, serta memerhatikan mereka.

“Para Pimpinan dan anggota MPR sendiri juga melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas generasi muda bangsa melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR. Saya pribadi menjadikan generasi muda prioritas utama dalam program mulia MPR tersebut,” ucapnya.

Masyarakat Tak Perlu Takut Divaksin

Usai acara seminar nasional, Syarif Hasan menyinggung soal pandemi Covid-19 dan santernya isu mengenai keberadaan vaksin yang menjadi harapan masyarakat.

Pandemi, katanya, semakin menyengsarakan rakyat, terutama mengancam kesehatan.

Berpegang kepada amanah UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan pemerintah mesti melakukan upaya-upaya luar biasa untuk menjamin itu. Salah satu bentuknya adalah pengadaan vaksin virus corona.

“Kabar yang saya terima di awal 2021 vaksin sudah ada dan akan langsung didistribusikan. Tapi, ada juga informasi yang menyebutkan di akhir 2020 vaksin tahap pertama sudah siap. Saya kira secepatnya lebih bagus. Untuk masyarakat, jika vaksin sudah tersedia, saya himbau jangan takut lakukan vaksinasi. Sebab ini demi keselamatan kita semua,” katanya.

Syarief Hasan mengatakan, vaksin sangat

diperlukan sebagai upaya pertahanan diri dari serangan virus yang tidak jelas kapan berakhirnya. “Yang saya khawatirkan jika tak ada vaksin maka akan memperburuk situasi. Hari demi hari kita semakin waswas. Sementara korban terus berjatuhan. Ketika itu dibiarkan terjadi, penanganannya akan jauh lebih sulit nanti,” ujarnya.

Dengan pemberian vaksin, lanjut Syarif Hasan, mudah-mudahan akan terhindar dari virus. Walaupun ada yang meragukan bahkan tidak percaya keampuhannya, setidaknya ada solusi nyata dalam penanganan pandemi ini. “Saya rasa kita semua perlu memberikan kesempatan kepada upaya pemerintah itu,” tegasnya.

Namun, Syarif Hasan sangat memaklumi jika ada sebagian masyarakat yang takut. “Saya kira wajar. Menurut saya itu bukan ketakutan, tapi hanya khawatir saja. Tapi, jangan juga perasaan masyarakat itu dibiarkan saja. Kalau saya amati, masyarakat hanya butuh pemahaman yang jelas seputar vaksin, manfaat dan dampak-dampaknya buat mereka,” tambahnya.

Untuk itu, Syarif Hasan berharap, pemerintah gencar melakukan sosialisasi dengan berbagai bentuk yang tentunya mudah dicerna masyarakat, terutama rakyat kecil. Dan, yang paling penting, ketika vaksin disebar harus dengan biaya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kalau perlu digratiskan saja sekalian,” katanya. □

DER



Hidayat Nur Wahid

Ikhtiyar Menyelesaikan Masalah UU Ciptaker

Legislative review bisa menjadi salah satu alternatif untuk menghentikan pro kontra terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., mendukung opsi “legislative review” terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang tawarkan pemerintah. Upaya legislative review, menurut Hidayat, sejalan dengan prinsip NKRI sebagai negara Pancasila, negara hukum, dan mengutamakan kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

“Saya mengapresiasi pernyataan Menkopohukum, Mahfud MD., bahwa tidak menutup kemungkinan dilakukannya legislative review terhadap UU Ciptaker yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (6/11).

Permasalahan dalam UU Omnibus Law Ciptaker, kata Hidayat, tidak sekedar salah ketik, tapi berjaln berkelindan serta banyak aspeknya. Dari proses pembahasan, undang-undang ini nampak tidak cermat dan diburu-buru. Draf final RUU Ciptaker tidak diberikan kepada semua fraksi pada pengambilan keputusan tingkat I dan tingkat II.

Selain itu, kata Hidayat, jadwal rapat

paripurna persetujuan RUU Ciptaker pun tiba-tiba dimajukan. Bahkan, sesudah diketok palu di Rapat Paripurna DPR RI—sekalipun ditolak oleh Fraksi PKS dan Fraksi PD—hingga diserahkan ke pemerintah masih terjadi perbaikan. Hal itu diakui oleh jubiir Presiden bidang Hukum, Dini Santi P., tapi dia mengklaim sebagai perbaikan administrasi, bukan substantif. Tapi, ternyata berdampak hilangnya Pasal 46 dengan 4 ayatnya, secara sepihak.

Berbagai kesalahan, baik administratif maupun substantif, masih ditemukan dalam UU Ciptaker. Padahal sesudah diputuskan di Rapat Paripurna DPR, UU itu sudah disisir di Baleg DPR, dan juga Setneg. Kesalahan juga ditemukan sesudah UU itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, dan dimuat dalam Lembaran Negara.

Beberapa pihak sudah mempublikasikan temuan sejumlah kesalahan pasal dalam UU Cipta Kerja. Misalnya, pasal 6 yang menentukan untuk merujuk ke pasal 5 ayat 1, padahal pasal 5 tersebut tanpa ayat.

Lalu, pasal 175 angka 6 UU Ciptaker yang mengubah pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, dimana ayat (5)-nya menyebut agar merujuk ke ayat (3), padahal seharusnya ke ayat (4). Selanjutnya, pasal 50 angka 5 yang

mengubah Pasal 36 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan lain sebagainya. Belum lagi temuan substansial terkait pasal-pasal yang menguntungkan investor dan atau merugikan para buruh WNI, sebagaimana dilaporkan oleh INDEF.

Munculnya kesalahan sesudah ditandatangani Presiden Jokowi diakui oleh Mensesneg Pratikno, sekalipun diklaim sebagai sekedar kesalahan administratif. Tapi, faktanya banyak juga yang substantif.

Namun, apapun itu tetap cacat formal dan legal. Apalagi sudah ada pihak yang ditangkap karena dianggap menyebarkan hoax terkait RUU Ciptaker. Atau petugas di Sekretariat Negara yang sudah diberi sanksi administratif karena dianggap lalai, menyodorkan naskah yang diperlukan tandatangan Presiden, tapi masih banyak masalah. Karena itu seharusnya ada penarikan menyeluruh atas UU Ciptaker itu.

Kesalahan yang begitu banyak, kata Hidayat, harusnya tidak terjadi dalam pembuatan UU yang memiliki daya ikat dan daya paksa kepada masyarakat luas. Apalagi pemerintah menyampaikan bahwa RUU Omnibus Law Ciptaker masuk kategori super prioritas, penuh niat baik, untuk sederhanakan perundangan dan hadirkan kepastian hukum. Tetapi dengan masih

banyaknya masalah seperti, justru menggambarkan hal sebaliknya dari yang diklaim oleh pemerintah.

Menurut Hidayat, legislative review dengan menarik seluruh ketentuan UU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah bisa menjadi sarana bagi Presiden dan DPR untuk memperbaiki kinerja dalam pembuatan UU, dan memperbaiki kesalahan dalam pembuatan UU Omnibus Law, seperti Cipta Kerja ini. Agar tak lagi dilakukan secara grusa-grusu dan ugul-ugalan, sehingga menghasilkan banyak masalah, serta penolakan dari masyarakat luas.

“Melakukan legislative review menyeluruh dalam rangka mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi dan lembaga negara/pemerintah (eksekutif) maupun DPR (legislatif),” ujarnya.

Karenanya, HNW mengusulkan agar legislative review dibuka opsinya oleh pemerintah, diprioritaskan, dan bukan hanya merevisi kesalahan dalam UU Ciptakerja itu, melainkan juga secara total membuat RUU Pencabutan UU Ciptaker yang telah meresahkan rakyat (utamanya kaum buruh), menghadirkan pembelahan rakyat, dan memperoleh penolakan dari masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

Untuk itu, kata Hidayat, perlu keberanian dan kenegarawanan untuk mengambil langkah ini guna mengakhiri kegelisahan dan kegaduhan rakyat akibat disahkannya UU Ciptaker yang masih bermasalah itu, di tengah pandemi Covid-19 di mana rakyat juga korbannya. “Langkah itu juga dapat menyelamatkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislative, maupun yudikatif,” katanya.

Lewat Jalur Cepat

Hidayat berpendapat, pengajuan dan pembahasan RUU Pencabutan UU Ciptaker ini bisa dilakukan lewat jalur cepat, tanpa melewati proses Program Legislasi Nasional (Prolegnas) layaknya RUU pada umumnya. Ia merujuk kepada pasal 23 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 sebagai dasar hukumnya.

Ketentuan itu berbunyi: “Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar

Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

Hidayat menilai, kehadiran RUU Pencabutan UU Ciptaker ini sudah memenuhi kriteria dalam pasal itu, yakni adanya keadaan luar biasa dan adanya urgensi nasional. “Adanya penolakan publik yang

review, ada dua opsi yang bisa diambil untuk mengakhiri kegaduhan terkait UU Ciptaker ini, yakni judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau executive review oleh Presiden. Judicial review sudah ditempuh oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama buruh/serikat pekerja.

Hidayat menambahkan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan opsi executive review yang dilakukan oleh Presiden, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mencabut UU Ciptaker ini. Menurut Hidayat, opsi ini lebih mudah dilakukan karena hanya membutuhkan kemauan politik Presiden, tanpa perlu melibatkan DPR.



meluas, proses pembahasan dan persetujuan RUU Ciptaker di DPR yang dinilai menabrak prosedur formil dan kesalahan penulisan konten yang substansif cukup menjadi alasan perlunya RUU Pencabutan tersebut,” tukasnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini menjelaskan bahwa UU Pencabutan suatu undang-undang bukan terlarang, dan bukan hal baru bagi Indonesia. DPR dan Pemerintah, misalnya, pernah melakukan kegiatan sejenis, dengan mengesahkan UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Jadi, “Presiden menerbitkan UU yang mencabut UU lain sudah ada dan secara regulasi juga dimungkinkan,” ujarnya.

Hidayat mengingatkan, selain legislative

Kalau Presiden menerbitkan Perppu dengan mencabut UU yang baru ditandatanganinya maka demi kemasalahatan terbesar bagi bangsa dan negara, hal seperti itu wajar untuk dilakukan. Seperti dulu Presiden SBY, diakhir masa jabatan keduanya, membuat Perppu No. 1 Tahun 2014 dan mencabut UU Pilkada yang baru saja ditandatangani.

“Dari sudut pandang ketatanegaraan, memang Presiden tidak boleh dengan mudah menerbitkan Perppu. Namun, langkah ini perlu juga dipertimbangkan, mengingat penolakan terhadap UU Ciptaker di masyarakat semakin meluas, dan masih berlanjut, sementara UU-nya masih banyak masalah, baik formal maupun legal, dengan segala dampak negatifnya dalam aspek ekonomi, sosial dan politiknya,” pungkasnya. □

MBO

FGD Posisi Museum

Museum Memiliki Kemampuan Membangkitkan Nasionalisme

Selain sebagai pengingat sejarah bangsa, museum di Indonesia juga sebagai pembangkit rasa nasionalisme rakyat.



WAKIL Ketua MPR, Lestari Moerdijat, mengungkapkan bahwa museum memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali idealisme dan nasionalisme bangsa Indonesia. Hal itu bisa terjadi karena museum berperan sebagai wadah penyimpanan nilai-nilai sejarah bangsa yang kemudian disampaikan kepada generasi selanjutnya untuk dipelajari, dipahami, lalu diimpelentasikan.

“Museum adalah sarana tepat untuk

mengorek kembali sejarah Indonesia yang baik dan kemudian mengambil nilai-nilainya untuk digunakan menghadapi berbagai tantangan berat bangsa di masa kini,” katanya usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Posisi Museum dalam Merawat Nilai Kebangsaan’, di Museum Sejarah Jakarta, kawasan kota tua Jakarta, Selasa (27/10/2020).

FGD yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Forum Diskusi

Denpasar 12, Media Group, dan Mitra Museum Jakarta, itu dihadiri oleh antara lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim (virtual), Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo, Ketua Yayasan Mitra Museum Jakarta Veronica Tan, serta masyarakat pemerhati sejarah Indonesia yang hadir secara fisik dan virtual.

Pimpinan MPR dari partai Nasional Demokrat (NasDem) yang biasa disapa





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Rerie ini lalu menunjuk satu contoh sejarah yang banyak sekali nilai-nilai yang hebat, yakni Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda ini sebuah peristiwa besar yang menjadi cikal bakal terbentuknya negara Indonesia. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai latar belakang bersatu padu, satu suara berikrar untuk persatuan, kesatuan, dan merdekanya Indonesia.

“Luar biasa sekali saat itu. Para pemuda tersebut berkumpul, semangat mereka berkobar, dan memberi kekuatan besar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk segera secepatnya menyingkirkan permasalahan bangsa, yakni penjajahan menuju kemerdekaan,” ujarnya.

Ada satu fakta menarik, lanjut Rerie, yaitu di Indonesia dalam rentang tahun 2018 hingga 2020 ada lebih dari 900 jurnal akademik, tentu dengan penelitian mendalam, yang menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah itu merasa nilai-nilai kebangsaan dan nasionalismenya tumbuh ketika mengunjungi museum. “Itu sangat membahagiakan, itu bukti bahwa nasionalisme generasi muda sebenarnya melekat hanya butuh diingatkan saja,” tambahnya.

Rerie bersyukur, saat ini banyak sekali elemen masyarakat yang sangat peduli pada eksistensi museum dan berupaya agar museum kembali menjadi salah satu tempat

favorit anak-anak muda untuk dikunjungi. Salah satunya Yayasan Mitra Museum Jakarta yang berisi individu-individu dari berbagai profesi, ada pengusaha, eksekutif, profesional, mahasiswa dan lainnya yang semuanya memiliki ketulusan bersama-sama berbakti untuk bangsa ini melalui aktivitas yang membangkitkan kembali nilai-nilai luhur bangsa.

“Untuk itu saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, mari kita semarakkan museum kita. Mari kita edukasi anak-anak kita agar mencintai museum, supaya sejarah tidak hilang dimakan zaman dan tetap terpelihara oleh generasi muda Indonesia,” ucapnya. □

DER



PGD Universitas Gadjah Mada

MPR dan Guru Besar UGM Bahas Amandemen



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BERTEMPAT di Ruang Multimedia 1, Lt. 3, Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM), Bulaksumur, Yogyakarta, 26 Oktober 2020, MPR bersama Dewan Guru Besar (DGB) UGM menggelar focus group discussion (FGD). Kegiatan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau lebih dikenal dengan Empat Pilar MPR yang dikemas dalam bentuk FGD itu bertema 'Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Khususnya Terkait Dihidupkannya Kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)'. Hadir dalam FGD itu Wakil Ketua MPR Syarif Hasan; Wakil Rektor UGM Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr; Ketua DGB UGM Prof. Drs. Koentjoro, M.BSc, Ph.D; serta puluhan guru besar lainnya, termasuk Prof. Dr. Kaelan dan Prof. Dr. Sofian Effendi.

Di hadapan peserta FGD, baik yang hadir langsung maupun secara daring, Syarif Hasan mengucapkan terima kasih kepada kampus tertua di Indonesia itu yang menyambut dirinya dengan hangat dan terbuka. Di tengah pandemi Covid-19 di bulan kesepuluh, kata Syarif Hasan, kita semua

merasa prihatin. Meski dalam masa yang demikian, serta mesti mengikuti protokol kesehatan, MPR tetap melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya. "Hal demikian menunjukkan bahwa kita cinta kepada rakyat, bangsa, dan negara", ujar Menteri Koperasi dan UMKM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. "Kami juga memberikan apresiasi kepada civitas akademika

UGM yang bersama MPR melakukan kegiatan seperti ini," tambahnya.

Lebih lanjut Syarif Hasan menjelaskan, beberapa tahun ini muncul wacana mengenai amandemen UUD. Wacana ini merupakan amanah atau rekomendasi dari MPR periode 2014-2019 kepada MPR periode ini, 2019-2024. "Semua pimpinan MPR menyepakati melaksanakan rekomendasi pimpinan MPR





sebelumnya ini,” ungkap Syarief Hasan. Namun, dalam masalah amendemen, pria asal Sulawesi itu tetap menekankan perlunya kehati-hatian. “Selama ini kita terus melakukan pendalaman materi dan berkomunikasi dengan seluruh komponen bangsa,” paparnya. Dan, dia mengakui, wacana mengenai amendemen berkembang, tak sebatas pada masalah Pokok-pokok Haluan Negara.

Dalam menyikapi amendemen, pimpinan MPR berbagi tugas untuk menjangkau aspirasi masyarakat berdasarkan cluster-cluster. “Setiap kelompok yang merepresentasikan masyarakat kita ajak rembugan,” tuturnya. Sebagai pimpinan MPR, Syarief Hasan mengatakan, dia kerap menjangkau aspirasi mengenai wacana amendemen dengan intelektual, akademisi, dan civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi. Sebelum Covid-19 melanda, dia telah mengunjungi berbagai perguruan tinggi, antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. “Sebelum di UGM, saya menjangkau aspirasi mengenai wacana amendemen UUD di Universitas Padjadjaran”, ungkapnya. “Jadi kami fokus pada akademisi,” tambahnya.

Terkait keberadaan UUD, Syarief Hasan mengatakan, di tengah masyarakat ada tiga kelompok yang menyikapi konstitusi ini. Ada



yang ingin kembali ke UUD Tahun 1945 yang asli, ada yang ingin mempertahankan yang sudah ada, ada pula yang ingin melakukan amendemen kembali. “Semua itu ada plus minusnya. Semua keinginan ada konsekuensinya,” katanya. Bangsa ini telah melakukan beberapa kali amendemen UUD, dan amendemen telah membawa perubahan mendasar, di antaranya MPR tidak lagi menetapkan dan membuat GBHN.

Ketika ada keinginan tentang perlunya GBHN diatur dalam UUD, menurut Syarief Hasan, timbul pertanyaan selanjutnya, apakah nanti presiden akan menyampaikan

pertanggungjawabannya kepada MPR, dan bila GBHN masuk dalam UUD, apakah nanti akan membuat MPR menjadi lembaga tertinggi lagi? Hal-hal demikianlah yang membuat masalah menjadi kompleks dan saling terkait. Terkait semua wacana yang ada, menurut Syarief Hasan, perlu ada komitmen nasional yang diambil dari konsekuensi-konsekuensi yang ada. “Kita harus memilih yang terbaik,” tegasnya.

Saat tidak ada GBHN, menurut Syarief Hasan, pemerintah melakukan pembangunan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005 – 2025 dan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang itu, menurut Syarif Hasan, diimplementasikan oleh Presiden SBY dan membawa hasil yang baik dalam pembangunan. “Banyak kemajuan yang dicapai Presiden SBY,” tuturnya. “Untuk itulah dalam FGD ini kami ingin banyak mendengar dari para guru besar,” ungkapnya. Apa yang disampaikan dalam forum ini, menurut Syarif Hasan, akan dijadikan dokumen dan dibawa dalam pembahasan-pembahasan di MPR.

Ketua DGB UGM, Prof. Koentjoro, dalam sambutannya mengatakan, DGB UGM merasa senang bisa diajak ikut menyelesaikan permasalahan bangsa. “Untuk itu kami antusias melakukan kegiatan ini,” tuturnya. Menurut Prof. Koentjoro, setiap negara mempunyai tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Pointer-pointer pembangunan pada masa lalu itu termaktub dalam GBHN. “Agar tidak menimbulkan masalah maka haluan negara yang ada harus mengacu pada Pancasila”, ujarnya.

Wakil Rektor UGM, Djagal Wiseso, menuturkan, wacana amandemen merupakan isu strategis bagi bangsa. Untuk itu, menurut Djagal Wiseso, tepat bila DGB mengangkat masalah ini. Dalam menyikapi setiap masalah yang ada, kata Djagal Wiseso lebih lanjut, kampus adalah kumpulan ilmuwan, bukan politisi. Untuk itu, harus berpegang pada prinsip, boleh salah tapi tak boleh berbohong.

Dalam proses ketatanegaraan, menurut Djagal Wiseso, Indonesia tak boleh berkiblat pada salah satu kekuatan dunia. “Kita harus berkiblat pada ke-Indonesia-an sendiri,” tegasnya. Ia menyampaikan pesan, bila negeri ini mau langgeng maka harus berpegang teguh pada nilai-nilai pendahulunya.

Syarief Hasan mengucapkan terima kasih, banyak masukan yang terkait dengan permasalahan bangsa. “Banyak pendapat yang kami terima”, tuturnya. Dia mengukir terkesan dengan masukan para guru besar bahwa dalam setiap proses mengambil kebijakan, perlunya kita melandasi diri dengan rasa kejujuran.

Kejujuran dalam berkomunikasi, menurut Syarif Hasan, penting sebab bila hal demikian tak dijadikan acuan maka membuat orang tak amanah. “Kita harus

jujur, bila tak jujur dalam membuat aturan, bisa mengakibatkan kesalahan yang fatal,” tegasnya.

Webinar UNM Makassar dari Yogyakarta

Di tengah kesibukan melakukan kunjungan kerja ke Kota Yogyakarta, 27 Oktober 2020, Syarif Hasan hadir dalam kuliah jarak jauh atau webinar dengan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar (UNM), Makassar, Sulawesi Selatan. Webinar bertema: ‘Membangun kewirausahaan di kalangan generasi muda’ itu menarik perhatian mahasiswa di sana, terbukti ada 1000 peserta dalam acara itu.

Di depan kamera yang terhubung dengan

kekuasaan pada 2004 hingga 2014. Pada masa itu, papar Syarif Hasan, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,7%. Dari pertumbuhan yang ada membuat pengangguran dan kemiskinan turun. “Inilah yang terjadi selama 10 tahun pemerintahan SBY yang pertumbuhan ekonominya bagus”, ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi bisa demikian, menurut Syarif Hasan, karena banyak kebijakan yang pro pertumbuhan, pro mengatasi pengangguran dan kemiskinan, serta pro pada lingkungan hidup. Kebijakan yang demikianlah seharusnya diambil oleh pemerintah saat ini. “Kebijakan seperti ini harus konsisten”, paparnya. Pertumbuhan harus merata, Jawa dan luar Jawa,



peserta, Syarif Hasan mengucapkan terima kasih kepada UNM yang telah menggelar acara itu. Acara ini, menurut Syarif Hasan, mengobati kerinduan akan Kota Makassar. Dia mengaku, sejak Maret hingga saat ini belum ke Makassar karena pandemi Covid-19. Ia berharap, secepatnya mengunjungi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan itu. “Meski demikian tali silaturahmi perlu tetap kita jaga,” tegasnya.

Webinar yang digelar, menurut Syarif Hasan, wujud kepedulian UNM untuk mengembangkan kewirausahaan. Untuk mengembangkan sektor ini, katanya lebih lanjut, banyak faktor yang memengaruhi, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai faktor pendorong adanya demand atau kebutuhan.

Dalam masalah pertumbuhan, politisi Partai Demokrat (PD) itu menceritakan pengalaman di masa pemerintahan SBY yang memegang

sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi juga harus pro lingkungan. Jangan sampai lingkungan rusak karena pembangunan. “Kita harus ingat anak cucu kita,” tegasnya.

Terkait masalah kewirausahaan, dia berharap, generasi muda untuk segera terjun pada sektor ini. “Kalau bukan sekarang kapan lagi”, tuturnya. Generasi muda merupakan generasi yang penuh dengan spirit. Semangat yang demikian bila disalurkan pada jalan yang tepat akan menghasilkan kontribusi positif pada bangsa dan negara.

Syarief Hasan menceritakan ketika menjabat menteri, mempunyai program gerakan kewirausahaan yang diikuti oleh 80.000 mahasiswa. Dari gerakan itu membuat pelaku UMKM meningkat tajam. Dia mengakui, untuk menjadi wirausaha

memang perlu permodalan yang cepat. Ia mengingatkan, menjadi wirausahawan yang sukses tidak gampang. Dengan menjadi wirausahawan, menurut Syarief Hasan, akan mengubah kebiasaan mahasiswa selepas kuliah. Biasanya setelah lulus mahasiswa mencari pekerjaan, namun dengan berwirausaha akan menciptakan lapangan pekerjaan. “Hal demikianlah yang memberi kontribusi pada bangsa,” paparnya.

Dekan FIS UNM Prof. Dr. Jumadi menuturkan, webinar itu digelar untuk memberi motivasi pada mahasiswa untuk terjun dalam sektor kewirausahaan. Hadirnya Syarief Hasan, mantan Menteri Koperasi dan UMKM, menjadi magnet tersendiri dalam acara itu.

Puji Langkah Gubernur Yogyakarta

Syarief Hasan memuji langkah Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, dalam menangani pandemi Covid-19 di daerahnya. Politisi Partai Demokrat mengungkapkan hal itu setelah bertemu dengan Sultan di kantornya, Kepatihan, Yogyakarta, 27 Oktober 2020. “Selama dua jam saya berdiskusi dengan beliau mengupas banyak hal,” tutur Syarief Hasan kepada wartawan yang mencegatnya.

Syarief Hasan menyatakan, dalam menangani pandemi Covid-19, Sultan menempatkan masyarakat Yogyakarta sebagai subjek. Masyarakat dirangsang kesadarannya akan dampak wabah penyakit itu sehingga mereka sadar sendiri menerapkan protokol kesehatan. “Tanpa dikomando, masyarakat memakai masker sendiri,” tuturnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, bila pengertian lockdown adalah pengucian secara ketat, hal demikian oleh Sultan dimodifikasi. Masyarakat diberi penjelasan mengenai aturan itu. Mereka diharap tetap berada di rumah, namun bagi masyarakat yang sehat bisa saja melakukan kegiatan, namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sultan yakin bahwa imunitas atau tubuh yang sehat dan kuat adalah pertahanan yang baik dalam mencegah Covid-19. Untuk itu, menurut Syarief Hasan, Sultan memberi bekal kepada masyarakat agar mereka tetap sehat dan kuat sehingga imunitas terjaga. “Untuk itu mereka diberi vitamin dan sebagainya. Dengan demikian penyebaran Covid-19 bisa diputus mata rantainya,” ujar



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Syarief Hasan.

Sebagai wilayah terbilang padat penduduk, dan lalu lalang masyarakat yang keluar masuk, menurut Syarief Hasan, Sultan melakukan tracing. Semua yang datang ke desa betul-betul didata secara akurat, sehingga bila ada apa-apa bisa dilacak dan telusuri secara utuh. “Itulah yang membuat kondisi Yogyakarta sangat luar biasa”, pujiannya.

Dalam waktu dekat, sekitar satu hingga dua bulan, sepertinya mahasiswa yang menempuh pendidikan di Yogyakarta akan kembali kuliah. Mengantisipasi kedatangan mereka, menurut Syarief Hasan, Sultan sudah mempersiapkan langkah antisipasi yang perlu dilakukan.

Dalam masalah kebijakan penanganan Covid-19, untuk masalah tertentu Sultan menyerahkan kepada pihak terkait. Dalam

masalah perhotelan, misalnya, ia menyerahkan bagaimana asosiasi itu menentukan langkah-langkah yang penting agar penularan Covid-19 bisa dicegah.

Jadi, selama ini, Sultan membangun komunikasi dengan semua pihak di Yogyakarta, sehingga bila ada permasalahan, pihak-pihak yang ada memberi masukan untuk mengatasi masalah. “Jadi masyarakat betul-betul dijadikan subjek dalam kebijakannya”, ungkapnya.

Menurut Syarief Hasan, dalam pertemuan itu juga dibahas wacana amendemen UUD NRI Tahun 1945. “Saya banyak mendapat masukan dan buah pikiran beliau tentang amendemen itu”, ungkapnya. Tak hanya itu, perbincangan juga mengupas mengenai otonomi daerah. □

AWG



Kitabisa.com

Membantu Sesama Melewati Batas

Sokasi dan Sara



Galang Dana Untuk KONDISI DARURAT
Ajak teman, keluarga dan publik untuk berdonasi di fundraising campaign Anda dengan Kitabisa

Mulai Fundraising

898 Campaign terdapat	Rp9.627.424.524 Total Donasi Terkumpul	50.942 Doers Community Bergabung
--------------------------	---	-------------------------------------

Campaign Anda kami promosikan melalui email ke lebih dari 50.000 calon donatur

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BANYAK yang mempertanyakan apakah sikap kekeluargaan dan gotong royong bangsa Indonesia masih ada. Alasannya, karena kerja bakti dan tolong-menolong yang menjadi budaya bangsa kita semakin jarang di temukan. Orang makin sulit diajak kumpul membahas kegiatan sosial. Orang hidup bertetangga tidak saling peduli, tidak saling kenal, dan bahkan tidak saling sapa. Sedih mendengarnya.

Namun tentang pertanyaan, apakah sikap kebersamaan dan tolong-menolong itu masih ada atau tidak tak perlu dirisaukan. Karena diam-diam sekelompok anak muda, atau generasi yang dianggap semakin jauh dari generasi pewaris (nenek moyang) itu tengah menyulam sifat kegotongroyongan bangsa Indonesia. Mereka sedang menjahit kembali rasa kebersamaan di antara anak bangsa. Tanpa mengenal suku, ras, bahasa, asal-usul, dan juga agama.

Bahkan pekerjaan besar yang mereka garap itu tampaknya mulai memberi hasil. Buktinya, setiap hari mereka berhasil menemukan dan mengajak serta ribuan orang yang bersedia mengulurkan tangan untuk membantu sesama yang tengah dalam kesulitan.

Dan, telah banyak yang mereka perbuat

dalam membantu sesama. Seperti membantu pembangunan masjid pertama di kampung pemulung, dan membantu korban bajir di Sumatera Utara. Mereka juga melakukan sedekah makanan bareng yatim jalanan, membantu Rumah Qur'an layak di pedalaman NTT, dan membantu bayi Sofia yang menjalani operasi *Hydrocephalus*.

Bukan hanya itu, mereka juga membantu Rahman, anak yatim, yang mengidap penyakit kista dan tumor rahim. Bahkan guru ngaji yang dibegal di tengah jalan juga tak luput dari perhatian mereka. Pokoknya,



masih banyak lagi yang mereka bantu.

Siapa anak-anak muda itu? Mereka adalah angkatan generasi milenial yang berkumpul dalam satu platform bernama *Kitabisa.com*. Jumlah mereka yang tergabung perkumpulan ini atau pun yang berempati terhadap penderitaan sesama sangat banyak. Sebanyak jumlah rupiah yang sudah disumbangkan. Juga jumlah empati yang sudah diberikan.

Menariknya, setiap rupiah yang masuk langsung diikuti perubahan serta pergerakannya. Semua transparan, tak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan, para donator bisa mengetahui perkembangan kondisi para penerima sumbangan.

Mengomentari keberhasilan yang diperoleh itu, Fara Devana, Public Relations Manager *Kitabisa.com*, kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu berucap syukur atas keberhasilan yang diperoleh. Namun, sebelum sukses diperoleh, *Crowdfunding* itu harus bekerja keras untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat.

"Alhamdulillah respon publik semakin baik. Jumlah orang yang percaya untuk berdonasi di *Kitabisa.com* terus meningkat. Tak hanya perorangan, tapi juga *public figure*, NGO, *brand* hingga media mempercayakan untuk



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

menggalang dana online melalui *Kitabisa.com*,” kata Fara Devana.

Untuk menjadi pendonor di *Kitabisa.com* tidak sulit. Situs ini telah menyediakan fitur yang mudah untuk diikuti, termasuk kepada siapa donor itu akan disalurkan. Sedangkan untuk mendapatkan bantuan, *Kitabisa.com* telah menetapkan berbagai persyaratan, termasuk keterbukaan untuk pengecekan lapangan. Semua ini dilakukan semata-mata sebagai bagian dari sikap kehati-hatian agar tidak ada sepeser pun rupiah yang salah sasaran.

Penggalang Donasi

Crowdfunding *Kitabisa.com* berdiri sejak 2013. Situs ini lahir dengan tujuan membantu sesama yang ditimpa kesulitan. Ide menggunakan dunia maya menjadi crowdfunding muncul karena susahny mencari sumbangan. Padahal untuk mendapatkan anggaran yang dibutuhkan itu mereka sudah berpeluh-peluh hingga turun di perempatan lampu merah. Dan, dana yang didapat tidak seberapa dan kerap tidak dipercaya.

Founder dan CEO *Kitabisa.com*, Alfatih Timur (Timmy), merasakan pengalaman itu semasa kuliah di Fakultas Ekonomi UI dan aktif di BEM. Pada 2013, ketika masih kerja jadi asisten Profesor Rhenald Kasali di Rumah Perubahan, Timmy melakukan riset, ternyata di luar negeri sudah banyak platform *crowdfunding* yang menghubungkan pemodal dengan usaha rintisan. Atas dasar itu, dia kepikiran kenapa tidak kita bikin juga *crowdfunding* untuk menghubungkan antara penggalang donasi dengan donatur, menghubungkan kebaikan.

Namun, niat untuk membantu itu tidak serta merta mendapat kemudahan. Banyak pihak yang tidak begitu saja percaya terhadap kegiatan yang dijalankan *Kitabisa.com*. Apalagi untuk menipkan uangnya membantu meringankan beban orang lain.

Namun, pelan tapi pasti, dengan menunjukkan bukti dan *success story* yang berhasil dicapai, kehadiran *Kitabisa.com* mulai diterima masyarakat. Apalagi,



Fara Devana

masyarakat juga bisa mengecek langsung informasi yang diinginkan. Termasuk siapa penerima bantuan, besarnya kebutuhan anggaran hingga berapa dana yang sudah terkumpul. Semua pertanyaan itu bisa dilihat langsung dengan membuka isi platform *Kitabisa.com*.

Setelah beberapa lama, selain makin banyak orang yang mempercayakan sumbangannya, banyak juga anggota masyarakat yang mendapat bantuan dari kegiatan *Kitabisa.com* di dunia maya.

Selama terlibat dalam kegiatan *Kitabisa.com*, kata Fara, banyak pengalaman dan kisah-kisah menarik yang dijumpai. Salah satunya adalah saat melakukan penggalangan dana untuk membangun sekolah di Desa Riso, Sulawesi Barat.

Ceritanya, di Desa Riso itu terdapat sekolah alternatif yang didirikan mandiri oleh seorang guru yang peduli dengan keberlangsungan masa depan anak-anak di Desa Riso. Bangunan sekolah sangat sederhana, tapi semangat belajar anak-anak di sana cukup tinggi. Bahkan, para siswa rela berjalan kaki belasan kilometer untuk bersekolah.

Lalu, timbul inisiatif dari sang guru untuk menggalang dana guna membangun sekolah yang lebih layak bagi murid-muridnya. Nah, berkat bantuan *Kitabisa.com*, gedung pendidikan yang sebelumnya bocor, berlantaikan tanah, kini sekolah itu sudah dibangun permanen. Anak-anak juga bisa membeli perlengkapan sekolah yang memadai, serta buku pelajaran dan alat tulis.

“Terharu sekali melihat anak-anak di sana yang punya semangat belajar tinggi, bisa bersekolah di bangunan dan kondisi yang layak,” ungkap Fara. Tapi, lanjutnya Fara, ini hanya sebuah kisah sukses, masih banyak orang atau sekolah-sekolah, serta tempat-tempat ibadah lain yang juga membutuhkan uluran tangan kita semua. □

MBO

Ir. H.M. Idris Laena, MH., Ketua Fraksi Golkar MPR RI

Kesalahan Besar Mengaitkan Agama dengan Terorisme

PRESIDEN Joko Widodo didampingi Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin beserta tokoh lintas agama telah mengadakan konperensi pers terkait pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Inti konperensi pers itu mengecam keras pernyataan Presiden Perancis yang menghina agama Islam dalam menyikapi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Abdullah Abzorov (beragama Islam) terhadap Samuel Pati, seorang guru, yang mengajarkan kebebasan berekspresi, dengan menunjukkan karikatur Nabi Muhamad SAW diambil dari Majalah Satir *Charlie Hebdo*.

Namun demikian, pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengecam keras pembunuhan yang terjadi di Paris itu maupun pembunuhan yang terjadi di Nice Perancis. Dari kronologi tersebut, sebetulnya ada tiga kata kunci: *Pertama*, kebebasan berekspresi yang kebablasan karena dengan cara melecehkan keyakinan agama lain. *Kedua*, tindakan kekerasan yang sama sekali tidak pernah dibenarkan oleh agama manapun. Dan, ketiga, menghina agama lain dan mengaitkan dengan terorisme.

Sebetulnya tragedi demi tragedi yang muncul akibat masalah seperti di atas sudah sering terjadi. Namun, kali ini mendapat perhatian luas karena dilakukan oleh seorang presiden dari negara maju bernama Emmanuel Macron. Sang presiden menyikapi kasus pembunuhan itu dengan emosional yang justru cenderung menghina agama lain.

Tentu yang perlu disikapi dengan serius adalah jika seorang presiden dari sebuah negara maju masih mempunyai pandangan yang keliru tentang Islam, maka pasti ada sesuatu yang salah. Minimal komunikasi internasional yang selama ini menjadi domain dan menjadi tempat berhimpun negara-negara Islam OKI — organisasi kerjasama Islam yang didirikan di Rabat, Maroko, 25 September 1969 dan beranggotakan 57 negara, serta memiliki perwakilan resmi di PBB — tidak men-



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

jalankan fungsinya dengan baik.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia ini, apakah cukup hanya mengecam jika ada tragedi? Indonesia seharusnya bisa berperan besar menjadi komunikator yang baik dengan negara-negara lain di dunia. Selain, karena Islam yang dipahami adalah Islam yang Rahmatan lil'alam, juga sejalan dengan sila pertama Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, yakni menjaga toleransi antaragama dan membangun toleransi antarumat beragama. Sehingga stigma Islam sebagai agama radikal bisa hilang dengan sendirinya.

Syahdan, ketika Sultan Muhamad Al Fatih (Mehmet II) berhasil merebut Konstantinopel pada 29 Mei 1453, penduduk yang beragama Kristen lari ketakutan dan berkumpul di Hagia Sofia. Mereka membayangkan akan dibinasakan oleh Sultan yang merupakan turunan ketujuh Kesultanan Ottoman yang berusaha merebut Konstantinopel. Namun, apa yang terjadi, di depan masyarakat Sul-

tan berjanji melindungi mereka (saat itu Romawi Timur dan Romawi Barat juga dalam keadaan bermusuhan), serta tetap menjamin kebebasan mereka untuk memeluk agamanya.

Saya tidak mengetahui secara persis lembaga apa yang seharusnya mengambil peran ini. Namun, pemerintah kita punya Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, belum lagi organisasi-organisasi Islam yang merupakan partisipasi aktif masyarakat dalam menyiarkan Islam yang Rahmatan lil'alam itu, serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang punya Group Kerjasama Bilateral atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang terus menyosialisasikan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan. Yang jelas: "Saatnya masyarakat dunia diberikan pemahaman dan mengubah persepsi mereka bahwa mengaitkan agama dengan radikalisme maupun terorisme adalah kesalahan yang besar". □

AWG



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MESKI Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya, setelah Indonesia merdeka, hubungan antara Indonesia dan Belanda terbilang terjalin erat dan akrab. Sudah puluhan kali Presiden Indonesia dan diplomat yang ditunjuk secara resmi melakukan kunjungan ke Negeri Kincir Angin itu. Pun demikian pemimpin pemerintahan monarki Belanda juga puluhan kali melakukan hal yang sama, berkunjung ke Jakarta, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Setiap kali pemimpin monarki Belanda, baik Ratu atau Raja, datang ke Indonesia, ada hal yang menarik dan unik untuk disimak. Hal yang menarik itu, seperti mengingatkan masa lalu tatkala Belanda menjadikan nusantara sebagai koloninya. Bisa pula kunjungan itu menjadi menarik karena sesuatu yang dibawa. Seperti terjadi pada

saat Raja Belanda, Willem Alexander, bersama permaisurinya Ratu Maxima Zorreguieta Cerruti melakukan kunjungan ke Indonesia pada 10 Maret 2020.

Dalam kunjungan itu, pemimpin monarki Belanda ini menyerahkan keris yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa, 1825-1830. Keris itu bernama *Kanjeng Kiai Nogo Siluman*. Menurut cerita, saat Pangeran Diponegoro ditangkap, *Kanjeng Kiai Nogo Siluman* diserahkan kepada Kolonel Jan-Baptist Cleerens. Sebagai tanda kemenangan dalam perang yang menguras anggaran keuangan Belanda itu, Cleerens menyerahkan senjata khas Jawa itu kepada Raja Willem I pada 1831, satu tahun setelah Perang Jawa berakhir.

Sejarawan Diponegoro, Peter Carey, mengungkapkan ada suatu peristiwa berupa kepercayaan yang dikhianati.

Kepercayaan itu adalah perjanjian lisan antara Cleerens dan Pangeran Diponegoro yang berjanji untuk bernegosiasi atas Perang Jawa pada 16 Februari 1830. Akhirnya, Pangeran Diponegoro datang ke Magelang untuk bertemu dengan Jenderal De Kock. Sayangnya, dalam pertemuan itu, terjadi sebuah pengkhianatan. Pangeran Diponegoro ditangkap beserta pengikutnya dan diasingkan ke Manado. Sebenarnya keris ini diberi sebagai hadiah dari Pangeran Diponegoro. Keris itu bukan keris pusakanya, tapi keris yang cukup mewah dari abad ke-17 ditata dengan emas, *Republika* (5/11/2020).

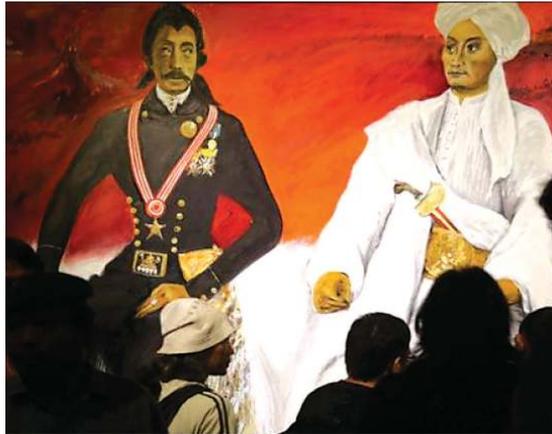
Dalam perjalanan waktu, *Kanjeng Kiai Nogo Siluman* disimpan di Museum Volkenkunde, Leiden, Belanda. Sebelum diserahkan ke pemerintah Indonesia pada 10 Maret 2020, keris itu berada di Leiden selama hampir dua Abad.

Kanjeng Kiai Nogo Siluman diserahkan Raja Willem saat diterima Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam kotak kaca, keris itu terlihat bersarung warna kuning dan gagangnya berwarna coklat.

Saat konferensi pers, Joko Widodo mengatakan: "Saya ingin menyampaikan bahwa kita tentu tidak dapat menghapus sejarah, namun kita dapat belajar dari masa lalu. Kita jadikan pelajaran tersebut untuk meneguhkan komitmen kita untuk membangun sebuah hubungan yang setara, saling menghormati, dan saling menguntungkan".

Tibanya kembali *Kanjeng Kiai Nogo*





Siluman di Tanah Air disambut hangat oleh bangsa Indonesia, terutama bagi peminat sejarah dari kisah pria berdarah biru dari Keraton Yogyakarta itu. Pemerintah sebenarnya ingin secepatnya memamerkan atau menunjukkan *Kanjeng Kiai Nogo Siluman* kepada masyarakat, namun masih dalam kondisi pandemi Covid-19 membuat museum di Jakarta tutup, tidak melayani pengunjung agar tidak menjadi cluster Covid-19.

Ketika Museum Nasional, Jakarta, memberi pengumuman bahwa pada 15 Oktober 2020 dibuka kembali, meski dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat, ternyata disambut antusias masyarakat, terutama mereka yang gemar jalan-jalan ke museum.

Setelah museum yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Barat itu buka kembali, sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah keinginan untuk menyaksikan pusaka Pangeran Diponegoro bisa terkabul. Pada 28 Oktober hingga 26 November 2020 di museum itu digelar *Pameran Pusaka Pangeran Diponegoro* dengan tema *Pamor Sang Pangeran*.

Pameran *Pamor Sang Pangeran* ini menampilkan sosok Pangeran Diponegoro dalam bentuk kekinian. Kisah kehidupan Sang Pangeran ditampilkan dengan konsep mendongeng (*storytelling*) dilengkapi dengan teknologi video *mapping* dan komik *manga* ala Jepang yang sangat digemari kaum muda. Sang pangeran juga tampil bersama kuda kesayangannya, pusaka hidup ber-

nama *Kanjeng Kiai Gentayu* dalam bentuk *hologram*.

Kemudian, di pameran ini bisa disaksikan film animasi kisah Diponegoro sejak penangkapan di Magelang (28 Maret 1830) hingga diasingkan ke Manado (3 Mei 1830). Judulnya, *Diponegoro 1830*. Dalam pameran ini disajikan pula foto-foto lukisan dan sketsa Diponegoro hasil karya seniman dalam periode 1807 hingga 2019. Selain itu, tak kalah pentingnya adalah suguhan pusaka-pusaka Diponegoro yang pernah dirampas Belanda, serta Babad Diponegoro (1831-1832) yang merupakan naskah klasik otobiografi Sang Pangeran yang ditulis pada awal pengasingan di Manado.

Pameran ini adalah gambaran eksplisit semangat juang Diponegoro melawan penjajahan Belanda. Pada masa pandemi

seperti sekarang, pameran ini diharapkan menjadi alternatif hiburan yang edukatif bagi masyarakat Indonesia. Kehidupan dan perjuangan Diponegoro juga dapat menjadi inspirasi dalam pembentukan karakter bangsa serta semangat berjuang dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, dalam *jpnn.com* (31/10/2020) mengatakan, ini merupakan pameran bertema tokoh sejarah berbasis teknologi. Pameran sosok Diponegoro ditampilkan dalam bentuk kekinian. Lebih lanjut disampaikan, pameran ini adalah gambaran eksplisit semangat juang Diponegoro melawan penjajahan Belanda. "Pameran ini menjadi ajang untuk pertama kalinya *Kanjeng Kiai Nogo Siluman* tampil di depan public," ujarnya. "Keris Diponegoro

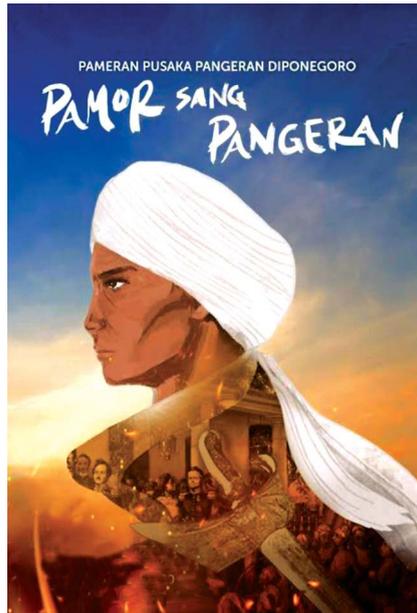


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang memiliki latar belakang kisah yang tragis dan penuh intrik”, tambahnya.

Ketika pameran dalam suasana yang masih dikungkung pandemic Covid-19 membuat acara yang dikuratori oleh Peter Carey dan Nusi Lisabilla Estudiantin itu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk masuk ke ruang pameran di Museum Nasional, seperti hendak masuk ke bandar udara, meski tidak harus menyertakan rapid test atau swab. Calon pengunjung yang ingin menyaksikan pameran yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Meseum Nasional itu harus mendaftarkan diri secara online, dan mengisi *e-form*. Dalam *e-form*, calon pengunjung dilacak jejak pergerakannya, apakah ia pernah berada di zona merah, pernah tidaknya melakukan kontak langsung dengan orang-orang yang terindikasi penyakit Covid-19, dan kesehatan dirinya.

Pameran ini boleh dikata dibuat tidak biasa. Pada pameran ini, pengunjung dibagi berdasarkan pendaftaran yang dilakukan. Ia bisa memilih jam kunjung dan hari yang ditentukan. Ini dilakukan untuk menjaga jarak antarpengunjung. Pameran ini tidak sebagaimana pameran-pameran lainnya, di mana pengunjung datang lalu langsung melihat benda yang dipajang. Dalam pameran ini, sebelum melihat piranti-piranti yang Diponegoro, pengunjung terlebih dahulu disuguhi cerita tentang perjalanan Diponegoro sejak kecil hingga saat pengasingan di Makassar, Sulawesi Selatan. Cerita disuguhkan dengan cara dongeng (*storytelling*) dilengkapi dengan



teknologi *video mapping* dan komik *manga* ala Jepang.

Selepas mendengar cerita itu, pengunjung dipersilahkan memasuki ruang pameran utama. Di ruangan ini suasana temaram menyelimuti. Gambar dan penjelasan tentang Diponegoro satu-persatu dijumpai di ruangan ini. Ada yang menarik di tempat ini, yakni *hologram* Diponegoro bersama kuda kesayangannya, *Kanjeng Kiai Gentayu*. Terlihat dalam *hologram* sosok berubah putih tengah membelai kepala kuda berwarna hitam dengan kaki berwarna putih.

Selepas *hologram* itu, pengunjung akan melihat berbagai pusaka yang digunakan Diponegoro saat Perang Jawa atau dalam perjalanan hidupnya. Pusaka itu seperti

Tongkat Kanjeng Kiai Cokro, Tombak Kanjeng Kiai Rondhan, Pelana Kuda Kiai Gentayu, Payung Kebesaran Pangeran Diponegoro, Keris Kanjeng Kiai Nogo Siluman, serta ada Babad Diponegoro.

Di ruang yang temaram itu juga dipenuhi dengan lukisan-lukisan Diponegoro yang dikreasi oleh Raden Saleh, Basuki Abdullah, serta pelukis terkenal lainnya.

Dalam penyelenggaraan pameran ini, menurut Nusi Lisabilla, ada kendala yang dirasakan panitia, seperti kesusahan saat mendisplay payung Diponegoro. Sebab payungnya sudah rapuh maka panitia sangat berhati-hati. Kendala lainnya, besi khusus untuk mendisplay payung tiba-tiba dua kali patah, padahal tidak tersenggol apapun. Kebetulan, saat persiapan belum berdoa, maka para panitia pun segera berdoa. “Alhamdulillah setelah berdoa, proses displaynya berjalan lancar,” katanya, *Republika* (5/11/2020).

Masih menurut Nusi Lisabilla, meski pameran ini memamerkan enam koleksi, tapi sama halnya memamerkan ratusan koleksi. “Sebab, proses persiapannya melalui jalan yang panjang dan matang, terlebih dengan konsep baru yang dihadirkan”, tuturnya. Harapannya, pameran Diponegoro ini setidaknya dapat mengajak kaum muda untuk peduli terhadap sejarah. *Pamor Sang Pangeran*, kata Nusi, bukanlah pameran yang terakhir, pihak panitia juga mempersiapkan untuk pameran selanjutnya. “Insya Allah Desember,” ungkapnya. □

AWG/dari berbagai sumber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



Pusaka-Pusaka Tanda Penaklukan

Perang Jawa merupakan perang yang sangat membebani anggaran Belanda. Gara-gara Pangeran Diponegoro, Belanda hampir bangkrut. Sebagai tanda Diponegoro bisa ditaklukkan, pusaka-pusaka yang berhasil dirampas ditunjukkan kepada Raja Willem I. Dalam perjalanan waktu, pusaka-pusaka yang disimpan di Belanda itu, kemudian satu persatu dikembalikan ke Indonesia, mulai 1978 hingga 2020. Dan, pusaka-pusaka itu dipamerkan dalam Pamor Sang Pangeran.

Tombak Kiai Rondhan

Tombak Kiai Rondhan terbuat dari kayu dan dilapisi benang hitam. Pada bagian mata tombak ada yang dilapisi emas. Sedang pada bagian pangkal mata tombak terdapat empat relung yang berhias permata. Ketika Kiai Rondhan diserahkan oleh pemerintah Belanda saat lawatan Ratu Julian ke Indonesia pada 1978, dua permatanya hilang.

Ciri lain dari Kiai Rondhan yang dibuat di Yogyakarta pada Abad XIX itu, panjangnya 98 cm dan diameter 3,2 cm. Batangnya berbahan kayu, berbentuk silinder yang mengecil hingga ke leher tombak. Terdapat lempengan emas melingkar yang memisahkan bahan kayu dan lilitan kawat sampai ke leher tombak. Antara bagian batang dan mata tombak terdapat ukiran dengan balutan emas dan dua batu mulia (semula empat buah). Bilah tombak berbentuk segitiga dengan bahan besi.

Serjarawan Diponegoro, Peter Carey, dalam *historia.id* menyebutkan, Kiai Rondhan merupakan pusaka yang dianggap oleh Diponegoro mampu melindungi dirinya dari petaka dan bala. Meski demikian benda itu dianggap sebagai suatu tanda dari Yang Maha Kuasa (Allah). Hilangnya tombak ini, menurut Carey, membuat hidup Diponegoro selalu dalam ancaman dan kesulitan. "Hilangnya benda itu sangat berpengaruh terhadap dirinya," ujarnya.

Kiai Rondhan hilang pada 11 November 1829 di saat umur Diponegoro 44 tahun. Kiai Rondhan hilang ketika terjadi penyergapan PGC (Pasukan Gerak Cepat) XI di bawah komando Mayor A.V. Michiels di pegunungan Gowong, sebelah barat Kedu, Jawa Tengah. Meski berhasil lolos dari penyergapan, namun Diponegoro luka di kakinya. Ketika Diponegoro lolos, senjata dan perlengkapan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

lainnya tertinggal. Dalam situasi panik, bisa jadi yang dipikirkan Diponegoro adalah dirinya selamat dari penangkapan, sehingga beberapa piranti yang tertinggal, seperti: Kiai Rondhan, peti pakaian, dan beberapa ekor kuda. Padahal Kiai Rondhan itu hendak diwariskan kepada putera tertuanya.

Tongkat Kiai Cokro

Tongkat Kiai Cokro terbuat dari kayu mahoni memiliki panjang 153 sentimeter. Tongkat ini dibuat sekitar Abad XVI pada masa Kesultanan Demak. Ujung dari Kiai Cokro cukup tajam sehingga piranti itu tak sekadar tongkat, namun bisa juga menjadi senjata. Sekitar 1815, sepuluh tahun sebelum Perang Jawa, seseorang memberikan tongkat itu kepada Pangeran Diponegoro. Menurut Peter Carey, orang itu memberikan Kiai Cokro kepada Diponegoro, dengan alasan ia melihat ada tanda-tanda Diponegoro merupakan pemimpin masa depan.

Tongkat itu digunakan oleh Diponegoro ketika melakukan ziarah ke tempat-tempat suci di tanah Jawa. Dalam setiap ziarah, ia

berdoa agar apa yang dilakukan selalu dilindungi oleh Allah dan dirahmati. Menurut sejarah, sebelum Diponegoro tertangkap, Kiai Cokro berada di tangan Pangeran Adipati Notoprojo. Ia adalah cucu Nyi Ageng Serang merupakan salah satu komandan Perang Jawa. Ada pula yang menyebut Notoprojo merupakan keturunan dari Sunan Kalijaga. Empat tahun setelah Perang Jawa berakhir atau tepatnya pada 1834, Notoprojo memberikan Kiai Cokro kepada Gubernur Jenderal Jean Chretien (J. C.) Baud. Ini dilakukan untuk mengambil hati Pemerintah Hindia Belanda. Sejak 1834 hingga 2015, tongkat tersebut disimpan oleh J. C. Baud dan keturunannya.

J. C Baud tahu itu tongkat milik Diponegoro, namun keturunannya bisa jadi tidak mengetahui siapa tuan dari tongkat itu. Meski demikian Kiai Cokro tetap dirawatnya. Pada Februari 2015 kakak beradik yang bernama, Michiel dan Erica Lucia Baud, menyerahkan tongkat ini kepada pemerintah Indonesia. Cerita keturunan Baud akhirnya tahu bahwa itu tongkat milik Diponegoro dan mengembalikannya setelah dihubungi kurator di Rijks

Museum di Den Haag, Belanda; Harm Steven. Steven mengatakan kepada mereka bahwa itu tongkat Diponegoro. Setelah 181 tahun, akhirnya Kiai Cokro kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Keris Kanjeng Kiai Nogo Siluman

Dalam *travel.detik.com* (11/3/2020) diceritakan, penelitian tentang keris milik Pangeran Diponegoro dilakukan sejak 1884. Orang pertama yang melakukan penelitian adalah Pieter Pott. Pott awalnya kurator museum lalu kemudian menjadi direktur museum. Apa yang dilakukan Pott diteruskan oleh Prof. Susan Legene dari Vrije Universteit Amsterdam dan Johanna Leifeldt pada 1917. Selanjutnya diteruskan oleh Tom Quist pada 2019.

Menurut sebuah penelitian, mereka menemukan tiga buah keris yang diduga milik Diponegoro. Peneliti terakhir, Quist, menyatakan, dua dari tiga keris itu bukan milik Diponegoro. Apa yang dikatakan Quist sama dengan temuan Leifeldt. Keris terakhir milik Diponegoro itulah yang sekarang disebut sebagai Kiai Nogo Siluman itu.

Keris itu diyakini sebagai Kiai Nogo Siluman didasarkan pada tiga dokumen. *Pertama*, surat korespondensi yang menyebutkan Kolonel J.B Clerens menawarkan keris dari Diponegoro pada Raja Belanda Willem I. Keris ini disimpan di Koninklijk Kabinet van Zelfzaamheden (KKVZ) lalu pada 1883 diserahkan ke Museum Volkenkunde Leiden. Sayangnya saat keris diserahkan, catatan katalog koleksi dari KKVZ itu hilang, termasuk catatan Kiai Nogo Siluman.

Kedua, surat kesaksian Sentot Alibasyah Prawirodirdjo (Panglima Perang Jawa) yang menyebutkan, Diponegoro memberikan kerisnya itu pada Kolonel Cleerens. *Ketiga*, pengakuan Raden Saleh, pelukis penangkapan Diponegoro. Dalam catatan yang dituliskan di sisi kanan surat kesaksian Sentot Prawirodirdjo itu disebutkan bahwa ia memastikan bahwa ciri-ciri keris merujuk pada Keris Kiai Nogo Siluman.

Keris ini memiliki *luk* (lekuk) 13, *gandhik* (bagian di bawah pangkal keris berbentuk



bulat) berbentuk kepala naga dengan mahkota, sumping, kalung, dan badan naga berlapis emas. Keris itu menyimbolkan agar pemimpin jangan sewenang-wenang, karena semua yang dimilikinya adalah *samparan ing urip* atau titipan sementara.

Ketika keris ini tiba di Tanah Air terjadi perdebatan apakah itu Kiai Nogo Siluman atau bukan. Masing-masing pihak punya argumen yang kuat. 'Menengah' perbedaan pendapat itu, adalah sejarawan Diponegoro, Peter Carey. Dalam *Republika* (5/11/2020), ia mengatakan, keris ini bukan pusakanya tapi keris yang cukup mewah dari abad 17 ditata dengan emas.

Pelana Kuda Kiai Gentayu

Pasukan Belanda tak lelah-lelahnya untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Bahkan mereka menurunkan pasukan khusus,

Pasukan Gerak Cepat (PGC) XI. Dalam upaya penangkapan di Pegunungan Gowong, Kedu, Jawa Tengah, pasukan yang dipimpin Mayor A. V. Michiels telah mengintai Diponegoro dalam suatu perjalanan. Ketika sasaran sudah mendekat, mereka langsung menyergap namun berkat kelihaiannya Diponegoro, ia berhasil lolos dari jebakan maut. Diponegoro berhasil lolos setelah melompat dari punggung kuda yang dinaikinya, yakni Kiai Gentayu, seekor kuda hitam dengan kaki putih. Dari punggung kuda kesayangannya itu, ia melompat ke lembah yang tak jauh dari lokasi penangkapan. Akibatnya, kakinya terluka. Untung di lembah ada rumput gelagah, sehingga ia terlindung dari pandangan musuh.

Saat penyergapan itu, pusaka-pusaka seperti tombak Kiai Rondhan dan kuda Kiai Gentayu, termasuk pelana, serta seperangkat pakaian yang ada di peti (koper) berhasil disita pasukan Belanda. Hasil rampasan berupa sejumlah pusaka Diponegoro, seperti Kiai Rondhan dan pelana Kiai Gentayu, diserahkan ke Raja Willem I sebagai bukti Diponegoro bisa ditaklukkan. Menurut sejarawan Diponegoro, Peter Carey, pelana kuda yang diserahkan ke Raja Willem I itu adalah piranti yang digunakan Diponegoro selama Perang Jawa 1825-1830. Ada juga yang mengatakan pelana kuda itu juga dipakai dalam keseharian.

Diponegoro dalam gambar kerap ditampilkan di atas punggung kuda. Hal



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



demikian benar adanya, sebab ia adalah orang yang menggemari kuda, baik untuk transpor atau keperluan perang. Di kediamannya, ia memiliki kandang kuda. Pastinya, kudanya lebih dari satu. Karena

diketahui ada 60 orang bekerja untuk merawat kuda-kudanya, termasuk memotong rumput untuk makanan kuda-kudanya. Diponegoro dikenal sangat mahir naik dan mengendalikan kuda.

Dalam masa damai, pelana kuda Kiai Gentayu dikembalikan saat Ratu Belanda, Ratu Juliana, melakukan lawatan ke Indonesia pada 1978. □

AWG/dari berbagai sumber

Panjang Cerita Perang Sabil

Perang Jawa, 1825 - 1830, menorehkan sejarah dan cerita yang panjang. Cerita itu hidup di tengah masyarakat. Perang yang bermula dari sikap arogan Belanda itu menimbulkan korban jiwa dan harta yang paling menyedihkan. Dua ratus tahun setelah perang, nama Diponegoro tetap memberi semangat bagi bangsa Indonesia.

MENURUT catatan sejarah, Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Ia lahir dari pasangan R.A. Mangkorowati, perempuan dari Pacitan, dan Gusti Raden Mas Surojo. Mas Surojo kelak menjadi Raja Yogyakarta dengan gelar Hamengku Buwono III.

Semasa kecil, Diponegoro bernama Raden Mas Mustahar. Nama ini selanjutnya berganti menjadi Raden Mas Ontowiryo. Ia pun memiliki nama Islam, yakni Ngabdul Kamid. Ketika ayahnya, Mas Surojo, naik tahta, Diponegoro kecil diwisuda sebagai pangeran dengan nama Pangeran Haryo Diponegoro.

Meski hidup bergelimang kemewahan, namun Diponegoro menolak keinginan ayahnya untuk meneruskan kekuasaannya. Alasannya, ibunya bukan permaisuri.

Dalam perjalanan hidupnya, Diponegoro dikenal sebagai sosok pribadi yang cerdas, gemar membaca, dan ahli di bidang hukum Islam-Jawa. Disebutkan dia lebih tertarik pada masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan keraton. Ia suka membaur dengan rakyat. Hidupnya lebih banyak dihabiskan di Tegalrejo. Daerah ini dekat dengan kediaman eyang buyut putrinya, Gusti Kangjeng Ratu Tegalrejo, permaisuri Sultan Hamengkubuwono I.

Sisi kehidupan lain dari seorang Diponegoro adalah dia suka siri dan rokok sigaret Jawa yang dilinting dengan tangan. Sebagai orang Jawa, ia pun gemar bersemedi di Selarejo dan Selarong. Pengaruh Belanda yang kuat pada masa itu membuatnya juga suka pada roti bakar, kentang yang dimakan dengan campuran sambal dan keripik singkong.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dia mulai memikirkan dan menaruh perhatian urusan keraton saat dipilih menjadi salah satu anggota perwalian untuk mendampingi Sultan Hamengku Buwono V (1822) yang saat itu baru berusia 3 tahun. Karena usianya masih

balita maka urusan kekuasaan keraton diserahkan ke Patih Danureja dan Residen Belanda. Sistem pengendalian seperti itu ditolak oleh Diponegoro.

Pada usia 27 tahun, Diponegoro menikah



dengan Raden Ayu Retno Madubrongto. Perempuan ini merupakan anak dari Kiai Gede Dadapan. Dari pernikahan ini lahir seorang anak. Selanjutnya, tepatnya 27 Februari 1807, ia menikah kembali dengan Raden Ajeng Supadmi. Supadmi merupakan putri Raden Tumenggung Notowijoyo III. Notowijoyo adalah Bupati dari Panolan Jipang. Diponegoro mau menikah kembali, karena atas permintaan ayahnya, Sultan Hamengku Buwono III. Dari perkawinan itu lahir anak yang dinamakan Pangeran Diponegoro.

Menurut sejarah, Perang Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro yang terjadi pada 1825-1830 merupakan perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah di Indonesia. Korban tercatat 8.000 orang

Pamannya, GPH Mangkubumi, menyarankan agar Diponegoro meninggalkan Tegalrejo dan mencari markas perlawanan di Gua Selarong. Dalam mendeklarasikan perang kepada kolonial, Diponegoro menyatakan, perang yang dilakukannya adalah Perang Sabil, perang melawan kaum kafir. Perang yang dikumandangkan itu berpengaruh luas hingga ke Kedu, Bagelen, Surakarta, Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya.

Dalam Perang Sabil, Diponegoro didampingi sosok-sosok yang menjadi panglima perang dan pengikutnya yang setia. Mereka adalah Kiai Modjo, SIKS Pakubuwono VI,

Selarong. Alasan Kiai Modjo mau bergabung dengan Diponegoro karena ingin mendirikan keraton atau kekuasaan yang berlandaskan pada agama Islam. Faktor lain yang membuat Kiai Modjo mau bergabung dengan Diponegoro dengan alasan mereka adalah kerabat. Ibu Kiai Modjo, R.A Mursilah merupakan saudara perempuan dari Sultan Hamengku Buwono III.

Sedang Sentot Prawirodirdjo merupakan putera dari Ronggo Prawirodirjo III, Bupati Montjonegoro Timur. Prawirodirjo merupakan ipar Sultan Hamengku Buwono IV. Dalam catatan sejarah yang ada, Sentot bergabung dengan Diponegoro pada 28 Juli 1826. Sumber lain mengatakan, Sentot bergabung saat berumur 17 tahun atau pada Agustus 1825 di Selarong.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200 ribu orang Jawa, serta kerugian materi 25 juta Gulden.

Kenapa bisa terjadi peperangan? Kisahnya, bermula ketika pemerintah kolonial Belanda memasang patok-patok di atas lahannya di Tegalrejo. Tidak hanya itu, sikap dan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat, serta mengeksploitasi rakyat dengan pajak yang tinggi membuat Diponegoro semakin tak suka dan muak, hingga muncul sikap perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Dan, sikap Diponegoro itu rupanya mendapat dukungan dari banyak pihak.

Raden Tumenggung Prawirodigdoyo, Sentot Prawirodirdjo, Kerto Pengalasan, Kiai Imam Rafi'l (Bagelen), Kiai Imam Nawawi (Ngluning Purwokerto), Kiai Hasan Basori (Banyumas), dan puluhan kiai lainnya, serta abadinya Joyo Suroto dan Bathnengwareng. Bahkan putranya, Bagus Singlon atau Ki Sodewa, ikut melakukan perlawanan di Kulonprogo dan Bagelen.

Dari sosok yang membantu Diponegoro dalam peperangan, Kiai Modjo dan Sentot Prawirodirdjo, paling banyak disebut. Dalam catatan yang ada, Kiai Modjo adalah kiai dari Surokarto. Ia ikut Diponegoro sejak di Gua

Sentot ditunjuk menjadi panglima setelah ada pesan dari Gusti Basah, panglima perang Jawa yang gugur pada Agustus 1828. Gusti Basah meminta pada Diponegoro agar menunjuk Sentot sebagai penggantinya. Gusti Basah tidak salah menunjuk Sentot sebagai pengganti. Dalam suatu peperangan di Progo Timur, 5 September 1828, ia berhasil memukul mundur tentara Sollewijn. Tak hanya itu, kecemerlangan Sentot di medan laga. Dan, terbukti beberapa minggu kemudian, ia mampu mengalahkan tentara Belanda di Bagelen dan Banyumas. □

AWG/dari berbagai sumber

Hj. Tati Sholihah

Pimpinan Ponpes Roudhotul Muta'alimin Cianjur

Banyak Santri Butuh Bantuan di Masa Pandemi

PANDEMI Covid-19 yang tengah melanda Indonesia sangat menyusahakan rakyat, terutama rakyat kecil, termasuk para anak-anak yatim piatu yang belajar di pesantren, tak terkecuali di pesantren saya ini.

Mereka sangat membutuhkan bantuan serta dukungan, terutama dari pemerintah. Anak-anak santri ini juga adalah generasi muda bangsa yang menjadi harapan bangsa dan calon-calon pemimpin bangsa juga mesti diperhatikan.

Bantuan yang diharapkan, terutama masalah kesehatan, jika ada santri yang terpapar virus. Dukungan lainnya adalah permudah dan perbanyak beasiswa untuk santri yang ingin melanjutkan pendidikan. Banyak santri yang terpaksa putus pendidikan, dan ada juga yang mengurungkan niatnya melanjutkan pendidikan karena masalah biaya.

Saya harap beasiswa pendidikan mesti diperluas dan dipermudah, terutama di masa pandemi ini. □

DER



Tubagus Alex Solihin

Ketua Karukunan Warga Bogor

Anak Muda Harus Kenal Pancasila

SEBAGAI generasi muda Indonesia, saya merasa soal pemahaman Pancasila itu harus ada dan harus kental. Sebab, Pancasila itu merupakan ideologi kita sebagai bangsa Indonesia. Sangat miris jika mengaku sebagai generasi muda Indonesia tapi kelakannya jauh dari Pancasila.

Namun, memang saya akui masih banyak anak muda yang kurang memahami Pancasila. Mungkin karena beberapa sebab, antara lain karena tidak tahu memahami Pancasila melalui apa, melalui media apa, atau terlalu sibuk dengan duaniannya sendiri.

Makanya, kami bersyukur ketika ada pejabat negara, seperti Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyambangi kami untuk melakukan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kami menyambut dengan antusias, karena akan menambah ilmu kami soal nilai-nilai luhur bangsa itu.

Kami harap lembaga negara tak bosan-bosan mendatangi rakyatnya untuk berdialog dan menyampaikan segala sesuatu tentang negara, sehingga rakyat kecil akan bertambah wawasannya, dengan demikian diharapkan akan semakin cinta kepada negara. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Politik Bebas Aktif Indonesia di Kancah Dunia

Politik luar negeri Indonesia disinyalir oleh masyarakat mulai mendekati ke salah satu kekuatan dunia. Hal ini menimbulkan kerisauan tidak hanya di dalam negeri, tapi negara berpengaruh lainnya juga mengingatkan Indonesia agar tidak condong ke salah satu kekuatan dunia. Benarkah politik Indonesia sudah mulai mengarah pada salah satu kekuatan dunia? Berikut pendapat anggota MPR sesuai dengan komisinya di DPR.

Sugiono, Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra

Kerjasama Dengan Siapa Saja Selama Berpihak pada Kepentingan Nasional

MENURUT saya, kunjungan Perdana Menteri Jepang dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke Indonesia beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa kedua negara tersebut masih menganggap Indonesia sebagai sebuah negara yang peranannya sangat strategis di wilayah ini. Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia yang memiliki jumlah penduduk ke-empat terbanyak di dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang besar, baik di daratan maupun di perairannya. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki kurang lebih 14 jalur pelayaran penting sebagai jalur perdagangan yang memiliki nilai dan posisi yang sangat strategis bagi perdagangan dunia.

Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Indonesia tersebut tentu saja menarik banyak pihak untuk dekat dengan Indonesia, baik dalam rangka menjaga kepentingan nasional negara-negara tersebut maupun untuk menjaga kestabilan di kawasan ini.

Perdana Menteri Jepang dalam kunjungannya ke Indonesia menyampaikan bahwa Jepang ingin meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai sektor, terutama dalam hal penanganan pandemi, pembukaan travel corridor, dan peningkatan investasi di Indonesia, terutama di bidang infrastruktur. Jika dilihat dari perspektif ini, keinginan Jepang untuk menjadi mitra strategis Indonesia dengan meningkatkan nilai investasinya di Indonesia memiliki alasan yang sangat kuat.

Jumlah penduduk negara kita merupakan potensi besar yang tidak bisa dinafikan. Pemerintah saat ini menitik beratkan pembangunan infrastruktur di mana banyak



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kesempatan bagi negara lain untuk berinvestasi. Selain itu kita juga perlu kerjasama yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia di bidang penguasaan teknologi, di mana Jepang memiliki keunggulan tersebut. Hal ini senada dengan program pemerintah untuk meningkatkan keunggulan di bidang sumber daya manusia.

Investasi Jepang di Indonesia hingga saat ini bernilai US\$ 1.2 milyar mendudukkan Indonesia di urutan ke-empat dari negara-negara tujuan investasi Jepang, di bawah Singapura dan Cina. Dengan potensi yang jauh lebih besar daripada Singapura, melakukan investasi di Indonesia tentu saja masih sangat potensial bagi Jepang, dengan syarat bahwa budaya dan iklimnya mendukung, baik secara hukum maupun politik.

Menurut saya, hal ini merupakan keinginan yang sifatnya paralel dengan kepentingan nasional Indonesia. Kita ingin menjadi bagian dari masyarakat dunia yang beradab dan

diakui serta dihargai dalam pergaulan Internasional. Apa yang ditawarkan oleh Jepang membuka kesempatan yang lebih besar untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, terutama dalam kaitannya dengan penanganan Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Ini adalah gesture yang harus kita sambut baik. Kita harus membuka peluang dan kesempatan yang lebih besar bagi Jepang untuk berinvestasi di Indonesia, dan langkah ini juga harus kita lakukan untuk negara-negara lain. Kita harus menciptakan iklim dan budaya yang mendukung untuk investasi negara mana pun dalam rangka memperbaiki keadaan ekonomi kita, khususnya setelah terpaan Pandemi Covid19 ini.

Seperti juga telah saya sampaikan di atas bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki nilai strategis dalam alur pelayaran dan perdagangan dunia. Posisi ini adalah posisi tawar yang memiliki nilai tinggi bagi Indonesia, sejauh kita bisa menjaga dan memanfaatkannya dengan baik dan tidak terlibat dalam konflik yang justru akan merugikan kita.

Kebebasan berlayar di perairan Indonesia ini pula yang dianggap Amerika Serikat sebagai sebuah posisi yang harus tetap terjaga. Kegusaran Amerika Serikat terhadap hegemoni RRT di perairan Laut Tiongkok Selatan membuat mereka merasa perlu untuk tetap meyakinkan negara-negara di kawasan ini untuk tetap netral dan menjunjung kemerdekaan bernavigasi, sehingga perdagangan internasional melalui perairan di kawasan ini tetap dapat berlangsung dengan baik.

Secara obyektif saya kira kita harus dekat dan berteman dengan siapapun demi

kepentingan nasional dan tujuan bernegara kita. Politik luar negeri kita yang bebas dan aktif adalah sebuah perangkat untuk melakukan berbagai upaya, mulai dari dialog hingga kerjasama yang lebih dalam di berbagai bidang. Satu hal yang harus kita pegang adalah bahwa sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan arah kebijakan politik dalam dan luar negerinya sendiri sesuai dengan kepentingan nasional kita. Indonesia bebas membuka berbagai hubungan, baik bilateral maupun multilateral, dengan negara-negara lain dengan prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing. Tentu saja kebebasan tersebut tidak akan kita miliki jika kita tidak memiliki kekuatan, baik

kekuatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun kekuatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan bangsa dan wilayah negara kita.

Atas dasar itulah kita membangun hubungan baik dengan negara manapun sepanjang hal tersebut berpihak pada kepentingan nasional kita. Oleh karena itu, kita perlu hubungan yang baik dengan negara-negara lain di sekitar kita, di kawasan Asia Tenggara ini dan juga dengan berbagai negara di kawasan lain.

Jika kita melihat dari perspektif ekonomi, nilai investasi dari Tiongkok pada kuartal keempat tahun 2019 dan kuartal pertama tahun 2020 berjumlah US\$ 2.7 miliar. Namun, di sisi lain dalam perspektif yang sama, nilai

investasi Amerika Serikat di Indonesia juga meningkat 18.7% menjadi US\$ 12.2 miliar di tahun 2019, dan mereka memproyeksikan peningkatan investasi dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Apa yang bisa kita tarik dari contoh ini. Bahwa Indonesia memiliki keunggulan bagi investasi asing di Indonesia, baik dari Tiongkok maupun dari Amerika Serikat, adalah dua raksasa ekonomi dunia yang saat ini mempunyai pengaruh yang besar.

Sekali lagi, saya kira kita harus dekat dengan negara manapun, sepanjang kepentingan nasional kita bisa terakomodir, dan posisi kita sebagai negara berdaulat juga harus dihormati dan dihargai. □

AWG

H. Abdul Kharis Almasyhari, Anggota MPR Fraksi PKS

Politik Luar Negeri Indonesia Masih dalam Koridor Bebas Aktif

PIDATO kemenangan Joe Biden dalam Pemilu Presiden Amerika Serikat membawa angin segar bagi dunia, karena menyerukan persatuan bagi rakyat Amerika dan juga berimplikasi bagi dunia, termasuk Indonesia. Joe Biden menyerukan persatuan dan meminta para pendukungnya untuk “stop memperlakukan lawan sebagai musuh.” Meski seruan itu untuk warga Amerika, saya berharap juga untuk warga dunia agar kedamaian di seluruh kawasan yang selama Trump memimpin Amerika, dunia penuh dengan ketegangan dan gesekan.

Saya mengucapkan selamat kepada warga Amerika yang menyuguhkan demokrasi dan proses pemilu yang dapat dikatakan lebih baik dari Tanah Air, karena perhitungan yang cepat dan terbuka. Selamat kepada seluruh warga Amerika yang telah menyuguhkan pesta demokrasi yang akuntabel, transparan, dan fair sejauh ini bagi seluruh warga dunia. Dan, selamat mendapatkan presiden baru, Joe Biden, semoga membawa kebaikan bagi semua.

Dalam politik luar negerinya, Amerika di bawah kepemimpinan Biden akan tetap menjadikan Indonesia sebagai salah satu andalan Amerika di Asia Tenggara, apalagi terkait dengan ketegangan di Laut Cina Selatan. Joe Biden akan mengandalkan sekutunya di Asia Tenggara dalam berbagai isu keamanan, dan Indonesia menjadi negara yang dipandang penting sebagai negara terbesar di ASEAN untuk membuat kawasan Asia Tenggara tetap kondusif, terutama berkaitan dengan isu Laut Cina Selatan.



Peluang ini bisa Indonesia manfaatkan untuk menjalin kerja sama bilateral dengan Amerika di bidang pertahanan, seperti persediaan senjata dan pelatihan militer bagi TNI. Semua bisa menguntungkan Indonesia, dan itu tergantung dengan upaya diplomasi yang dijalankan Pemerintah Indonesia dalam mengikat kerjasama yang terbaik untuk Republik Indonesia.

Dalam menjalankan kebijakannya di dunia internasional atau politik luar negeri, Indonesia menganut prinsip politik bebas dan aktif. Bebas diartikan bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru, dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Sementara aktif, artinya Indonesia tidak tinggal diam saja, tapi aktif dalam hubungan internasional dalam

rangka mewujudkan ketertiban dunia. Dengan politik bebas aktif, Indonesia bisa menentukan arah, sikap, dan keinginan sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Untuk politik luar negeri kita selalu berjalan di atas rel yang ada. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas-aktif bertumpu pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional, UUD NRI Tahun 1945, yang merupakan dasar hukum tertinggi negara Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideologi Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional.

Sementara kepentingan nasional Indonesia secara umum sudah tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam konstitusi tersebut, kepentingan nasional Indonesia adalah sebagai berikut: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Saya kira politik luar negeri kita masih dalam koridor yang ada. Kedatangan Perdana Menteri Jepang dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu, apakah menunjukkan mereka risau ketika melihat Indonesia dekat dengan Cina? Saya kira justru kedatangan mereka adalah bentuk politik luar negeri bebas aktif Indonesia. □

AWG

Sosialisasi di Pandeglang, Banten

Empat Pilar Hasil Ijtihad Kiai dan Alim Ulama



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar dan bersilaturahmi serta temu tokoh kebangsaan dengan alim ulama, santri dan anggota Banser Nahdlatul Ulama di Pandeglang, Banten. Dalam sosialisasi di Pondok Pesantren Mathla'un Nawakartika, Jazilul Fawaid mengungkapkan, dari sejarah kebangsaan Indonesia, Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) sesungguhnya merupakan hasil ijtihad para kiai dan ulama. Karena itu, warisan nilai-nilai Empat Pilar itu tetap harus diperjuangkan.

"Empat Pilar adalah warisan nilai-nilai yang menjadi ijtihad para kiai dan alim ulama. Empat Pilar itu hasil ijtihad. Apa yang sudah final ini, yaitu Empat Pilar, harus terus diperjuangkan," katanya di Pondok Pesantren Mathla'un Nawakartika, Kecamatan Citata, Kabupaten Pandeglang, Kamis (8/10/2020).

Sosialisasi yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan PCNU (RMI NU/Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama) Kabupaten Pandeglang ini dihadiri anggota MPR Rano Alfath, Pimpinan Pondok Pesantren, Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang, Rois Syuriah PCNU.

Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, menyebut, Empat Pilar sudah final dan harus diperjuangkan terus. Karena itu, jika ada orang atau

kelompok yang ingin mengganti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika seperti sedang "ngelindur". "Karena itu, para pemimpin dan kita semua harus memahami Empat Pilar," ujarnya.

Gus Jazil menambahkan, Empat Pilar itu membuat Indonesia masih berdiri tegak. "Jadi Empat Pilar menjadi syarat tegaknya negara Indonesia. Kalau tidak ada Empat Pilar maka roboh negara ini, karenanya Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di kalangan NU disebut PBNU (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD NRI Tahun 1945) membuat Indonesia kokoh," papar politikus PKB ini.

Gus Jazil juga mengungkapkan, peran Nahdlatul Ulama (NU). "Bisa dilihat peran ulama dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Kalau tidak ada peran kiai dan ulama, bangsa ini tidak merdeka," tuturnya.

Dia juga mengatakan, di kalangan kiai dan santri sudah ditanamkan cinta Tanah Air sebagian dari iman, hubbul wathon minal iman. "Itu yang dikatakan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari. Jadi, bagi NU, agama dan nasionalisme itu tidak bertentangan. Bahwa cinta kepada Tanah Air adalah bagian dari iman. Karena itulah Indonesia bisa merdeka. Tanpa pemahaman itu, kita tidak akan merdeka. Indonesia



tidak mengalami masalah seperti negara-negara lain yang masih belum menemukan rumus antara agama dan negara,” jelasnya.

Resolusi jihad, lanjut Gus Jazil, mendorong gerakan kepahlawanan 10 November di Surabaya. “Semua itu didasari perjuangan para kiai dan santri. Sebab, saat itu, Indonesia belum mempunyai tentara. Dengan resolusi jihad umat Islam wajib melawan penjajah,” katanya. Akhirnya resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 diperingati sebagai Hari Santri.

Hindari Transaksional dalam Pilkada

Sementara itu dalam Halaqoh Kiai Muda MDS Rijatul Ansor Pandeglang dan Temu Tokoh Kebangsaan di Pondok Hufadz Manba’ul Qur’an, Labuan, Pandeglang, pada hari yang sama, Gus Jazil menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada)

adalah bagian dari demokrasi untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk daerah. Namun, seringkali Pilkada menghasilkan pemimpin yang kemudian hari bermasalah. Ini disebabkan karena ketika pemilihan masih diwarnai dengan transaksional, seperti money politics.

“Demokrasi justru bukan menjadi alat untuk mempercepat kita menuju kesejahteraan, tapi demokrasi menjadi ganjalan. Bukan demokrasinya yang salah, tetapi eksekusinya yang salah,” katanya.

Menurut Gus Jazil, demokrasi yang masih diwarnai transaksional disebabkan masyarakat masih belum cerdas, masih belum sejahtera, sehingga mudah terpengaruh money politics. “Demokrasi kita seringkali dibajak,” ujarnya.

Gus Jazil menambahkan, demokrasi di Indonesia cukup mahal. Untuk menyelenggara-

kan Pilkada di Kabupaten Pandeglang, misalnya, membutuhkan dana sekitar Rp 56 miliar. “Demokrasi kita kadang-kadang dibajak dengan transaksional. Sudah repot-repot memilih bupati, hasilnya cuma seperti pasar malam. Ini menjadi keprihatinan kita semua,” tandasnya.

Karena itu, Gus Jazil mengajak kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama yang menghadiri halaqah ini untuk menghindari transaksional dalam pemilihan kepala daerah. “Di NU janganlah ada transaksional. Demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada tidak bertentangan dengan Alquran. Yang bertentangan adalah kegiatan-kegiatan dalam Pilkada yang sifatnya curang,” kata politikus PKB ini.

Sebelumnya, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pemuda Ansor Kabupaten Pandeglang di Gedung KPRI Amanah Cikedal,

Sosialisasi Ikadi Cilegon, Banten

Tidak Sulit Memahami dan Melaksanakan Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PANCASILA digali dari masyarakat Indonesia dan dirumuskan oleh para Bapak Bangsa Indonesia. Karena itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa sesungguhnya tidak sulit untuk memahami Pancasila dan melaksanakan atau menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara.

“Pancasila lahir dari bangsa Indonesia sehingga memahami Pancasila sesungguhnya tidak rumit dan melaksanakan Pancasila juga tidak sulit,” kata Hidayat Nur Wahid dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Cilegon, Banten, Senin (5/10/2020). Sosialisasi Empat Pilar MPR diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Ikadi Kota Cilegon juga menghadirkan narasumber anggota MPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Menurut Hidayat Nur Wahid, Pancasila telah disiapkan oleh Bapak Bangsa yang di antaranya terdiri dari para tokoh ulama, tokoh Ormas, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, Masyumi, dan lainnya. “Sehingga wajar bila Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjaga NKRI dan mengisi kemerdekaan Indonesia,” ujarnya.

“Di antara mereka yang terlibat menyiapkan Pancasila adalah para tokoh bangsa, termasuk juga dari umat Islam. Maka tidak mungkin Pancasila menghadirkan mudharat,” sambungnya.

Hidayat menyebut adanya kata atau ungkapan dalam bahasa Arab dalam sila-sila Pancasila. Dia memberi contoh: kata adil, musyawarah, yang berasal dari bahasa Arab, sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia. “Pancasila tidak menggunakan bahasa Inggris, atau Perancis, atau bahasa Sansekerta. Tetapi menggunakan bahasa Indonesia yang dipahami rakyat Indonesia,” ujarnya.

Hidayat juga menyebutkan tiga tokoh dari Banten yang terlibat dalam BPUPK untuk mempersiapkan Indonesia merdeka dan menyiapkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. “Ada tiga nama besar dari Banten ikut memperjuangkan Indonesia merdeka, menyiapkan Pancasila termasuk UUD 1945,” katanya.

Ketiga nama itu adalah Prof. Dr. Husein Djajadiningrat. “Beliau anggota BPUPKI yang juga tokoh dari Banten. Beliau orang pribumi pertama yang mendapat gelar doktor dan

guru besar,” paparnya.

Kedua, meester Maria Ulfah Soebadio. “Beliau tokoh perempuan Indonesia yang pertama mendapatkan gelar sarjana hukum di Belanda,” sebut Hidayat.

Ketiga, Ki Fatah Hasan. “Beliau tokoh dari Banten yang berlatar belakang pesantren Al Azhar. Anggota BPUPKI yang menyiapkan Indonesia merdeka. Beliau aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia,” terang Hidayat.

Dengan latar belakang sejarah itu, lanjut Hidayat, Pancasila bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar.



“Misalnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika dilaksanakan dengan baik dan benar maka kita akan menolak paham komunisme, atheisme, liberalisme, LGBT, karena pasti tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila,” katanya.

“Begitu pun tindakan vandalisme yang dilakukan seorang pemuda di Tangerang, melakukan corat coret, menyobek-sobek Alqur’an. Dia pasti tidak paham Pancasila,” imbuhnya.

Hidayat mengajak warga Banten untuk tampil di garda depan membela Pancasila apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ideologi negara itu. “Dengan memahami latar belakang Pancasila, warga Banten bisa maju ke depan untuk mengoreksi bila ada penyimpangan terhadap Pancasila,” ucapnya. □

BSC

Temu Tokoh Kebangsaan di Sukabumi

Pesantren Tempat Belajar Calon Pemimpin Bangsa

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H. Syarifuddin, SE., MM., MBA., menyangkan anggapan segelintir orang yang masih suka mendiskreditkan peran pondok pesantren. Seperti, misalnya, ada menyatakan bahwa pondok pesantren menjadi tempat pendidikan bagi calon teroris. Ada juga yang menyebut pondok merupakan tempat buangan anak-anak yang tidak berprestasi.

Anggapan seperti itu, menurut Syarif Hasan, adalah bentuk pemikiran yang keliru dan menyesatkan. Apalagi jika menengok sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana pondok pesantren berperan besar dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terutama menyangkut peran santri dan ulama yang ikut melawan penjajah.

“Yang benar adalah pondok merupakan tempat belajar bagi cikal bakal pejuang serta pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pondok pesantren juga menjadi tempat menimba ilmu bagi para calon pemimpin bangsa di masa depan. Dulu sebagian pejuang adalah ulama dan santri yang belajar di pesantren. Sekarang banyak alumni pondok yang menjadi pemimpin bangsa ini,” ujar Syarif Hasan.

Syarief Hasan menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara tunggal pada acara Temu Tokoh Kebangsaan, yang berlangsung di Pondok Pesantren An Nidzom Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (22/10/2020). Ikut hadir pada acara tersebut anggota Fraksi Partai Demokrat MPR RI M. Muraz, Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami, dan Pengasuh Ponpes An-Nidzom Kota Sukabumi KH. Abdullah Mukhtar.

Pesantren, kata Syarif Hasan lebih lanjut, memiliki materi pelajaran yang lengkap. Selain pelajaran umum dan agama, para santri juga mendapat pelajaran ketrampilan serta akhlak mulia. Bahkan pesantren juga mengajarkan sistem tatanegara.

“Terbukti banyak juga santri yang mengetahui sistem ketatanegaraan kita, termasuk



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mengerti tentang tugas dan fungsi MPR. Jika pengetahuan ini terus dipoles akan menjadi bekal yang bagus bagi para santri di masa yang akan datang. Karena itu, bagi para orangtua, kalau anaknya mau maju, jangan segan-segan menyekolahkan anak-anaknya di pesantren,” kata Syarif Hasan.

Sebelumnya, pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren An Nidzom Kota Sukabumi, KH. Abdullah Mukhtar, menyatakan terimakasih atas kunjungan Wakil Ketua MPR ke pondok

pesantrennya. Kunjungan itu sangat membahagiakan, baik bagi dirinya maupun para santri. Khusus bagi santri, bisa memetik pelajaran, sekaligus mengenal wakilnya di MPR RI dan pimpinan MPR.

“Semoga silaturahmi ini terus berlanjut, untuk saling meningkatkan persaudaraan dan merekatkan hubungan pemimpin dengan rakyatnya,” harap Abuya KH. Abdullah Mukhtar. □

MBO



Sosialisasi di Desa Setu, Tangsel

Generasi Muda Harus Jadi Agen Keutuhan NKRI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Taufiq Basari, SH., S.Hum., LL.M., mengingatkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas kesepakatan yang dibangun secara bersama oleh seluruh golongan dan kelompok masyarakat yang ada saat itu. Karena itu, kesepahaman bersama tersebut harus senantiasa dipupuk suburkan, agar langgeng, tidak gampang dirusak oleh siapapun.

“Kesepakatan mendirikan NKRI ini didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali generasi muda. Bahkan, generasi muda harus mampu menjadi agen keutuhan NKRI dengan selalu mempererat persatuan dan kesatuan, juga menghalau masuknya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,” ujar Taufiq Basari.

Pernyataan itu disampaikan Taufiq Basari saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan masyarakat Desa Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Sabtu (31/10/2020). Sosialisasi Empat Pilar itu terselenggara berkat kerjasama MPR dengan Komunitas Merah Putih Perumahan Puri Serpong 1, Tangsel. Acara yang berlangsung di

kompleks Perumahan Puri Serpong 1 Tangsel itu bertema: Implementasi Nilai-nilai Pancasila untuk Restorasi Indonesia.

Sebelum merdeka, kata Taufiq Basari, Indonesia berbentuk suku-suku bangsa, kelompok masyarakat, dan kerajaan. Kelompok-kelompok komunitas masyarakat itu hidup secara bersama dengan peran masing masing. Lalu, datanglah utusan dagang dari Belanda. Semula, niat mereka (Belanda) hanyalah untuk berdagang, tapi kemudian memonopoli perdagangan dan melakukan penjajahan.

“Hidup di bawah penjajahan itu ternyata tidak nyaman. Karena itu tumbuhlah kesadaran untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah. Namun, perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan selalu gagal, lantaran perjuangan yang dilakukan bersifat sektoral,” ungkap Taufiq.

Namun, lanjut Taufiq, setelah berkali-kali gagal maka timbullah kesadaran kolektif, mereka berjuang bukan untuk kelompoknya sendiri-sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Kesadaran kolektif para pendiri bangsa ini muncul bersamaan dengan lahirnya politik etik yang digagas pemerintah Belanda. Salah satu kesadaran kolektif itu

muncul dalam bentuk Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Sumpah Pemuda melihat bahwa keberagaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, dan ras yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan. Perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia harus dijaga dan dilestarikan. Karena keberagaman itu bukan untuk memecah belah, tapi untuk mempersatukan.

“Sejak itu muncullah kebesaran jiwa di kalangan para pendiri bangsa untuk saling berkorban demi kepentingan yang lebih besar,” ujar Taufiq lagi.

Salah satu bukti pengorbanan dan kesepakatan yang ditunjukkan para pendiri bangsa adalah diterimanya Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia.

Menurut Taufiq, lepasnya tujuh kata dari sila pertama Piagam Jakarta, sehingga terbentuknya Pancasila seperti yang ada saat ini, merupakan bentuk pengorbanan yang harus terus ditumbuhkembangkan dan selalu dilestarikan di bumi Indonesia. Pancasila hasil pengorbanan dan kesepakatan besar para pendiri bangsa itu tidak boleh diganti dengan ideologi dan dasar negara lain. □

MBO

PSB Jombang, Jawa Timur

Pesan Empat Pilar MPR Lewat Seni Budaya Kidung Jenaka



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak surut melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di tengah pandemi Covid-19. Seperti pagelaran seni budaya daerah dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR di Balai Tani Bareng, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu malam (19/9/2020), yang memberlakukan penggunaan masker, menjaga jarak, dan disediakan tempat cuci tangan di beberapa titik.

Pagelaran seni budaya ini merupakan kerjasama MPR dengan Sanggar Seni Manunggal Laras dan pemerintah Kabupaten Jombang. Hadir dalam pagelaran seni budaya ini anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Sadarestuwati, wakil ketua Badan Penganggaran MPR Einino M. Hosein (Fraksi Partai Gerindra), Neng Eem Marhamah (Fraksi PKB), dan Intsiawati Ayus (Kelompok DPD), serta Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah. Pagelaran juga

dihadiri Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab, Wakil Bupati Sumrambah.

Pagelaran seni budaya ini menampilkan Tari Remo Boletan, yaitu tari tradisional yang berasal dari Jombang, parade lagu nusantara,

dan kidung jenaka yang berisi pesan-pesan Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Kidung jenaka yang tampil di akhir pagelaran cukup menarik perhatian. Banyolan dari Cak





Siti Fauziah



Sadarestuwati

Heru dan kawan-kawan membuat penonton tertawa terpingkal-pingkal. Di antara banyolan, cak Heru menyisipkan pesan Empat Pilar MPR.

Anggota MPR Sadarestuwati yang menjadi tuan rumah mengatakan, MPR secara masif melakukan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR. Sosialisasi tidak hanya dengan pertemuan menyampaikan materi, tetapi dengan berbagai kegiatan lain seperti sosialisasi Empat Pilar MPR yang dikemas dalam pentas pagelaran seni budaya. "Diharapkan apa yang disampaikan dan dikemas pada pagelaran seni daerah ini bisa mengena di hati masyarakat," ujarnya.

Sadarestuwati juga mengungkapkan kekuatan dari Empat Pilar MPR. "Tanpa Empat Pilar mungkin negara kita sudah terpecah belah. Karena ada Empat Pilar, sampai detik ini negara kita tetap utuh dalam bingkai NKRI," tuturnya.

"Karena itu jangan pernah punya pikiran lepas dari NKRI. Jika sudah punya pikiran lepas dari NKRI, punya pikiran tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, maka kehancuran ada di depan mata. Kita semua sepakat NKRI adalah harga mati," sambungnya.

Menurut Sadarestuwati, pagelaran seni budaya menjadi satu langkah untuk bisa menghidupkan kembali budaya-budaya bangsa dan budaya daerah. "Dengan menghidupkan seni budaya daerah maka otomatis perekonomian daerah bisa tumbuh. Kita harapkan sosialisasi Empat Pilar MPR melalui pagelaran seni budaya bisa diselenggarakan bersama-sama di berbagai daerah," ujarnya.

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab mengapresiasi sosialisasi Empat Pilar MPR

melalui pagelaran seni budaya yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Empat Pilar MPR ini untuk meneguhkan kita semua pada ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah yang harus kita pegang teguh sehingga kita senantiasa bisa bersatu dan menjaga persatuan," ujarnya.

Bupati mengungkapkan, Kabupaten Jombang memiliki berbagai macam seni tradisional, seperti campur sari, tari remo, tari kelono, dan topeng Jatiduwur Jombang, yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

Sementara itu Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah mengatakan, pagelaran seni budaya daerah di Jombang dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR ini cukup unik. "Atas inisiatif dari Ibu Sadarestuwati, pagelaran seni budaya malam ini di Jombang cukup unik. Selain dilakukan di halaman terbuka, pagelaran seni budaya

ini menggabungkan perpaduan musik gamelan dan musik modern. Tradisional dan modern. Juga melibatkan seniman yang paling senior hingga yang paling junior," katanya.

Siti Fauziah juga mengaku baru pertama kali mendengar lagu Indonesia Raya diiringi musik gamelan dalam pagelaran seni budaya ini. Beragam seni budaya Kabupaten Jombang yang ditampilkan dalam pagelaran ini menunjukkan seni budaya Jombang masih dilestarikan.

"Pelestarian seni budaya sudah dilakukan di sini. Ini juga menjadi salah satu tujuan MPR menggelar pagelaran seni budaya, yaitu untuk melestarikan seni budaya daerah. Kesenian ini bukan hanya sebagai tontonan dan hiburan, tetapi ada panutan di dalamnya. Mudah-mudahan pagelaran seni budaya ini bisa menghibur di tengah pandemi ini," harapnya. □

BSC



Sosialisasi di Sulawesi Tenggara

Ponpes, Tempat Belajar Para Calon Pemimpin Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DIHADAPAN para santri dan pengasuh Pondok Pesantren Minhajut Thulab, di Desa Andoolo Utama, Kecamatan Bike, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., mengapresiasi jerih payah para santri, yang terus-menerus belajar dengan giat. Mereka tak pernah merasa lelah belajar, karena belajar di pondok memang tidak ringan. Di pondok harus belajar ilmu dunia dan akhirat.

Dengan mengajarkan ilmu dunia dan akhirat, kata Gus Jazil, menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang lengkap dan berkualitas. Terbukti, banyak pemimpin bangsa lahir dan dibesarkan di pesantren. Selain itu, sejarah juga telah membuktikan, banyak santri dan ulama yang rela berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

“Sudah tak terhitung jumlahnya pemimpin bangsa yang lahir dari pesantren. Sudah sangat banyak santri dan ulama yang ikut berperang melawan penjajah. Ini menunjukkan bahwa pondok merupakan salah satu lembaga pendidikan yang cocok bagi para calon pemimpin bangsa,” kata Jazilul Fawaid.

Pernyataan itu disampaikan Gus Jazil saat bersilaturahmi dengan jajaran pondok pesantren Minhajut Thulab, Jumat (11/9/2020). Ikut hadir dalam acara tersebut pengasuh pondok Minhajut Thulab, KH. Wildan Habibi AR, S.Pd.I. Pada kesempatan

itu Gus Jazil mendapatkan kenang-kenangan dari pondok, berupa T-Shirt karya santri bergambar Presiden keempat, KH. Abdurrahman Wahid.

Gus Jazil yang sempat mengenyam pendidikan di pondok pesantren pada 1980-an itu menuturkan, untuk menguasai ilmu akhirat tidak mudah. Bahkan lebih sulit dibanding ilmu dunia. Apalagi untuk mempraktikkannya. Selain itu, ilmu akhirat akan selalu dibutuhkan dan berguna di mana saja.

“Ilmu akhirat menuntun kita untuk selalu mengingat Allah dan berbuat baik. Karena itu, ilmu akhirat sangat penting dikuasai oleh

setiap orang,” ujar Gus Jazil.

Dengan konsep pembelajaran ilmu dunia akhirat, Gus Jazil percaya keberadaan pesantren akan terus dibutuhkan. Apalagi, pondok sudah terbukti mampu menghasilkan pemimpin yang mampu menguasai ilmu dunia dan ilmu akhirat.

Pola pikir seperti itulah yang kini harus dipraktikkan oleh para pemimpin. Seorang pemimpin yang amanah tidak melulu memikirkan dunia, tapi pemimpin yang menjalankan tugasnya semata-nata karena Allah, dan itu banyak diajarkan dipondok pesantren.

“Jangan pernah berkecil hati, anak-anak





santri bisa menjadi apa yang dia cita-citakan. Dan, tidak kalah dengan anak-anak lain yang sekarang belajar macam-macam,” ujar Jazilul Fawaid.

Sosialisasi di Wakatobi

Masih di Sulawesi Tenggara, usai menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar di Desa Andoolo Utama, selanjutnya Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, melakukan kegiatan yang sama di Kabupaten Wakatobi. Di sini, peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR adalah keluarga besar GP Ansor Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dan, kegiatan berlangsung Sabtu (12/9/2020) di Aula Museum Taman Budaya Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.

Dalam paparannya, Jazilul Fawaid dengan mantap mengatakan, kalau di kalangan Nahdlatul Ulama, Empat Pilar MPR itu bukan

barang baru. Karena di lingkungan NU, Empat Pilar sering diplesetkan menjadi PBNU, yaitu: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD NRI Tahun 1945.

Karena itu, saat menyampaikan materi sosialisasi Empat Pilar di depan keluarga besar GP Ansor Kabupaten Wakatobi, Gus Jazil menekankan bahwa acara tersebut dimaksudkan untuk menyegarkan dan mengingatkan kembali terkait Empat Pilar MPR, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara.

“Negara itu mirip rumah tangga. Negara lahir setelah terjadi akad perjanjian antara rakyat dan pemimpinnya, tentang cita-cita dan dasar negara,” ungkap Gus Jazil. Bagi bangsa Indonesia, lanjut politisi PKB ini, akad

itu penetapan Pancasila sebagai pondasi dan dasar negara.

“Jadi, kalau ada yang tidak setuju berarti dia tengah berusaha membongkar pondasi dan dasar negara,” ujar Gus Jazil dalam acara sosialisasi yang dihadiri oleh Bupati Wakatobi, H. Arhawi, SE., MM., dan Ketua GP Ansor Wakatobi Hairudin Buton.

Gus Jazil juga menyinggung soal dipilihnya Wakatobi sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar. Alasannya, karena Wakatobi termasuk dalam 10 destinasi top Indonesia. Dalam waktu dekat, kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Buton itu akan menghadapi proses pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur. Karena itu, SDM perlu dipersiapkan agar kemajuan Wakatobi diikuti kemajuan di bidang budaya.

“Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan mengingatkan kembali akan pentingnya Empat Pilar agar budaya masyarakat Wakatobi jangan sampai keropos akibat tergerus proses pembangunan,” kata Jazilul Fawaid.

Sebelumnya, Bupati Wakatobi Arhawi dalam sambutannya menjelaskan, rencana pembangunan jembatan yang akan menghubungkan pulau Wangi-Wangi dengan Kapota. Jembatan yang panjangnya mencapai 2300 meter itu diharapkan memberi dampak besar bagi pembangunan sektor pariwisata di Kopata.

“Jembatan itu diharapkan memberi dampak yang signifikan. Karena banyak destinasi yang bisa dikembangkan, dan banyak fasilitas lain yang segera dibangun,” ungkap Arhawi. □

MBO



PSB Semarang

Lewat Festival Seni Pesan Empat Pilar Disampaikan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BERTEMPAT di sebuah wisma di Jl. Kyai Saleh Semarang, Jawa Tengah, Jum'at (30/10/2020), MPR menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Sosialisasi yang menggunakan metode Pagelaran Seni Budaya (PSB) ini menampilkan berbagai kesenian tradisional masyarakat Jawa Tengah, seperti tari sekar ningrat, tari topeng, serta tari bambangan cakil.

Acara pentas seni dengan tema "Festival Merawat Seni Tradisi 2020" ini dihadiri oleh Siti Fauziah, Kepala Biro Humas, Setjen MPR; Budi Muliawan, Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Biro Humas; dan inisiator acara Bambang Sadono, serta para undangan lainnya.

Bambang Sadono dalam sambutannya mengatakan, Sosialisasi Empat Pilar MPR lewat seni tari bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan. Menurut Ketua Badan Kajian MPR RI periode 2014 -2019 itu, Empat Pilar MPR RI perlu

disosialisasikan mengingat urgensinya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Mari kita jadikan Empat Pilar sebagai pegangan kehidupan sehari-hari," ajak Bambang. Karena, menurut Bambang, menjadikan nilai-nilai kebangsaan sebagai pegangan hidup sangatlah penting, apalagi bangsa Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi, yakni Pilkada serentak. "Dengan

Empat Pilar mari kita bentengi diri, jaga persatuan menghadapi informasi yang bisa memecah belah," tegasnya.

Di sela-sela acara sosialisasi itu, Bambang menyampaikan bahwa acara ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19. Untuk peserta yang tidak hadir langsung bisa mengikuti



acara ini secara virtual.

Selanjutnya, Bambang Sadono mengucapkan terimakasih kepada Sekretariat Jenderal MPR yang sudah menyelenggarakan pagelaran seni budaya dengan menampilkan tari sekar ningrat, tari topeng, serta tari bambangan cakil. “Selain untuk Sosialisasi Empat Pilar, pentas seni ini juga ikut membangkitkan kembali rasa persatuan serta nasionalisme

pada masyarakat”, imbuhnya.

Sementara Kepala Biro Humas MPR, Siti Fauziah, selaku pelaksana sosialisasi, menjelaskan bahwa MPR memilih pagelaran seni budaya sebagai salah satu metode sosialisasi dengan tujuan untuk ikut melestarikan seni budaya daerah agar jangan sampai punah.

Untuk itu, Siti Fauziah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bambang

Sadono yang sudah menjaga dan melestarikan seni budaya, dengan membina para generasi muda. Juga kepada semua yang hadir, Siti Fauziah berharap, agar ikut menjaga serta melestarikan seni budaya yang kita miliki. “Hal ini penting dilakukan, karena di dalam seni budaya, selain sebagai tontonan terdapat pula tuntunan, dan panutan,” ujar Siti Fauziah. □

JAZ

Sosialisasi KAMMI Mataram

Pemuda, Islam, dan Indonesia Tiga Simpul Penting Bangsa

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengajak para pemuda untuk turut aktif berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda tidak boleh hanya asyik bersenang-senang dengan dirinya sendiri. Atau terus tekun belajar tanpa peduli dengan kondisi sekitarnya. Karena pemuda memiliki kewajiban ikut berbakti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pemuda, Islam, dan Indonesia adalah tiga simpul penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah kita juga mencatat, peran ketiganya selalu kait-mengait antara satu dengan yang lain. Karena itu, penting untuk terus menguatkan tiga simpul kebangsaan agar ke depan Indonesia makin berjaya dan berdaulat,” ungkap Hidayat Nur Wahid dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR di kalangan anggota dan pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Mataram, Ahad (1/11/2020).

HNW, begitu Hidayat biasa disapa, menyampaikan pesan itu secara virtual di acara yang juga dihadiri oleh Anggota MPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, ST., dan Ketua Umum PD KAMMI Mataram, Arif Rahman.

Pendapat serupa juga disampaikan Anggota Fraksi PKS di MPR, Johan Rosihan. Selaku narasumber kedua, Johan Rosihan antara lain mengatakan, sejak dulu pemuda sudah terlibat aktif dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Ke depan, ke-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

terlibat serupa harus dipertahankan.

Pemuda tidak boleh kendor dalam mengawal kemajuan bangsa. “Indonesia merupakan rumah kita bersama yang harus dijaga. Sedangkan Pancasila adalah dasar berbangsa dan bernegara yang final,” ungkap Johan.

Dalam kesempatan itu, Johan juga menyebut, banyak sektor pembangunan yang membutuhkan keterlibatan para pemuda. Tetapi kesempatan tersebut hanya bisa diperoleh jika para pemuda mau menyiapkan diri dengan baik. Yakni, dengan meningkatkan kualitas diri, dan memanfaatkan kesempatan yang dimiliki secara optimal. Karena itu, Johan mengajak para pemuda untuk giat belajar dan tidak terlibat kegiatan yang tidak

bermanfaat.

Sebelumnya, dalam kata sambutannya, Ketua Umum PD KAMMI Mataram, Arif Rahman, menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kerjasama dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar ini. Sosialisasi yang diselenggarakan itu, menurut Arif, akan menguatkan komitmen KAMMI untuk terus mengawal Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Juga UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi negara.

“Pancasila sebagai sebuah ideologi harus menjadi identitas dan karakter anak-anak muda Indonesia, yang tak bisa ditawar-tawar lagi,” ujar Arif Rahman. □

MBO

Sosialisasi di Banten

Gus Jazil Lakukan Sosialisasi Empat Pilar di Tangerang Selatan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DIHADAPAN ratusan warga Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 19 Oktober 2020, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan bangsa Indonesia lahir dari hasil perjuangan para pahlawan melawan penjajah yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Dalam acara Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau lebih dikenal Empat Pilar MPR yang digelar di Pondok Pesantren Daarul Hikmah, Pamulang Barat itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan, di awal kemerdekaan, bangsa Indonesia selain memiliki Tentara Keamanan Rakyat (TKR)—merupakan cikal bakal TNI—di tengah masyarakat juga ada laskar-laskar.

Meski Indonesia sudah merdeka, namun Belanda lewat tangan Inggris ingin menguasai kembali Indonesia lewat Surabaya. Keinginan Belanda dan Inggris yang ingin kembali menjajah Indonesia, menurut Jazilul Fawaid,

direspon oleh para ulama, yakni Rais Akbar NU Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asya'ri, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan ulama besar lainnya dengan mendeklarasikan Resolusi Jihad, 22 Oktober 1945. Resolusi Jihad itu berisi, mewajibkan umat Islam, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang sudah akil baliq, yang berada dalam radius 94 km, wajib hukumnya dengan atau tanpa mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di medan laga. "Ini seruan melakukan jihad di medan pertempuran", ungkapnya. "Pada waktu itu musuhnya jelas, yakni Belanda dan Inggris", tuturnya.

Hari di mana Resolusi Jihad diserukan itulah, menurut pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu dijadikan oleh pemerintah menjadi Hari Santri, 22 Oktober. Hari Santri, makna dan momennya, dikatakan oleh alumni PMII itu tidak terlepas dari Empat Pilar. "Mempertahankan NKRI", ujarnya.

Saat ini kita hidup dalam masa kemerdekaan berkat perjuangan seluruh komponen masyarakat, ulama, dan santri. Masa kemerdekaan merupakan sesuatu yang nikmatnya luar biasa. "Saat ini kita nikmati hasil perjuangan para pahlawan," paparnya. Dia mengajak kepada semua untuk mengisi kemerdekaan, dengan melanjutkan warisan para pejuang, ulama, dan santri.

Di hadapan peserta sosialisasi yang mayoritas warga NU, Jazilul Fawaid yang biasa disapa Gus Jazil, mengungkapkan bahwa Resolusi Jihad merupakan bentuk kepedulian dari seluruh umat Islam. "Untuk itu Hari Santri menjadi hari bagi semua umat Islam", paparnya. Semangat Hari Santri mampu memperkokoh Indonesia. Resolusi Jihad juga merupakan wujud dari kepedulian umat Islam bagi keberlangsungan bangsa Indonesia.

"Jadi jangan dibentur-benturkan antara agama dan negara", ucap Gus Jazil. Santri,



lanjut Gus Jazil, merupakan sosok yang mampu mempertemukan antara nilai-nilai ke-Islam-an dan nasionalisme. “Saya mengajak kepada semua untuk memperkuat nilai-nilai kesanterian”, tegasnya. “Nilai kesanterian adalah rasa cinta Tanah Air”, tambahnya. Berjihad sesuai dengan Resolusi Jihad, menurut Gus Jazilul, perlu diteruskan namun musuh yang dihadapi saat ini adalah kemiskinan, kebodohan, dan korupsi.

Sebelum melakukan sosialisasi di Pamulang Barat, Jazilul Fawaid melakukan hal serupa di Ciputat Timur, juga di Tangerang Selatan. Hadir dalam sosialisasi yang bertema ‘Semangat Hari Santri dan Penguatan Empat Pilar MPR Untuk Indonesia Maju’ itu adalah anggota MPR dari Fraksi PKB, Mohammad Rano Alfath; Ketua GP Ansor Tangerang Selatan, Ahmad Fauzi; Ketua GP Ansor Ciputat Timur, Fauzul Arif; dan Rois Syuriah NU Ciputat Timur, KH. Imam Abda.

Di hadapan ratusan peserta yang mayoritas anak-anak muda, ia menuturkan, sosialisasi Empat Pilar MPR yang digelar ini merupakan rangkaian untuk memperingati Hari Santri, 22 Oktober. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kata Gus Jazil, Proklamasi 17 Agustus 1945, Deklarasi Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, dan pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945, merupakan satu rangkaian perjuangan. “Ada peristiwa besar di Indonesia yang terjadi dalam satu hentakan,” ungkap Wakil Ketua Umum DPP PKB itu.

Hari Santri, menurut Gus Jazil, sangat unik. “Di dunia yang memperingati Hari Santri hanya di Indonesia”, ungkapnya. Dia me-



negaskan bahwa Hari Santri bukan milik satu golongan, namun milik seluruh umat Islam. “Hari Santri adalah suatu semangat di mana agama bisa bertemu dengan paham nasionalisme,” ungkapnya. “Itu disebut santri”, tambahnya. Dari definisi itu, Gus Jazil yakin, santri tidak akan pernah berubah pikiran untuk mempertentangkan antara agama dan negara. Oleh sebab itu, dengan Hari Santri akan semakin menguatkan bahwa masalah antara agama dan negara sudah tuntas.

Ia membandingkan semangat perjuangan pada masa lalu dan masa sekarang. Pada masa perjuangan merebut kemerdekaan, menurut Gus Jazil, musuh bangsa ini jelas, yakni Jepang dan Belanda, sebagai penjajah”, ungkapnya. Karena musuhnya penjajah maka musuh yang dihadapi tampak di depan mata. “Kita berjuang di medan pertempuran untuk mengusir mereka”, ujarnya.

Dalam masa mengisi kemerdekaan, musuh bangsa ini tetap ada namun bukan musuh di medan pertempuran. “Musuh kita saat ini adalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan”, ungkapnya. “Sebab bentuknya tidak fisik sehingga susah menghadapinya,” tambahnya.

Mengisi kemerdekaan, menurut Jazilul Fawaid, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dia berharap, dengan semangat Empat Pilar dan Hari Santri, apa yang menjadi pekerjaan besar bangsa Indonesia seperti kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, bisa diselesaikan. Saat ini, Jazilul Fawaid menyatakan kecewa, karena bangsa ini justru lebih sibuk dengan masalah yang tidak produktif, seperti banyaknya hoaks. “Untuk itu kita perlu merenungkan kembali apa tujuan kita bernegara”, tegasnya. □

AWG

Temu Tokoh Nasional di Kota Metro, Lampung

Sikap Islamofobia dan Indonesiafobia Harus Diluruskan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KERUKUNAN dan persatuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia masih kerap terganggu. Penyebabnya, ada sebagian masyarakat yang masih terus menyimpan sikap Islamofobia dan Indonesiafobia di dalam hati mereka. Padahal baik Islamofobia maupun Indonesiafobia sama-sama berpotensi mencabik kerukunan dan persatuan.

Kriminalisasi yang sering menimpa para ulama adalah salah satu bukti bahwa Islamofobia masih tumbuh subur di bumi Indonesia. Mereka beranggapan bahwa Islam dan Indonesia tidak ada hubungannya. Mereka juga berkeyakinan bahwa para tokoh umat Islam diuntungkan karena kapasitasnya sebagai kelompok mayoritas. Padahal peran dan jasanya tidak sepadan dengan keistimewaan yang dinikmati.

Anggapan Islam dan Indonesia tak ada hubungannya adalah penilaian yang keliru, lantaran kurang mempelajari sejarah. Akibatnya, mereka tidak mengetahui betapa besar pengorbanan dan keterlibatan ulama serta umat Islam dalam perjuangan Indonesia," ujar Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., dalam acara Temu Tokoh Nasional/ Kebangsaan di Barakah Meeting Point (BMP) Jl. AH Nasution No.185, Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung,

Sabtu (14/11/2020).

Hidayat Nur Wahid, yang biasa disapa HNW, dalam acara itu hadir dan berbicara secara daring. Lebih lanjut, dia menegaskan, ketidaktahuan terhadap sejarah serta jasa para ulama pada NKRI haruslah segera diluruskan. "Agar kebencian itu tidak semakin berbahaya, bagaikan bara dalam sekam," ungkap HNW dalam acara yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Metro tersebut.

Begitu pula terhadap umat Islam, kata HNW, pelurusan juga perlu dilakukan. Terutama terhadap umat Islam yang masih memelihara sikap Indonesiafobia. Seperti Islamofobia, munculnya Indonesiafobia juga karena ketidakpahaman mereka pada sejarah. Juga karena keterbatasan mereka dalam memahami ajaran agama yang benar.

Faktor-faktor itulah, menurut HNW, membuat mereka beranggapan bahwa mereka dicap sebagai kafir, bid'ah, dan thagut. Padahal, NKRI adalah hasil jihad dan ijtihad para ulama. "Karena itu, sudah seharusnya jika umat Islam menjaga dan mempertahankan NKRI dengan baik. Bukan

malah mengabaikan, apalagi merusaknya," harap HNW.

Jadi, kedua kelompok, baik Islamofobia maupun Indonesiafobia, harus diluruskan agar tak mengulangi kesalahan. "Sebagai muallaf Pancasila dan muallaf NKRI mereka patut dituntun agar bisa lebih memahami Islam dan Indonesia dengan baik dan benar," ujar HNW.

Dalam kesempatan itu HNW juga menyinggung soal Pilkada serentak 9 Desember 2020. Hidayat mengingatkan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya secara bijaksana. Pilihlah calon yang jelas asal-usul dan pemikirannya. "Jangan memilih calon pemimpin yang tidak jelas kemampuan dan rekam jejaknya," tegas HNW seraya mengingatkan, jangan menukar hak pilih dengan sesuatu yang murah, karena kerugian dan penyesalan harus ditanggung selama lima tahun.

Acara Temu Tokoh Nasional ini, selain menghadirkan Hidayat Nur Wahid sebagai pembicara kunci, juga menampilkan dua narasumber lainnya, yakni Dharma Setiawan, MA., dosen Ekonomi Syariah IAIN Metro. Juga tampak hadir Ketua BKPRMI Kota Metro, Hadi Kurniadi, ST., MT., dan tokoh masyarakat Kota Metro Ustad Nasriyanto. □

MBO

Sosialisasi di Sulawesi Utara

Penguatan Empat Pilar dan Jaring Aspirasi

KEHADIRAN Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid di Kampung Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, pada 10 November 2020), disambut antusias oleh masyarakat. Kehadiran warga masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, ormas keagamaan, serta kelompok lainnya di kampung yang tak jauh dari bibir pantai itu untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau lebih populer Empat Pilar MPR.

Di hadapan ratusan peserta, Jazilul Fawaid mengungkapkan rasa bahagianya bisa berada di daerah di mana masyarakatnya ramah dan kotanya indah. "Warga di sini murah senyum", ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. "Saya mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah datang ke Tuminting untuk mengikuti Sosialisasi Empat Pilar," tambahnya.

Sosialisasi yang digelar pada hari ini, menurut pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan 10 November. Bangsa yang besar, kata Gus Jazil, adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Dia menyebut banyak pahlawan yang berasal dari Sulawesi Utara, seperti Sam Ratulangi dan AA. Maramis. "AA Maramis merupakan sosok yang ikut merumuskan dasar negara", tuturnya. Oleh karena itu, kata Gus Jazil, kita harus menghargai jasa para pahlawan, sebab mereka yang memerdekakan bangsa ini. "Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, juga merupakan gagasan para pahlawan", paparnya.

Kedatangan Gus Jazil di daerah yang dijuluki "Nyiur Melambai" itu adalah dalam rangka menyosialisasikan Empat Pilar. "Sosialisasi Empat Pilar merupakan tugas MPR", papar alumni PMII itu. Empat Pilar sebagai gagasan para pahlawan itulah yang menjadi pengikat bangsa Indonesia. "Tanpa Empat Pilar, Indonesia tidak ada", tuturnya.

Gus Jazil menyatakan, Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan keseharian oleh



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

seluruh komponen yang ada. Nilai-nilai yang ada pada dasar negara tidak ada yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat. "Pancasila sesuai dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara", ujarnya. Untuk itulah dalam segala sendi kehidupan nilai-nilai ini harus ada. "Pembangunan harus mengandung nilai-nilai Pancasila", paparnya. "Bila pembangunan tanpa mengandung nilai-nilai Pancasila maka pembangunan itu tidak menjadi berkah", tegasnya.

Dalam kesempatan itu Gus Jazil juga

menyampaikan bahwa 9 Desember 2020 digelar Pilkada serentak. Pilkada serentak juga digelar di Manado dan Provinsi Sulawesi Utara, serta kabupaten lain di provinsi yang berbatasan dengan Filipina itu. Pilkada merupakan implementasi sila IV Pancasila. "Pemilu, Pilkada, merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat", ucapnya. "Sesungguhnya sila IV merupakan penghargaan terhadap kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat", paparnya. Untuk itu, Gus Jazil berharap, agar warga masyarakat menggunakan haknya secara



Temu Tokoh Nasional di Bandar Lampung

Tak Satu pun Agama Bertentangan dengan Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PEMUDA Indonesia harus meyakini bahwa keputusan para pendiri bangsa yang telah menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah pilihan terbaik. Karena sila-sila yang ada dalam Pancasila bukanlah sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu digali dari perut bumi Indonesia sendiri, yang sudah hidup sejak lama. Selain itu, keputusan untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

“Seperti kata Bung Karno bahwa dia tak pernah membuat Pancasila. Dia hanya menggali nilai-nilai yang tumbuh sejak lama di tengah masyarakat. “Karena itu, Pancasila bisa diterima seluruh rakyat Indonesia dan tidak ada satu sila pun bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,” ujar Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., secara daring dalam acara Temu Tokoh Nasional di Bandar Lampung, Ahad (15/11/2020).

Selain HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, juga tampil sebagai narasumber dalam acara yang berlangsung di Gedung Ragom Sejahtera, Jl. Untung Suropati, Bandar Lampung, itu adalah DR. Zulkarnain, pakar Hukum Tatanegara dan dosen Fakultas

Hukum Unila. Sedangkan tema yang dibahas adalah ‘Pemuda Terdepan Dalam Mengawal Kemajuan, Keamanan, dan Kecintaan kepada NKRI.’

Selanjutnya, HNW menegaskan, Pancasila bukan agama tetapi tidak ada satupun agama yang bertentangan dengan Pancasila. Sejak ditetapkan pada 18 Agustus 1945, berbarengan dengan penetapan konstitusi, tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang menolak keberadaan Pancasila. Bahkan, ketika Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya meninggal, Pancasila tetap tegak berdiri, tidak ada penolakan dari masyarakat manapun.

Berbeda dengan Yugoslavia. Negara yang berada di kawasan Balkan yang didirikan Josip Bros Tito itu akhirnya terpecah setelah pendirinya mangkat. Yugoslavia terbagi menjadi negara-negara kecil sesuai etnis dan suku bangsa yang hidup di daerah tersebut. Beberapa negara muncul sebagai pecahan dari negara Yugoslavia, antara lain: Serbia, Kroasia, Slovenia dan Bosnia-Herzegovina.

Begitu pula Uni Soviet. Negara yang sudah tidak ada dalam peta dunia itu mengalami perpecahan setelah pemerintah berkuasa saat itu, memaksakan kebijakan Glasnost

(keterbukaan) dan Perestroika (restrukturisasi). “Sejarah Yugoslavia dan Uni Soviet bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam mengelola bangsa dan negara,” kata Hidayat.

Kepada generasi muda yang tergabung dalam Garuda Keadilan Provinsi Lampung – organisasi penyelenggara acara ini bekerjasama MPR – HNW mengatakan, selain menerima serta mensyukuri dasar dan ideologi Pancasila, generasi muda juga harus mendukung pilihan terhadap bentuk negara kesatuan, dalam bingkai NKRI.

Pilihan tersebut, kata HNW, sangat sesuai dengan wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, disertai keberagaman suku, etnis, bahasa, adat budaya, dan agama. Dan, pilihan itu membuat Indonesia tetap kokoh, meskipun pada 1998 terjadi gerakan reformasi.

Tatkala terjadi reformasi banyak pengamat meramalkan Indonesia akan terpecah belah. Nyatanya, ramalan itu tidak terjadi. Seluruh bangsa Indonesia menghendaki tetap berada dalam satu gerbong NKRI. Meskipun reformasi menyebabkan terjadi banyak perubahan, termasuk amandemen UUD 1945, tapi ada kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan bentuk negara, NKRI. □

MBO

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Setjen MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



SEKRETARIS Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono melantik serta mengambil sumpah dan janji Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. Pelantikan berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, Jumat (16/10/2020). Hadir dalam acara tersebut Pejabat Eselon II Setjen MPR, Deputi Persidangan Sekretaris Jenderal DPR Damayanti, Deputi Persidangan Sekretaris Jenderal DPD Sefti Ramsiaty, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Setjen MPR.

Dalam sambutannya, Ma'ruf Cahyono menyatakan, pelantikan itu menjadi momentum tepat untuk meningkatkan kinerja. Hal tersebut, tegas Ma'ruf Cahyono, sangat penting mengingat saat ini Setjen MPR sebagai sebuah organisasi didesain menjadi organisasi modern yang memiliki tata kelola manajemen strategis yang baik melalui terbitnya payung hukum baru, yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 45 Tahun 2019.

Tugas kita sekarang, menurut Ma'ruf Cahyono, adalah: *Pertama*, mesti menyesuaikan tata kerja organisasi dan delapan area reformasi birokrasi dengan Perpres tersebut, juga dengan Peraturan Sekretaris Jenderal. Untuk itu, di minggu-minggu pertama, Perpres dan

Persesjen harus dipahami oleh semua. Segera lakukan sosialisasi, pendalaman, serta diskusi," katanya.

Sebab, lanjut Ma'ruf Cahyono, tanpa pengetahuan dan pemahaman yang cukup dan memadai akan menyebabkan tugas-tugas yang dilakukan di lingkungan Setjen MPR nantinya akan menemui banyak kendala serta hambatan, seperti miskomunikasi dan miskoordinasi.

Tugas *kedua* adalah harus memiliki target yang jelas dan terukur. Jika hal tersebut dilakukan, menurut Ma'ruf, maka akan muncul inovasi serta kreatifitas untuk memaksimalkan kinerja. Apalagi, pejabat-pejabat yang baru kebanyakan adalah kaum muda yang masih sangat berpotensi besar berkembang.

Ma'ruf Cahyono berharap, mengawali tugas-tugas yang baru dengan struktur yang baru, mari bersama-sama untuk berprestasi dalam rangka peningkatan kinerja Setjen MPR dalam memberikan layanan kepada MPR dan alat kelengkapannya. Para pejabat baru mesti memiliki kemampuan manajemen strategis dengan menguasai standarisasi kerja yang baik.

Mengenai rencana strategis yang ingin dicapai, Ma'ruf Cahyono berharap, mulai tahun depan, Januari 2021, kita tekankan disoal Teknologi Informasi atau IT. "Di seluruh ruang kerja harus berorientasi kepada pemanfaatan IT untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan kita kepada MPR dan rakyat Indonesia," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruf juga berpesan agar capaian-capaian prestasi yang sudah di lakukan harus dipertahankan terus dan harus menjadi kebanggaan semua. "Memang sangat sulit merawat dan mempertahankan hal-hal baik yang sudah kita raih. Untuk itu kita harus berusaha terus tanpa pantang menyerah," ucapnya. □

DER

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di MPR



SEKRETARIS Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono bersama pejabat eselon di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR secara virtual, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, pada 1 Oktober 2020 mengikuti prosesi Upacara Hari Kesaktian Pancasila.

Pancasila adalah ideologi dan dasar negara. Kesaktiannya sudah terbukti dari berbagai peristiwa yang berpotensi memecah belah bangsa, namun NKRI tetap terpelihara, seperti peristiwa pemberontakan G30 S/ PKI yang gagal total.

Pancasila juga merupakan bagian dari Sosialisasi Empat Pilar yang terus digaungkan MPR ke berbagai pelosok Indonesia.

Walaupun tidak hadir secara fisik di lapangan upacara karena pandemi Covid-19, upacara di Setjen MPR berlangsung sangat khidmat. Acara semi acara dalam rangkaian upacara yang berlangsung di kompleks Lubang Buaya tersebut diikuti dengan seksama.

Selesai upacara, Sesjen MPR bersama pejabat eselon kemudian melakukan acara ramah tamah. □

DER

HUT ke-49 Korpri

Ma'ruf Cahyono: Momentum Bergerak Maju Melayani dan Mempersatukan Bangsa

SEKRETARIS Jenderal MPR RI Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., didampingi para pejabat eselon II dan III Sekretariat Jenderal MPR RI, menghadiri secara virtual perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dari Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, Ahad (29/11/2020).

Acara yang digagas Korpri Nasional dan diselenggarakan secara offline dan online di Ballroom Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta, ini dihadiri secara virtual oleh pejabat eselon 1 Kementerian, Lembaga dan Pemda, serta anggota Korpri seluruh Indonesia. Presiden RI Joko Widodo juga hadir online dan memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada para abdi negara seluruh Indonesia.

Dalam keterangannya usai acara, Ma'ruf Cahyono mengucapkan selamat HUT kepada anggota Korpri seluruh Indonesia. Ia juga mengungkapkan harapannya sebagai pembina Korpri di lingkungan Setjen MPR, yakni: *Pertama*, agar anggota Korpri Setjen MPR berkontribusi maksimal untuk melayani rakyat, bangsa dan negara, serta mendukung apa yang menjadi program Korpri Pusat yang pada gilirannya tentu untuk mendukung program-program pemerintah dalam upaya pembangunan nasional.

Kedua, anggota dan para pengurus Korpri harus proaktif serta memiliki peran aktif untuk melaksanakan Panca Prasetya Korpri. "Pada intinya, saya mengajak para abdi negara di berbagai instansi dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

lembaga pemerintah seluruh Indonesia, termasuk Setjen MPR RI, menjadikan HUT ke-49 Korpri ini sebagai sebuah momentum untuk bergerak maju melayani dan mempersatukan bangsa," tandasnya.

Acara peringatan HUT ke-49 Korpri yang diselenggarakan MPR berlangsung secara sederhana, namun tetap khidmat, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

Usai mengikuti secara daring puncak perayaan HUT Korpri Nasional, Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono dan para pejabat eselon I dan II melakukan prosesi potong tumpeng sebagai wujud rasa syukur, diakhiri foto bersama dan ramah tamah. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Andi Yuliani Paris, Anggota Komisi VII DPR RI

Pemerintah Harus Lebih Memperkuat Sektor UMKM

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia pada kuartal III – 2020 minus 3,49%. Padahal pada kuartal II – 2020, ekonomi Indonesia juga minus 5,3%. Dengan kondisi ini, Indonesia resmi resesi. Indonesia memasuki resesi karena dua kali berturut-turut pertumbuhan ekonominya minus. Secara keseluruhan, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,6%, bahkan minus 1,7% pada 2020. Angka ini turun drastis dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,02%.

Penyebab penurunan itu tidak lain adalah pandemi Corona Virus Disese 2019 (Covid-19). Pandemi ini telah melumpuhkan kegiatan perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk membatasi banyak kegiatan, mulai dari pendidikan hingga pariwisata. Pembatasan ini berdampak signifikan terhadap perekonomian. Apalagi pandemi ini berdampak besar terhadap permintaan dan penawaran barang serta jasa di seluruh dunia.

Di penghujung 2020 ini ada secercah harapan karena sejumlah perusahaan farmasi dan bioteknologi tengah merampungkan uji klinis vaksin untuk Covid-19.

Bahkan ada sejumlah negara mulai melakukan vaksinasi untuk Covid-19 pada Desember 2020. Vaksinasi memberi kekebalan pada tubuh seseorang terhadap Covid-19. Maka, seseorang bisa kembali melakukan aktivitas secara normal. Vaksinasi memberi harapan perekonomian dunia, termasuk Indonesia, kembali pulih. Ekonomi Indonesia pada 2021 diperkirakan akan menjadi titik balik menuju pemulihan.

Bagaimana prospek ekonomi Indonesia pada 2021? Untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis mewawancarai anggota MPR dari Fraksi PAN, Dr. Ir. Andi Yuliani Paris, MSc. Berikut perbincangan dengan anggota Komisi VII DPR RI. Petikannya:

Pandemi Covid-19 sejak akhir 2019 telah melumpuhkan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Beberapa negara di dunia, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat, mengalami resesi. Bagaimana Ibu melihat keadaan seperti ini?

Memang benar bahwa Indonesia telah memasuki fase resesi. Oleh karena pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 sebesar minus 5,32% dan pada kuartal III-2020 sebesar minus 3,49%. Tetapi, satu hal yang

patut disyukuri adalah terjadi perbaikan pertumbuhan ekonomi kuartal III dibandingkan kuartal II, meski belum signifikan.

Harapan kita bersama, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai angka positif pada kuartal IV-2020. Untuk mewujudkannya perlu sinergi antara pemerintah, swasta, hingga masyarakat dan UMKM selaku pertahanan grassroots.

Sejak pandemi Covid-19 merebak, pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah menangani pandemi sekaligus memulihkan perekonomian. Selain mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang, pemerintah juga membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Bagaimana Ibu melihat berbagai upaya pemerintah ini?

Memang telah banyak upaya dilakukan oleh Pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional. Namun, masih banyak hal yang perlu dibenahi dan diprioritaskan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah harus lebih memperkuat sektor UMKM, bukan hanya usaha besar sebagai skala prioritas program PEN.

Selain itu, realisasi anggaran di tiap

kementerian/lembaga menjadi hal yang perlu dibenahi. Data dari LKPP menyebutkan bahwa realisasi belanja pengadaan barang dan jasa negara hingga November 2020 belum mencapai 50% dari total nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp 853,8 triliun. Akibatnya, perputaran uang di masyarakat menjadi lambat.

Pemerintah juga harus memberikan penegasan kepada Kementerian/Lembaga yang masih menjalankan program dengan cara-cara biasa. Padahal, pandemi Covid-19 harus ditanggulangi dengan cara-cara *extraordinary* dan pendekatan *sense of crisis*.

Tentu, yang paling penting juga adalah pengawasan terhadap UMKM dan BUMN yang menerima bantuan sehingga bantuannya menjadi poin penguat produktivitas usaha, bukan konsumtif.

harus sejalan dan bahkan mengutamakan penanganan Covid-19.

Tentu, pemberian vaksin Covid-19 bisa menjadi salah satu jalan keluar, meski bukan satu-satunya. Kita berharap, lewat vaksinasi yang didukung dengan disiplin protokoler kesehatan dapat menguatkan kembali individu maupun kelompok dalam menjalankan usaha-usaha yang berimplikasi kepada pemulihan ekonomi nasional.

Jika telah berhasil melewati uji klinis, vaksinasi diperkirakan akan dimulai paling cepat pada Desember 2020 atau paling lambat April 2021. Apakah dengan demikian ekonomi Indonesia bisa kembali pulih? Bagaimana Ibu melihat prospek ekonomi Indonesia pada 2021?

Semakin cepat pemberian vaksin maka potensi penanganan Covid-19 tentu juga

Karena itu, tugas dari pemerintah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, agar dapat menggali kembali ekonomi. Salah satu rasa aman dan nyaman adalah mempercepat vaksinasi dan memperketat protokoler kesehatan.

Serapan anggaran pemerintah di Kementerian/Lembaga juga harus dipercepat. Tak hanya itu, belanja barang dan jasa pemerintah harus diprioritaskan berasal dari UMKM ataupun usaha lokal dan nasional. Sehingga, uang dapat beredar di masyarakat yang akhirnya berefek pada perbaikan ekonomi nasional.

Menurut Ibu, apa yang harus menjadi perhatian atau fokus untuk ekonomi Indonesia 2021?

Pertama adalah penguatan UMKM. Sebab, UMKM dan Koperasi berkontribusi sebesar



Banyak pendapat yang mengatakan, pemulihan ekonomi berbanding lurus dengan penanganan Covid-19. Jika Covid-19 ditangani dengan baik antara lain memutus mata rantai penyebaran maka dengan sendirinya ekonomi perlahan akan pulih. Karena itu penemuan dan produksi vaksin untuk Covid-19 pun dianggap sebagai titik cerah pemulihan ekonomi. Apa pendapat Ibu?

Pada saat Covid-19 menjangkiti Indonesia pertama kali pada bulan Maret, perlahan ekonomi Indonesia memburuk. Pengangguran baru akibat PHK mencapai 3,05 juta jiwa selama pandemi Covid-19, hingga banyaknya usaha yang harus tutup sementara maupun permanen.

Dari kondisi ini, kita dapat menarik benang merah bahwa penyebab anjloknya ekonomi adalah Covid-19. Sehingga, pendekatan utama dalam pemulihan ekonomi nasional

semakin cepat. Begitupun dengan proses pemulihan ekonomi nasional juga akan semakin cepat. Sehingga, kita berharap agar vaksin dapat segera hadir di Indonesia.

Berkaitan dengan prospek ekonomi pada 2021 sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi kebijakan penanganan Covid-19 dan kebijakan PEN. Tetapi, ketika kita melihat kurva pertumbuhan ekonomi Indonesia terdapat perbaikan pada kuartal III sehingga potensi pertumbuhan ekonomi yang positif pada kuartal IV semakin terbuka lebar. Tetapi sekali lagi, semua itu sangat ditentukan oleh perkembangan kebijakan pemerintah ke depan.

Apakah Ibu sudah melihat geliat ekonomi di masyarakat saat ini?

Kalau dilihat secara umum, ekonomi kembali bergeliat beberapa pekan terakhir pasca PSBB. Meski, memang, geliatnya belum signifikan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih zona merah.

60% terhadap PDB. Pandemi Covid-19 harus menjadi bahan pembelajaran bagi kita terkait pentingnya UMKM. Ketika UMKM rontok, ekonomi Indonesia-pun rontok hingga masuk fase resesi.

Penguatan UMKM juga akan menyerap kembali lapangan kerja. Apalagi, berdasarkan data Kemenkop UKM, UMKM menyerap hampir 97% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga, penguatan UMKM seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah pada 2021.

Tentu, tak hanya UMKM, investasi juga perlu diperhatikan. Lewat investasi, pembangunan dapat kembali dilanjutkan dan digencarkan. Investasi juga dapat menjadi salah satu pemodal bagi UMKM dan usaha besar agar dapat bergeliat kembali.

Tentu, kita bersama berharap, ekonomi dapat membaik kembali pada 2021 dan keluar dari fase resesi lewat sinergi dari berbagai pihak. □

Mari Datang dan Ramaikan *Museum*

MASIH ingat **Veronica Tan**. Dia adalah mantan istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kini aktif di berbagai kegiatan sosial, salah satunya di dunia permuseuman. Perempuan cantik itu kini menjabat Ketua Mitra Museum Jakarta. Sebagai aktivis museum, Veronica berharap, museum kembali menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat Indonesia.

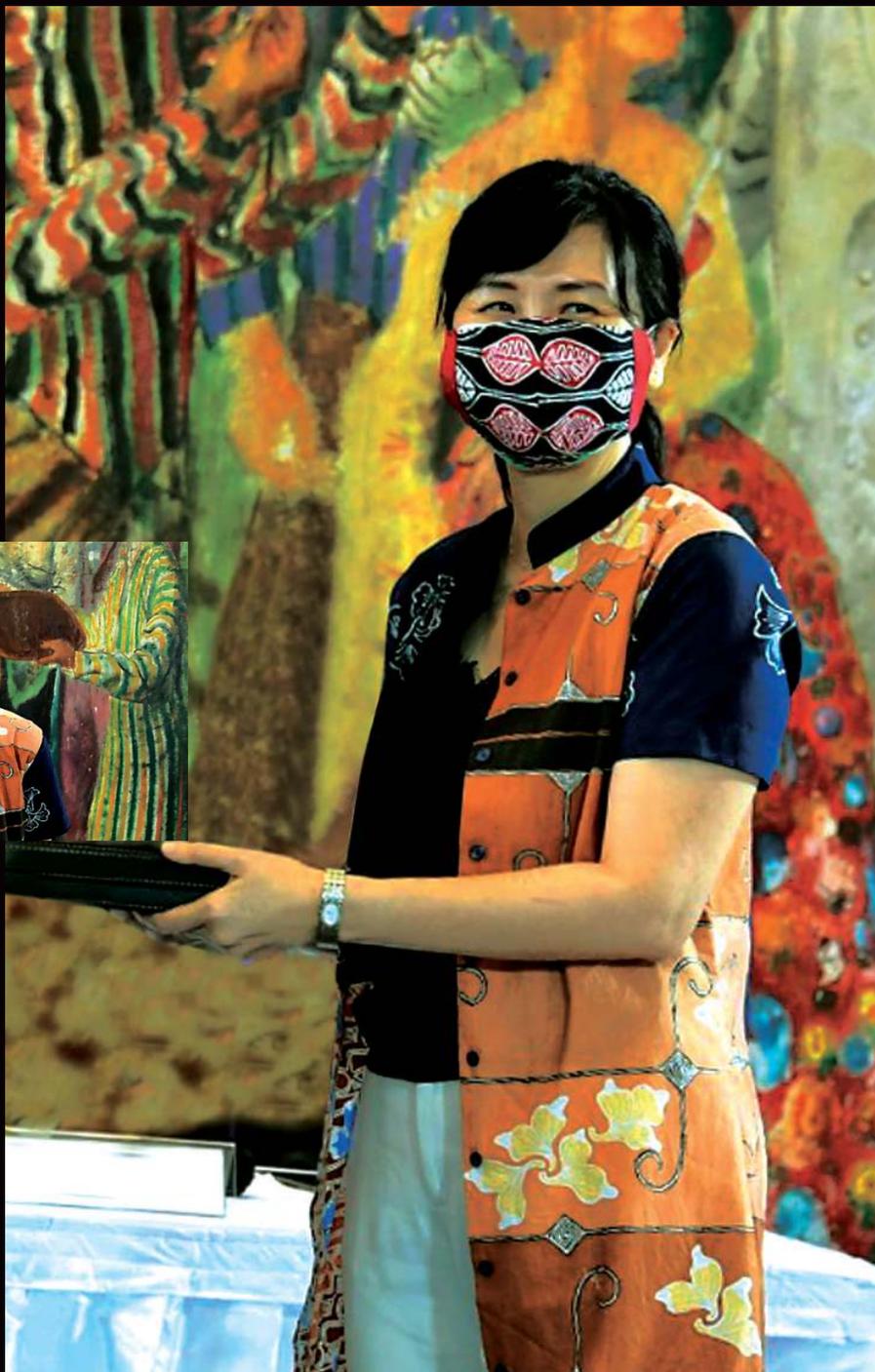
Harapan yang disampaikan Veronita Tan itu bukan tanpa alasan. Karena, dia mengaku prihatin dengan hilangnya antusiasme rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, terhadap museum. "Tidak semua memang,



Tapi, antusiasme masyarakat berkunjung ke museum sedikit," ungkap Veronca di Jakarta baru-baru ini.

Melihat kenyataan itu, Veronica berpikir, bagaimana caranya untuk membangkitkan kembali antusiasme generasi muda terhadap museum. Untuk itu, dia menginginkan terciptanya narasi bagus yang dapat menggugah generasi milenial untuk mencintai museum, atau setidaknya mengetahui arti pentingnya museum buat Indonesia.

"Ayo kita kembali mencintai museum, datang ke museum, dan ramaikan museum," ajaknya. □



DER

Veronica Tan

Bangga Jadi *Juara Dunia* Jetski

ATLET jetski nasional **Aero Sutan Aswar** adalah pemegang gelar juara dunia di kelas Pro Endurance Runabout Open pada Kejuaraan Dunia Jetski 2019 di Lake Havasu City, Arizona, Amerika Serikat.

Ketika tampil di Podcast Bambang Soesatyo, belum lama, Aero mengungkapkan rasa bangganya berhasil menyabet gelar juara dunia Jetski, dan mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. “Ya, bangga, sudah menjalani latihan-latihan berat akhirnya berhasil menjadi juara,” kata atlet yang juga berstatus mahasiswa ini.

Apalagi, lanjut Aero, gelar juara dunia jetski itu dia raih murni dari hasil kerja keras, bukan pemberian atau kecurangan. “Itulah faktor utama yang membuat saya merasa bangga,” ujar atlet berusia 26 tahun ini. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Aero Aswar



Ahmad Dhani

Musisi Punya Pernak-pernik Kerajaan Tanah Jawa

MUSISI kawakan **Ahmad Dhani** ternyata juga menyenangi pernak-pernik kerajaan Tanah Jawa, seperti pernak-pernik peninggalan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dan Kerajaan Majapahit. Hal itu terungkap pada saat Ketua MPR Bambang Soesatyo menyambangi kediaman pentolan grup musik Dewa 19 itu beberapa waktu lalu.

Semua koleksi pernak-pernik kerajaan Tanah Jawa itu tersimpan di salah satu ruangan rumahnya yang dijadikan galeri pribadi. Di situ tersimpan, antara lain beberapa set lengkap peralatan makan dan minum era kerajaan-kerajaan itu. Juga ada foto-foto hitam putih masa muda Raja Paku Buwono X, raja besar terakhir trah Mataram-Surakarta.

Selain itu, suami artis dan anggota DPR RI, Mulan Jameela, ini juga mengoleksi keris, salah satunya keris tertua pada zaman Singosari, buatan tahun 1200-an. “Keris ini untuk koleksi saja, tidak untuk apa apa,” ujar Dhani sembari tertawa. □

DER



Ir. H.M. Idris Laena, MH.

(Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI dan Ketua Badan Penganggaran MPR RI)

Catatan Perjalanan ke Tanah Bone

BAGI sebagian masyarakat, datang dan pergi ke Tanah Bone Makassar, barangkali sesuatu yang biasa. Tapi tidak bagi kami keluarga besar Laena. Perjalanan kami ke Tanah Bone ini adalah perjalanan bersejarah karena mengenang perjalanan orang tua kami yang mengungsi akibat peristiwa DI/TII di Makassar 70 tahun yang lalu. Pada saat itu, dengan menggunakan perahu layar berpenumpang 35 orang, akhirnya orang tua kami terdampar di suatu desa yang sangat terpencil bernama Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragirihilir, Provinsi Riau.

Menelusuri perjalanan orang tua kami pada waktu itu, rasanya mustahil jika ingin mengikuti secara utuh. Bayangkan Ayah berangkat dari Pelabuhan Bajoe di Tanah Bone bersama penumpang yang lain. Dan, harus berada di dalam perahu layar yang bobotnya kecil selama tiga bulan perjalanan. Karena itu, ketika kami memutuskan untuk melakukan napak tilas, maka cukup bagi kami sekeluarga besar memulai perjalanan dari Jakarta, kemudian transit di Surabaya dan menuju Makassar.

Pada tanggal 26 November 2020, bersama 35 orang anggota keluarga besar dengan

menggunakan Kapal PELNI KM Nggapulu, kami bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Surabaya. Dan, yang menarik, Direktur Utama PT PELNI, Bapak Insan Purwarisya L. Tobing, berkenan melepas keberangkatan kami sekeluarga.

Sejujurnya, perjalanan menggunakan kapal laut sempat membuat kami khawatir,



karena bagi keluarga kami menempuh perjalanan selama empat hari tiga malam sudah pasti sangat membosankan. Namun, kami keliru. Ternyata di dalam KM Nggapulu terasa sangat istimewa ketika nakhoda kapal Kapten Labani mengajak kami tour melihat operasional kapal, mulai dari cara kerja di

anjungan kapal, ruang kontrol, ruang komunikasi, bahkan ruang mesin dan dapur serta fasilitas lainnya. Dan, yang paling istimewa, kami dilibatkan dalam simulasi peragaan penyelamatan penumpang dalam keadaan darurat.

Demikian juga perjalanan dari Surabaya menuju Makassar, nakhoda kapal Kapten Nursyamsi banyak bercerita tentang pengalaman beliau selama menjadi nakhoda, dan cerita itu melengkapi perjalanan panjang kami. Tanpa terasa akhirnya kami tiba Makassar.

Senja mulai turun, dan lembayung sutra di ufuk timur mulai bercahaya ketika kapal kami bersandar di Pelabuhan Anging Mamiri Makassar. Dengan diiringi Lagu "Sulawesi Parasananta", Alhamdulillah tanggal 29 November 2020 untuk pertama kalinya kami sekeluarga menginjakkan kaki di Tanah Ugi, Makassar.

Selama dua hari di Kota Makassar, tentu tidak kami sia-sia kan. Kami gunakan waktu untuk bertemu dengan keluarga, kerabat dan sahabat yang ternyata juga ingin ikut menyertai perjalanan dari Makassar menuju Tanah Bone.

Pada saat yang sama Prof. Dr. Ir. Fadel



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Muhammad sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Makassar. Sebagai Wakil Ketua MPR RI berkenan melepas rombongan dari Hotel Rinra dan memberikan wejangan. Fadel Muhammad berpendapat bahwa kegiatan ini memang sederhana, tapi penting sebagai wujud nyata dalam rangka menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tidak disangka anggota rombongan yang menyertai kami menuju Tanah Bone bertambah. Tidak kurang dari 50 orang anggota keluarga yang menetap di Jakarta, Jambi, bahkan dari Kota Makassar ikut berpartisipasi. Dengan diiringi Lagu "Indologo" yang pernah populer pada tahun 70-an, kami berangkat menuju Tanah Bone.

Satu hal yang menarik, ketika kami akan berangkat dari Jakarta, Ayahanda kami memberikan daftar nama keluarga yang harus dikunjungi di Tanah Bone. Tapi, ternyata tidak mungkin bisa kami wujudkan karena tidak kurang dari 30 keluarga. Karena itu kami putuskan mengundang keluarga

untuk mengikuti acara silaturahmi yang kami selenggarakan di Hotel Novena Kota Bone, hotel di mana kami tinggal selama di Tanah Bone.

Suatu yang sangat istimewa ketika Bupati Bone, Bapak Dr. H. Andi Fashar Padjalangi, beserta jajaran Pemda Bone mengundang dan menjamu kami di Rumah Jabatan sekaligus mengajak untuk melihat dan menyaksikan kebesaran Bone di Museum Arung Palakka.

Meskipun kami sempat berkunjung ke beberapa rumah kerabat yang ada di Cellu, Berebbo serta Bone dan sekitarnya, tapi puncak acara adalah ketika kami mengundang keluarga besar untuk bersilaturahmi. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid 19, silaturahmi diisi juga dengan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR untuk saling memahami betapa pentingnya memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Bupati

Kabupaten Bone, Bapak Dr. H. Andi Fashar Padjalangi, M.Si., dan Wakil Bupati, Bapak Drs. H. Ambodalle, M.Si., terlihat betapa antusiasnya keluarga menyambut kami. Pertemuan yang penuh haru setelah terpisah oleh sejarah selama 70 tahun. Karena itu, tidak salah jika Bupati Bone mengajak seluruh hadirin untuk terus menjaga persatuan.

Dan, yang sangat mengharukan, ketika pada acara itu, Ayahanda Haji Lamek Thaher Daeng Manambung sempat melakukan video call dan menyapa semua keluarga dan kerabat yang hadir.

Saya patut berbangga karena pada acara silaturahmi itu, Bupati Bone juga secara spontan memberi gelar kepada istri saya, Hj. Lily Idris Laena, dengan nama Paddaengeng Daeng Tamayang, meskipun istri saya dari campuran suku Melayu Deli, Sunda, dan Minang. Inilah Nusantara-Inilah Indonesia.

Waktu terus berjalan, tapi sejarah tetaplah sejarah yang tidak bisa diulang. Namun, tetap harus dikenang dan jangan dilupakan.

Untuk itu, kepada kakak dan adik-adikku: Keluarga H. Arief Laena SE, Keluarga Drs H. Jamil Laena, Keluarga H. Tafsir Laena SE, Keluarga H. Azhar Laena SE, Keluarga Hasyim Laena SH, juga anak-anakku Tania Laena Putri, BSc. MBA, Astrid Laena Putri SH, MH, Haikal Laena Putra, dan Aurelie Laena Putri, serta seluruh kerabat dan sahabat, saya ingin mengajak untuk selalu ingat tanah leluhur. Tanah di mana sejarah kita dimulai.

Selamat tinggal Tanah Bone, kami akan selalu merindukan keramahanmu.

Salamkiki to pada salama.

Uddani Bali Uddani.....



Lestari Moerdijat, SS.,MM.

Jangan Takut Jadi Wanita Tak Sempurna



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI RANAH politik nasional, kiprahnya baru saja dimulai. Itupun terjadi sesudah lolos dari ajang Pileg 2019 dan didapuk menjadi Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024 dari unsur Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). Namun, diinternal Partai NasDem, sosok Lestari Moerdijat, SS., MM., ibarat Satria Pilih Tanding. Taji dan keunggulannya sudah terlihat sejak lama.

Meski baru pertama menempati kursi di DPR RI, Lestari penantang serius bagi para incumbent. Buktinya, suara yang membuatnya melenggang ke Senayan jumlahnya sangat signifikan. Dari dapil Jawa Tengah II, meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, serta Demak, Dia sukses menuai dukungan terbanyak, mencapai 162.996 suara.

Keberhasilan tersebut semakin sempurna, karena di daerah pemilihan yang sama terdapat sejumlah nama populis. Seperti, legenda bulutangkis Harijanto Arbi yang maju melalui PSI. Juga presenter Tamara Geraldine Tambunan yang mencalonkan diri bersama PDI Perjuangan. Serta artis tahun 1990-an Dina Lorenza Audria bersama Partai Demokrat.

Laksana bulan dalam sistem galaksi Bimasakti, keberadaan Lestari Moerdijat diantara para pria Pimpinan MPR memberi kesan tersendiri bagi lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berkesan, karena menunjukkan bahwa Pimpinan MPR tidak hanya disesaki oleh kaum Adam. Tetapi juga ada sosok perempuan di sana yang direpresentasikan oleh Rerie, begitu Lestari Moerdijat biasa disapa.

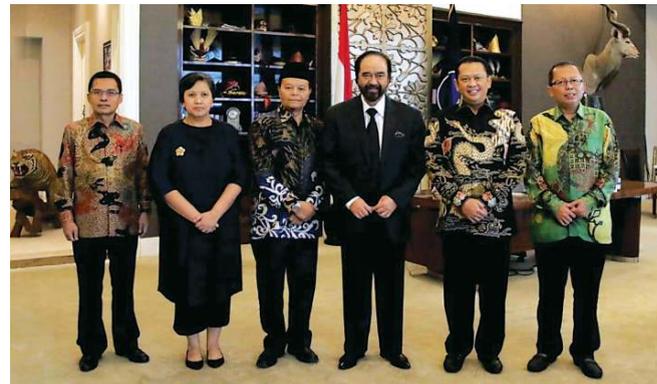
Kehadiran Lestari di jajaran pimpinan MPR seolah memantapkan bahwa perempuan senantiasa memiliki tempat di kancah politik nasional. Dan, itu sesuai dengan tekad partai NasDem, memberi kesempatan luas kepada kaum hawa untuk tampil di ranah politik nasional.

Semula, kehadiran Lestari mewakili Fraksi NasDem menjadi

pimpinan MPR cukup mengagetkan. Tetapi, ia tidak duduk untuk sekedar memenuhi kuota perempuan, sebagaimana tekad Partai NasDem. Perempuan kelahiran Surabaya, 30 November 1967, ini memiliki bekal yang sangat pantas untuk mendapat kehormatan duduk di singgasana Wakil Ketua MPR.

Sebelum terjun di kancah politik, Mbak Rerie—begitu dia disapa oleh para koleganya—sudah terlebih dahulu malang melintang di dunia korporasi. Terakhir, ia memegang jabatan sebagai CEO Media Group dan Presiden Direktur Media Indonesia. Ia juga pernah menjabat direksi dan komisaris di beberapa anak usaha Media Group. Seperti, Surya Energi Raya, CS Media Investment, Metro TV, serta Pangansari Utama.

Di luar jabatannya di dunia bisnis, ibu empat anak ini juga memimpin berbagai organisasi sosial non-profit. Seperti, Dewan Pembina Yayasan Sukma Bangsa yang mengelola sekolah unggulan di







Bireuen, Pidie, dan Lhokseumawe, Aceh. Pendiri Yayasan Dharma Bakti Lestari yang bergerak aktif melakukan kegiatan sosial di bidang kesehatan, pembinaan UMKM, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan kepemudaan.

“Pak Surya Paloh punya penilaian tersendiri, mempercayakan saya menjadi Pimpinan MPR, di luar kedekatan kami mengelola koorporasi yang beliau rintis dan kini sudah ditinggalkan. Yang penting, sekarang saya harus bekerja sebaik mungkin, menjalani tugas dan amanah yang sudah dipercayakan kepada saya,” kata Lestari Moerdijat kepada majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Meski menjadi satu-satunya perempuan dikelilingi para pria pimpinan MPR, Rerie merasa biasa saja. Ia tetap bebas bergerak dan tak terbebani apapun. Apalagi, sebelum menjadi pimpinan MPR, ia juga kerap dikelilingi dan bersinergi dengan para Adam, baik sebagai mitra seajar, atasan, maupun bawahan. Sehingga praktis, di lingkungannya kini, Rerie pun leluasa, sebagaimana burung terbang atau ikan berenang.

Penyintas Kanker

Prestasi, penghargaan, pangkat serta jabatan yang dicapai Lestari Moerdijat tidak diperoleh dengan cara gampang. Butuh keuletan, kerja dan juga pengorbanan. Apalagi, sebagai perempuan Jawa, Rerie paham betul akan kodrat dan tugasnya sebagai kaum hawa dan istri dari Wawan Iriawan. Yaitu kasur, pupur, dapur, dan sumur.

Tetapi, tugas dan kodratnya itu malah ia lompat. Berbekal pendidikan, pengetahuan, serta pergaulan yang dimiliki, Lestari mampu melenting, terbang melewati batas kodrat dan tugasnya sebagai perempuan. Dengan keberaniannya itu ia meniti karier dari



bawah sebelum akhirnya mendapat kepercayaan sebagai *top leader*.

“Saya terima dikatakan perempuan tidak sempurna karena memilih mengejar karier ketimbang mengutamakan keluarga. Misalnya, tidak bisa selalu menyiapkan makanan atau bersih-bersih rumah. Itu adalah risiko, dan secara sadar saya menerimanya. Meski tidak bisa mengerjakan sendiri, tetapi saya tidak lepas tangan. Saya cari asisten untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan tersebut,” ujar Lestari.

Memperingati Hari Ibu 2020 yang jatuh pada Selasa 22 Desember, Lestari mengajak kaum perempaun tidak perlu merasa takut atau ragu dalam mengejar mimpi. Termasuk jika terpaksa dianggap sebagai wanita yang tidak sempurna. Lantaran tidak seluruhnya menjalankan kodrat dan tugasnya. Apalagi, di setiap perjuangan, selalu ada yang harus jadi korban. Tidak mungkin semua dilakukan secara bersamaan.

Karena dengan mendapat karier yang baik, pada hakekatnya seorang perempuan juga bisa membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sikap kejuangan seperti ini pernah diperlihatkan





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



para kaum perempuan di zaman dahulu, termasuk para pejuang perempuan. Mereka yang ikut dalam perjuangan, tentu tidak bisa menyelesaikan tugas dan kodratnya sebagai perempuan, secara sempurna dan seluruhnya.

Dengan tekad, semangat, dan pengorbanannya itu tidak heran jika Lestari menjadi satu dari sedikit perempuan Indonesia yang berhasil meniti karier dengan baik. Ia mendapat kepercayaan besar dari pendiri dan inisator Partai Nasional Demokrat Surya Paloh. Bahkan diajak untuk ikut meretas berdirinya NasDem.

Kepercayaan itu sangat wajar dia peroleh, apalagi Mbak Rerie memang dikenal sebagai sosok pekerja keras. Ia tetap menjalankan tugasnya, termasuk di saat tubuhnya lemah karena sakit. Bahkan ketika sakitnya itu terbilang gawat, ia masih berupaya menyelesaikan tanggung jawabnya.

Kisah itu terjadi pada akhir 2016. Saat itu, Mbak Rerie didiagnosa menderita penyakit kanker payudara HER-2. Terpukul, sedih dan menderita, tetapi ia menolak untuk menyerah dari penyakitnya. Saat itu juga, di hadapan dokter yang mendiagnosa, Rerie membuat jadwal operasi pengangkatan penyakitnya, tanpa berkonsultasi dengan keluarga.

Keputusan itu diambil karena Lestari sadar ia harus berpacu dengan waktu, sebelum penyakitnya makin menjalar. Semakin cepat ia menjalani operasi semakin besar peluangnya untuk sehat, kembali seperti sediakala. Terbukti setelah menjalan operasi, disertai 6 kali kemoterapi, 25 kali terapi radiasi, dan 18 kali terapi target, pelan tapi pasti ia sudah kembali sehat seperti semula. Rambutnya yang sempat rontok karena menjalani terapi, kini tumbuh kembali.

Padahal selama pengobatan ia mengalami berbagai penderitaan yang tidak ringan. Rambut gundul adalah salah satunya. Selain itu ia

sempat pingsan karena kemampuan fisiknya mengalami penurunan drastis. Tetapi ia tidak pernah menyerah. Keyakinannya penuh bahwa kanker tidak bisa membunuh harapan, cinta, dan masa depannya.

“Kita harus berdamai, berdamai dengan kematian. Allah sudah menuliskan, pada saatnya kita akan kembali dengan cara dan jalannya masing-masing. Kalau sakit pasti sakit, tetapi kita bisa mengukur kekuatan diri sendiri,” tutur Rerie.

Ora ngapak ora kepenak

Lestari Moerdijat adalah anak pertama dari empat bersaudara. Ayahnya, dr. Tonny S. Moerdijat, Sp. OG., aktif dalam memberikan penyuluhan dan pemeriksaan kanker serviks gratis dengan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA). dr. Tonny merupakan seorang dokter spesialis ahli di bidang kandungan.

Rerie menghabiskan masa kecil hingga bangku SMA di Purwokerto, kota yang kian dikenal dengan logat *ngapak*-nya. Di kota ini, ia tinggal bersama orangtuanya. Sejak di bangku sekolah, Rerie aktif berorganisasi dan menjadi pengurus organisasi pelajar.

Lulus dari SMA Negeri 1 Purwokerto, dia hijrah ke Jakarta. Di Ibukota Rerie mengawali kuliah S1 di Fakultas Sastra Jurusan Arkeologi di Universitas Indonesia. Di tempat ini kebiasaan Rerie bergabung dan aktif di organisasi mahasiswa tersalurkan dengan baik. Rerie juga menjadi pengurus di organisasi profesi dan memiliki pengalaman dalam organisasi keolahragaan.

Tak puas dengan ilmu yang dimiliki, Rerie kembali ke bangku sekolah. Dia mengambil pendidikan Public Relation di London School. Di sini dia bertemu dengan teman-temannya yang bekerja di Media Indonesia. Kemudian, ia mendapat tawaran mengisi salah satu bagian di Media Indonesia. Dan, itu berlanjut hingga akhirnya Rerie mendapat kepercayaan memegang kendali atas perusahaan tersebut. Setelah itu Rerie melanjutkan pendidikan strata 2 manajemen di Universitas Pelita Harapan dan saat ini dia adalah kandidat doktor di bidang manajemen pada perguruan tinggi yang sama.

Bagi Rerie, yang terpenting saat ini adalah bisa merampungkan tugas-tugas Wakil Ketua MPR RI sebaik-baiknya. Hanya dengan begitu ia tidak menyia-nyikan kepercayaan yang diterimanya. Tidak ada dalam pikirannya mengais kesempatan yang mungkin masih ada. Termasuk ikut kovensi Partai NasDem untuk menjaring Capres-Cawapres tahun 2024. □

MBO

Cek Ombak Kebijakan Biden

SUKSESI kepemimpinan di negeri Paman Sam, Amerika Serikat, merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua negara di dunia. Tidak dipungkiri bahwa perubahan tampuk pimpinan di Amerika Serikat akan membawa implikasi penting bagi tatanan global, baik dari segi politik-keamanan, maupun ekonomi dan perdagangan. Merujuk pada informasi yang disampaikan oleh media-media arus utama Amerika Serikat, seperti *CNN*, *NBC News*, dan *CBS News*, Joseph Robinette Biden Jr atau Joe Biden, dipastikan akan menduduki posisi sebagai orang nomor satu di Amerika Serikat dengan mengantongi 290 suara elektoral, jauh mengungguli Donald Trump yang hanya memperoleh 214 suara elektoral. Apa yang terjadi dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun ini dan apa signifikansinya bagi Indonesia?

Dua Pijakan

Sebelum menjawab pertanyaan krusial tersebut, saya hendak menekankan bahwa ada dua hal penting yang harus kita cermati terlebih dahulu sebagai pijakan dalam menjawab pertanyaan tersebut, yakni sepak terjang Trump yang memimpin Amerika Serikat selama empat tahun terakhir, serta visi kepemimpinan yang diusung oleh Biden sehingga menuai dukungan publik secara luas, baik dari ranah domestik maupun publik internasional.

Pertama, saya hendak menyoal kemenangan Trump pada 2016 agar analisisnya tidak ahistoris. Kemenangan ini bisa dikatakan di luar prediksi, mengingat saingannya adalah politisi senior Partai Demokrat dan mantan ibu negara, Hillary Rodham Clinton. Trump sendiri hanya berstatus sebagai pengusaha, tidak pernah memegang jabatan publik dan tidak memiliki pengalaman panjang sebagai politisi.

Namun demikian, di atas segala prediksi yang ada, suara rakyat Amerika Serikat akhirnya mengantarkan Trump menjadi presiden ke-45 Amerika Serikat. Ada banyak argumentasi untuk menjelaskan kemenangan Trump waktu itu tapi yang paling mencolok adalah suasana kebatinan rakyat Amerika Serikat yang menginginkan perubahan, sehingga sosok Trump yang jauh dari hiruk-pikuk perpolitikan menjadi daya tarik tersendiri.

Rakyat Amerika Serikat membutuhkan figur yang berbeda. Hal ini dipertegas dengan jargon yang didengungkan oleh Trump dan pendukungnya tanpa henti selama masa kampanye, yakni *"Make America Great Again"*. Trump dengan cerdas membakar kebanggaan masyarakat Amerika Serikat yang sempat padam karena terpapar krisis ekonomi dan pudarnya pengaruh negara mereka di kancah internasional.

Barangkali menjadi sebuah pelajaran berharga bahwa apa yang

disampaikan selama masa kampanye belum tentu segaris dengan realitas ketika sang calon sudah duduk di tampuk kekuasaan. Realitas yang "ditulis" Trump selama empat tahun masa jabatannya sulit untuk dikatakan telah berhasil menaikkan kembali pamor Amerika Serikat di kancah dunia: Amerika Serikat terpuruk dan dihujat! Amerika Serikat bertindak tidak adil dan melukai masyarakat global ketika mendukung penjajahan Israel atas bangsa Palestina.

Amerika Serikat juga melakukan pengingkaran terhadap berbagai kesepakatan global tentang lingkungan dan perdamaian. Perang dagang yang dikobarkan Amerika Serikat terhadap Tiongkok demi menggerus laju ekonomi Tiongkok yang tumbuh pesat memberikan implikasi negatif terhadap negara-negara lainnya di dunia. Di level domestik, masyarakat Amerika Serikat kecewa dengan cara Trump menangani isu-isu rasial. Puncaknya adalah kegagalan Trump dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19 tahun ini.

Berbagai kegagalan tersebut menjadi kausa penjelas sekaligus penegas, mengapa "jualan" Trump pada pemilihan presiden tahun ini bak gayung tak bersambut. Masyarakat domestik Amerika Serikat, serta masyarakat global, dibuat kecewa dengan kebijakan-kebijakan yang diambil Trump. Harapan akan lahirnya anasir yang berbeda dari keterpilihan Trump empat tahun silam tidak terealisasi. Hal inilah yang mengantarkan kemenangan Joe Biden dan pasangannya, Kamala Harris, melebihi 270 suara elektoral sebagai syarat kemenangan.

Singkat kata, rakyat Amerika Serikat benar-benar menginginkan sirkulasi elit dalam pemilihan presiden tahun ini untuk memenuhi harapan dan tentu saja kebanggaan mereka. Hal inilah yang akan membawa kita pada diskursus selanjutnya, visi-misi apa yang diusung oleh Joe Biden dan Kamala Harris sehingga mampu terpilih sebagai presiden dan wakil presiden untuk masa pemerintahan empat tahun ke depan?

Visi-misi yang diambil oleh Joe Biden sejatinya mengambil bentuk yang paling sederhana tapi sangat bertenaga untuk mengalahkan Trump, yakni antitesis dari kebijakan-kebijakan Trump yang mengecewakan publik selama empat tahun terakhir. Diksi "sederhana" saya pakai di sini untuk menggambarkan betapa mudahnya Joe Biden mengambil *positioning* atas Trump. Sangat jelas bahwa Joe Biden memahami kelemahan Trump dan ekspektasi publik, baik domestik maupun internasional.

Dalam sesi-sesi kampanye, Biden berkali-kali menegaskan bahwa ia akan menerapkan strategi nasional yang komprehensif dalam menangani pandemi Covid-19, dengan mewajibkan penggunaan masker secara nasional dan menggratiskan pemeriksaan Covid-19 yang selama ini tidak bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.

Oleh:
Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA.
Wakil Ketua MPR RI



Yang paling signifikan, ia akan melakukan pembatalan proses penarikan diri Amerika Serikat dari WHO. Di bidang ekonomi, Biden menggagas strategi *"Build Back Better"*, yakni alokasi dana US\$ 9,9 triliun untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Amerika Serikat, khususnya yang kehilangan pekerjaan akibat terdampak Covid-19.

Joe Biden dalam kampanyenya juga berjanji untuk bergabung kembali dengan kesepakatan Paris tentang pemeliharaan lingkungan, yang mana pada masa Trump, Amerika Serikat memutuskan untuk keluar pada 2017. Di mata masyarakat domestik, visi ini sangat rasional karena masyarakat Amerika Serikat sendiri begitu merasakan dampak perubahan iklim yang terjadi, seperti masifnya kebakaran hutan dan badai yang kerap kali melanda beberapa negara bagian Amerika Serikat.

Hal lainnya yang dijanjikan oleh Biden dalam kampanye adalah reformasi imigrasi yang memberikan kemudahan bagi para *dreamers* (imigran yang bermimpi tinggal dan bekerja di Amerika Serikat) untuk mendapatkan kewarganegaraan, hal yang begitu dihambat Trump selama masa kepemimpinannya. Saya secara pribadi menyebut visi-misi Biden dengan dua kata, yakni "sederhana" dan "populis". Sederhana karena mengambil posisi sebagai antitesis Trump, dan populist karena memenuhi ekspektasi masyarakat domestik dan potensial untuk menurunkan tensi politik global. Kedua hal itulah yang membawa Biden menapak jalan kemenangannya.

Signifikansi bagi Indonesia

Selanjutnya kita masuk pada hal yang paling penting bagi Indonesia, yakni apa implikasi kemenangan Biden bagi kepentingan nasional Indonesia? Pertanyaan ini relatif mudah untuk dijawab karena kultur demokrasi Amerika Serikat cukup matang. Visi-misi seorang calon presiden Amerika Serikat begitu kental dengan corak ideologi partai pengusungnya, meskipun improvisasi tetap dimungkinkan. Sejauh ini, visi-misi yang disampaikan Biden segar dengan warna kebijakan yang diusung oleh Partai Demokrat yang cenderung humanis dan mengedepankan kerja sama dalam relasi antarnegara. Jadi sederhananya, saya asumsikan bahwa Biden akan berkhidmat pada apa yang sudah disampaikan selama kampanye.

Amerika Serikat diprediksi akan berupaya keras memperbaiki citra mereka yang "sangat" di bawah Trump menjadi lebih humanis dan pro-kerja sama. Artinya, Amerika Serikat berpotensi untuk dijadikan mitra dialog sekaligus aktor penting dalam menyelesaikan beberapa krisis global. Indonesia bisa mengajak Amerika Serikat untuk berdialog bersama mencari model perdamaian terbaik bagi Palestina melalui berbagai instrumen organisasi internasional tempat Indonesia bernaung seperti DK PBB. Dalam konteks Asia Tenggara, melalui

forum ASEAN, Indonesia bisa mengajak Amerika Serikat menjadi mitra dialog strategis untuk menurunkan ketegangan di Laut Cina Selatan yang selama ini menjadi sumber instabilitas keamanan bagi negara-negara yang bermukim di kawasan tersebut.

Upaya menanggulangi pandemi Covid-19 bukan saja merupakan masalah global, tapi juga jalan panjang yang harus ditempuh secara kolaboratif di antara negara-negara di dunia. Visi Biden untuk membatalkan penarikan diri Amerika Serikat dari WHO yang telah dimulai sejak Juli lalu, setidaknya menunjukkan komitmen negara tersebut dalam perang global melawan pandemi. Indonesia bisa merangkul Amerika Serikat untuk mendukung pendanaan dan penelitian jangka panjang dalam menemukan obat untuk menangani virus.

Wacana reformasi imigrasi yang didengungkan Biden merupakan "angin segar" dalam hubungan kerja sama antarnegara. Di bawah pemerintahan Trump tidak dipungkiri terjadi penguatan Islamofobia. Para pendatang Muslim dicurigai sebagai sumber terorisme dan radikalisme. Namun, dengan kebijakan Biden yang lebih terbuka, diharapkan Islamofobia tersebut dapat menurun dan perlahan tapi pasti mampu menghilangkan diskriminasi terhadap umat Islam yang bermukim di sana. Indonesia perlu memberikan atensi lebih pada kebijakan ini mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia.

Terlepas dari segala anggapan dan prediksi bahwa Amerika Serikat di bawah Biden akan lebih sejuk dibandingkan sebelumnya, Amerika Serikat tetaplah Amerika Serikat, sebuah negara adidaya yang akan tetap berjuang teguh dalam mengukuhkan supremasi mereka di segala lini. Oleh sebab itu, poin kebijakan Amerika Serikat dalam hubungan antarnegara akan tetap dilandasi pada pencapaian kepentingan nasional dan pengukuhan supremasi mereka, namun dikemas dalam corak diplomasi yang lebih lunak dan humanis. Implikasinya, perang dagang dengan Tiongkok yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mungkin terjadi. Dikarenakan keduanya adalah mitra dagang Indonesia, perlambatan ekonomi di kedua negara sebagai imbas perang dagang, akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Campur tangan Amerika Serikat dalam konflik Laut Cina Selatan juga tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Namun demikian, yang harus digarisbawahi adalah Amerika Serikat akan lebih terbuka untuk berdialog dan mendengarkan pendapat global, terlebih lagi dengan mitra strategisnya di berbagai kawasan. Inilah celah yang bisa dimanfaatkan bagi Indonesia yang tentu saja tetap berkomitmen untuk menjadi negara yang mandiri dan berdaulat, terlepas dari siapapun yang memimpin Amerika Serikat. □

Bedah Buku:

Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Perlu Diatur dalam Konstitusi

Buku tentang ruang angkasa ditulis oleh seorang mahasiswa UMJ (Universitas Muhammadiyah Jakarta). Buku ini membahas bagaimana ruang yang berada di atas negara Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat. Karena itu ruang angkasa perlu dimasukkan dalam konstitusi.

WAKIL Ketua MPR Zulkifli Hasan mengapresiasi acara 'Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat' yang digelar oleh Perpustakaan MPR di Ruang Delegasi, Lt. 2, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, 4 November 2020. Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhasan tampil secara daring mengatakan, bersyukur bisa menghadiri acara bedah buku berjudul 'Konstitusi dan Ruang Angkasa' karya Athari Farhani ini.

Zulhasan menyatakan, MPR telah melakukan amandemen UUD Tahun 1945 empat kali, namun bidang ruang angkasa belum tersentuh. Dalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. "Nah, yang menyangkut ruang angkasa belum ada," tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Untuk itu, dia menyatakan syukur acara bedah buku konstitusi dan ruang angkasa ini diselenggarakan pada hari itu sehingga membuka wawasan dan kesadaran baru.

Membahas mengenai ruang angkasa, menurut pria asal Lampung, itu sangat penting. Ia mengandaikan jika ruang angkasa sudah seperti tanah dan laut, yakni dikapling-kapling. Baginya perkembangan ilmu teknologi dan informasi sekarang sudah sangat luar biasa. Saluran atau jaringan-jaringan komunikasi melalui ruang angkasa menunjukkan pentingnya ruang angkasa.

Untuk itu, menurut Zulhasan, ruang angkasa perlu diatur. Bila ruang angkasa tidak diatur maka negara-negara yang memiliki teknologi tinggi luar angkasa akan menguasainya. "Di ruang angkasa sudah terjadi persaingan antarnegara yang sangat ketat," tutur Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Buku karya mahasiswa Fakultas Hukum UMJ itu, menurut Zulhasan, merupakan sesuatu yang baru. Dia berharap, buku itu menambah literatur. Sumber daya alam, kata Zulhasan, perlu ditambah dengan aspek ruang angkasa. "Untuk itu perlu diatur dalam konstitusi," tegasnya. Nah, bila amandemen UUD NRI Tahun 1945 jadi dilaksanakan maka hal itu perlu dipikirkan.

Kabiro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, dalam kesempatan sama menyebutkan, buku yang dibedah pada hari itu sangat menarik. "Karena terkait dengan ruang angkasa dan konstitusi," tuturnya. Apa yang ada di buku itu, menurut Siti Fauziah, berguna untuk menambah ilmu bagi bangsa dan negara. "Inilah tujuan kita melakukan acara bedah buku ini, tuturnya. "Apa yang ada di buku ini mudah-

mudahan bisa bermanfaat," tambahnya.

Kepada peserta yang mayoritas mahasiswa, Siti Fauziah mengatakan bahwa Perpustakaan MPR tetap menggelar acara bedah buku itu, meski di masa pandemic Covid-19. "Namun, kita tetap menerapkan protokol kesehatan", tegasnya.

Lebih lanjut Siti Fauziah menyampaikan, Perpustakaan MPR terbuka untuk umum. "Siapa saja boleh menggunakan fasilitas yang ada," ujar perempuan asal Bandung, Jawa Barat, itu. Dia menginformasikan, di Perpustakaan MPR terdapat 17.000 buku. Buku-buku yang ada sangat mendukung mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Hukum, dalam mencari referensi untuk bahan penyusunan skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Penulis buku, Athari Farhani, mengatakan, di dalam konstitusi yang diatur hanya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Padahal Indonesia, menurut alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), itu menganut tiga dimensi, yakni darat, laut, dan udara. Akibat udara dan angkasa tidak dimasukkan ke dalam konstitusi membuat dimensi itu tidak masuk dalam wilayah penguasaan negara.

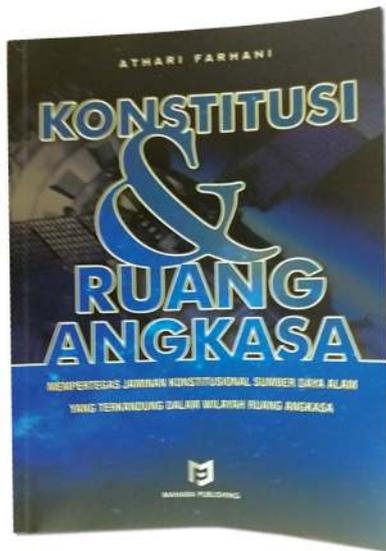
Menurut Athari, aturan ruang angkasa yang ada di konvensi internasional yang telah diratifikasi maupun regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang angkasa belum diatur secara tegas. Padahal ruang angkasa saat ini berhubungan erat dengan hajat hidup orang banyak, yakni pemanfaatan GSO (geo stationary orbit). Lewat buku ini penulis menyadarkan bahwa betapa pentingnya mengatur sumber daya alam ruang angkasa, yang untuk selanjutnya dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Buku terbitan *Mahara Publishing* ini memiliki tebal XXXVII + 121. Di sampul belakang terdapat testimoni dari para pakar di bidangnya, seperti

pakar hukum tata negara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie; Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Dr. Syaiful Bakri, SH., MH.; Pengajar Hukum Internasional Akademi Hukum Rusia Kementerian Yustisia Federasi Rusia, Raymond Junior Pardamean, Ph.D.

Jimly mengatakan, dalam kerangka NKRI, penataan ruang masa depan, termasuk ruang udara atau angkasa, harus diselenggarakan berdasarkan asas-asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, keberhasilan, keterbukaan, kebersamaan, kemitraan, perlindungan kepentingan umum, dan kepastian hukum. □

AWG



FFY